



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SNKI STRATEGI
NASIONAL
KEUANGAN
INKLUSIF
Membangun Indonesia Sejahtera

LAPORAN PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF TAHUN 2025



LAPORAN PELAKSANAAN
STRATEGI NASIONALKEUANGAN INKLUSIF
TAHUN 2025

Halaman ini sengaja dikosongkan

SAMBUTAN

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua

Om swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan RPJMN 2025 - 2029 dan mewujudkan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto tahun 2024 - 2029, Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) terus mendorong akselerasi inklusi dan literasi keuangan masyarakat. Data Survei Nasional Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan (SNLIK) menunjukkan perkembangan positif dengan tingkat inklusi keuangan meningkat dari 59,7 persen pada tahun 2016 menjadi 92,74 persen pada tahun 2025. Sejalan dengan itu, tingkat literasi keuangan di Indonesia juga mengalami tren serupa dengan peningkatan dari 21,8 persen menjadi 66,64 persen di periode yang sama.

Pencapaian tingkat inklusi dan literasi keuangan tersebut tidak terlepas dari arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang diwujudkan melalui kolaborasi pelaksanaan sinergi seluruh anggota DNKI baik kementerian/lembaga, otoritas sektor keuangan, bank sentral, pemerintah daerah dalam kerangka TPAKD, serta mitra pembangunan nasional maupun internasional.

Inklusi dan literasi keuangan merupakan bagian penting dari Asta Cita Bapak Presiden, karena keduanya berkontribusi pada pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Melalui literasi keuangan yang baik memungkinkan masyarakat untuk membuat keputusan keuangan yang tepat, mengelola risiko secara bijaksana, serta mencapai tujuan keuangan mereka. Sementara inklusi keuangan memperluas akses masyarakat khususnya kelompok rentan dan masyarakat di daerah tertinggal, terhadap layanan keuangan formal berupa modal usaha, layanan keuangan mikro dan produk keuangan lainnya yang dapat mendukung peningkatan produktivitas, pengembangan usaha, dan kesejahteraan

Sejalan dengan arahan Presiden dimaksud, pada tanggal 27 November 2025 dalam pertemuan bilateral dengan Advokat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesejahteraan Keuangan (United Nations Secretary-General's Special Advocate for Financial Health/UNSGSA), pemerintah menegaskan komitmen untuk memperkuat tata kelola kebijakan inklusi keuangan nasional melalui pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Hingga akhir tahun 2025, telah dilakukan upaya untuk menuntaskan peraturan pembentukan DNKK.

Penguatan DNKI menjadi DNKK mencerminkan peningkatan fokus kebijakan nasional dari inklusi keuangan menuju tercapainya kesejahteraan keuangan masyarakat secara menyeluruh. Transformasi kelembagaan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa perluasan akses keuangan tidak hanya berakhir pada penggunaan layanan keuangan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat secara berkelanjutan.

Pendekatan ini juga menempatkan kesejahteraan keuangan masyarakat sebagai tujuan utama, yang sekaligus menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai target 8 persen.

Ke depan, penguatan inklusi dan kesejahteraan keuangan masyarakat harus berjalan seiring dengan terjaganya stabilitas sektor keuangan nasional melalui penyusunan Strategi Nasional Kesejahteraan Keuangan (SNKK). Stabilitas yang kuat akan menjadi fondasi penting bagi peningkatan produktivitas tenaga kerja serta pengembangan kegiatan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan pembangunan nasional jangka panjang untuk memperkuat kesehatan keuangan masyarakat Indonesia dapat tercapai secara optimal.

Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, industri sektor keuangan, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan SNKI. Semoga laporan tahunan ini tidak hanya menjadi dokumentasi capaian, tetapi juga menjadi rujukan strategis dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang semakin inklusif, tangguh, dan sejahtera secara finansial

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera

Om Shanti Shanti Shanti Om



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif
Dr. (H.C.) Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T

SAMBUTAN

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semua
Om Swastiastu
Namo Buddhaya
Salam Kebajikan

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Pelaksanaan SNKI Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan pelaksanaan SNKI, capaian program dan kegiatan dalam mendorong inklusi dan literasi keuangan, serta berbagai tantangan yang dihadapi oleh Kelompok Kerja dan Sekretariat DNKI bersama para mitra strategis.

Perkembangan keuangan inklusif di Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif dan progresif. Berdasarkan SNLIK tahun 2025, tingkat inklusi keuangan umum yang disupervisi oleh Kementerian/Lembaga, otoritas keuangan dan bank sentral terkait yang meliputi perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga pembiayaan termasuk Badan Layanan Umum (BLU), *joint venture*, koperasi, dana pensiun, pergadaian, lembaga keuangan mikro, *fintech lending*, jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan serta penyelenggaraan sistem pembayaran telah mencapai 92,74 persen. Sementara itu, untuk tingkat inklusi keuangan khusus yang disupervisi oleh otoritas keuangan dan bank sentral mencapai 80,51 persen.

Tingkat inklusi keuangan Indonesia menunjukkan perkembangan positif dibandingkan tahun 2016 ketika DNKI mulai dibentuk. Dalam kurun waktu tersebut, tingkat inklusi keuangan nasional meningkat dari 59,7 persen menjadi 92,74 persen atau tumbuh rata-rata 3 poin persentase setiap tahunnya. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat literasi keuangan di Indonesia juga mengalami tren serupa dengan peningkatan dari 21,8 persen menjadi 66,64 persen di periode yang sama. Upaya akselerasi yang dilakukan secara kolaboratif ditargetkan mampu mendorong tingkat literasi keuangan nasional mendekati tingkat inklusi keuangan, sehingga kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan dapat semakin dipersempit.

Oleh karena itu, fokus kebijakan ke depan tidak hanya diarahkan pada perluasan akses keuangan, tetapi juga pada peningkatan kualitas pemanfaatan layanan keuangan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yang lebih terarah, berbasis data, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci dalam transformasi kebijakan nasional yang menempatkan kesejahteraan keuangan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan sektor keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sejalan dengan dinamika global, Pemerintah juga tengah menyiapkan langkah transformasi kelembagaan yang strategis untuk memperkuat orientasi kebijakan dari inklusi keuangan

menuju kesejahteraan keuangan. Pendekatan kesejahteraan keuangan tidak hanya menekankan pada kepemilikan akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga pada kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan harian, memiliki ketahanan finansial, mengambil keputusan finansial secara bijak dan terukur serta mencapai tujuan ekonomi jangka panjang secara berkelanjutan. Dengan transformasi ini, diharapkan kebijakan keuangan inklusif ke depan akan semakin terintegrasi, berdampak nyata, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan SNKI. Kami berharap laporan ini dapat menjadi sumber informasi, evaluasi, dan pembelajaran bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat implementasi kebijakan serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk mempercepat terwujudnya inklusi dan kesejahteraan keuangan masyarakat Indonesia

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera

Om Shanti Shanti Shanti Om



Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital

Dr. Ir. Ali Murtopo Simbolon, S.T., S.Si., M.M., M.T., IPU.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	iv
SAMBUTAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL.....	vi
DAFTAR ISI	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Perkembangan Keuangan Inklusif di Indonesia	3
1.2 Arah Kebijakan Keuangan Inklusif Menuju Kesejahteraan Keuangan	5
1.3 Kondisi Kesejahteraan Keuangan Masyarakat.....	8
BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	11
2.1 Indikator Jangkauan Akses	13
2.2 Indikator Penggunaan Layanan.....	14
2.3 Indikator Kualitas.....	15
2.4 Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	17
BAB III CAPAIAN KELOMPOK KERJA.....	21
3.1 Kelompok Kerja Edukasi Keuangan	24
3.2 Kelompok Kerja Hak Properti Masyarakat.....	30
3.3 Pokja Fasilitasi Intermediasi dan Saluran Distribusi.....	37
3.4 Kelompok Kerja Pelayanan Keuangan Sektor Pemerintah.....	49
3.5 Kelompok Kerja Perlindungan Konsumen	52
3.6 Kelompok Kerja Kebijakan dan Regulasi	54
3.7 Kelompok Kerja Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan.....	56
3.8 Sekretariat DNKI	59
3.9 Sinergi dan Kolaborasi Program.....	61
BAB IV PENINGKATAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH.....	79
BAB V TANTANGAN DAN REKOMENDASI.....	91
5.1 Tantangan	93
5.2. Rekomendasi	95
LAMPIRAN.....	99
DAFTAR SINGKATAN	125

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) Tahun 2025 menunjukkan bahwa agenda keuangan inklusif nasional terus mengalami penguatan, baik dari sisi perluasan akses, peningkatan penggunaan layanan keuangan formal, penguatan infrastruktur pendukung, maupun penyempurnaan arah kebijakan. Dalam konteks pembangunan nasional, capaian tahun 2025 memiliki arti penting karena berada pada fase awal pelaksanaan agenda pembangunan periode 2025–2029, sekaligus menjadi konsolidasi arah kebijakan keuangan inklusif menuju pendekatan yang lebih berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang mengamanatkan inklusi keuangan dan literasi keuangan yang berkualitas sehingga dapat mendukung kesejahteraan masyarakat serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang menetapkan target inklusi keuangan sebesar 98 persen pada tahun 2045 sebagai salah satu sasaran penting pembangunan nasional berkelanjutan menuju Indonesia Emas.

Secara umum, perkembangan keuangan inklusif pada tahun 2025 menunjukkan tren yang positif. Dari sisi jangkauan akses, ekosistem layanan keuangan formal terus diperluas melalui peningkatan jumlah *merchant Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), agen layanan keuangan digital, dan agen laku pandai sebagai *last-mile payment point*. Dari sisi penggunaan, pertumbuhan tercermin pada meningkatnya jumlah rekening simpanan, rekening kredit/pembiayaan, serta uang elektronik. Sementara itu, dari sisi kualitas, penguatan juga terlihat pada perbaikan penyelesaian pengaduan konsumen dan serta kondisi suku bunga riil yang terkendali pada level yang relatif rendah, sehingga memperkuat aksesibilitas pembiayaan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa layanan keuangan formal di Indonesia semakin menjangkau aktivitas ekonomi masyarakat secara lebih luas dan terdigitalisasi.

Namun demikian, peningkatan akses keuangan belum sepenuhnya berkontribusi terhadap kondisi keuangan rumah tangga. Berbagai temuan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan finansial sehari-hari, membangun dana darurat, merencanakan masa depan, dan mengelola risiko keuangan secara memadai. Kondisi tersebut menegaskan bahwa tantangan kebijakan ke depan tidak lagi semata-mata terletak pada perluasan akses, tetapi pada bagaimana memastikan bahwa akses tersebut benar-benar digunakan secara sehat, produktif, aman, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, tahun 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat penajaman arah kebijakan dari inklusi keuangan menuju kesejahteraan keuangan masyarakat.

Pelaksanaan SNKI Tahun 2025 didukung oleh 7 (tujuh) Kelompok Kerja (Pokja) DNKI yang secara keseluruhan memperlihatkan penguatan implementasi lintas sektor.

Pokja Edukasi Keuangan memperluas jangkauan literasi keuangan melalui berbagai kegiatan edukasi mencakup inisiatif GENCARKAN (Gerakan Nasional Cerdas Keuangan), penguatan kanal digital pembelajaran, dan intervensi pada kelompok sasaran prioritas. Sepanjang tahun 2025, sebanyak 504 dari 514 (98,05%) Kab/Kota di Indonesia telah dilakukan pelaksanaan Edukasi Berbasis Wilayah dan Segmen (GENCARKAN). Selain itu, sebanyak 15.631 Duta Literasi Keuangan yang terdaftar mencakup Mahasiswa, Komunitas, dan PUJK. Dalam rangkaian Bulan Inklusi Keuangan, GENCARKAN tahun 2025 menghasilkan output pembukaan akun perbankan sebanyak 3.557.278 rekening, pasar modal 643.000 rekening efek, Perasuransian 950.716 polis, Pembiayaan 1.474.749 debitur, Pergadaian 5.011.886 rekening, dan Fintech 719.628 akun.

Pokja Hak Properti Masyarakat mendukung perluasan akses pembiayaan melalui penguatan legalitas aset serta pemberdayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan masyarakat rentan. Sepanjang tahun 2025, inisiatif telah dilaksanakan dari percepatan sertifikasi 4,76 juta bidang tanah dengan tingkat keterdaftaran nasional mencapai 99,91%, pengembangan Kampung Reforma Agraria dan penataan akses berbasis *closed-loop ecosystem* melalui kemitraan dengan *offtaker*, lembaga keuangan, dan pemerintah daerah, hingga optimalisasi pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan produktif masyarakat. Selain itu, Pokja mendorong penguatan aset tidak berwujud melalui fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa pendaftaran merek dan hak cipta, percepatan sertifikasi halal bagi UMKM melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), serta pengembangan model bisnis inklusif bagi kelompok subsisten. Sekretariat DNKI juga secara langsung memfasilitasi kolaborasi strategis antara BPJPH dan Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Agung Jakarta (PSE KAJ) dalam pendampingan komunitas Sentra Bimbingan Usaha Kecil (SABUK), yang menghasilkan penerbitan sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro serta komitmen fasilitasi 3.000 pelaku usaha mikro dan ultra mikro binaan KAJ. Selanjutnya upaya tersebut diperkuat melalui *business matching* pembiayaan, implementasi SIAPIK, peningkatan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), dan pemberdayaan ekonomi syariah untuk mendorong UMKM masuk ke dalam ekosistem keuangan formal secara berkelanjutan.

Pokja Fasilitasi Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan mendorong perluasan kanal layanan keuangan agar semakin dekat dengan masyarakat, melalui pengembangan fitur QRIS, layanan keagenan, tabungan untuk pelajar, hingga pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh provinsi

dan kabupaten/kota. Output yang dihasilkan dari pokja fasilitasi intermediasi dan saluran distribusi keuangan antara lain, terbentuknya TPAKD di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, juga menghasilkan volume transaksi Qris antarnegara tahun 2025 sebanyak 7.569.789 transaksi dengan nilai sebesar 1.98 triliun rupiah.

Selanjutnya, Pokja Layanan Keuangan Sektor Pemerintah memperkuat integrasi layanan keuangan dalam berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial, pembiayaan bersubsidi, dan elektronifikasi transaksi. Realisasi penyaluran bantuan sosial PKH tahun 2025 sebesar Rp26,71 T atau 92,96 persen kepada 9,62 juta KPM secara nontunai.

Pelaksanaan program Pokja 5 Perlindungan Konsumen dalam kerangka SNKI pada tahun 2025 menunjukkan kemajuan positif dan kolaborasi kuat antara OJK, Bank Indonesia, Kementerian UMKM, dan Kementerian Hukum dalam memperkuat sistem perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Keberhasilan ini tercermin dari capaian berbagai indikator utama yang berhasil melampaui target tahunan, meliputi penyelesaian pengaduan konsumen (97,21%), tingkat kepatuhan pelaku usaha (91%), penanganan hak konsumen dari entitas yang dicabut izinnya (97%), penyelesaian rekomendasi LAPS SJK (100%), serta penanganan entitas ilegal oleh Satgas PASTI (94%) dan pemblokiran rekening penipuan (89%). Selain optimalisasi pengawasan dan penindakan aktivitas keuangan ilegal, Pokja 5 juga sukses berfokus pada penguatan regulasi berbasis risiko, perluasan edukasi masyarakat melalui Gerakan Bersama Edukasi Perlindungan Konsumen (GEBER PK), serta formalisasi usaha mikro guna menciptakan ekosistem keuangan yang aman, adil, dan terpercaya.

Pokja Kebijakan dan Regulasi mendukung penguatan kerangka kebijakan dan harmonisasi regulasi, termasuk dalam penyiapan arah transformasi kebijakan menuju kesejahteraan keuangan. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), pada bulan November tahun 2025 telah selesai dilakukan harmonisasi atas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Komite Nasional Peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

Sementara itu, Pokja Teknologi Informasi Keuangan berperan dalam mendukung digitalisasi layanan dan penguatan infrastruktur informasi keuangan sebagai *enabler* perluasan akses yang lebih efisien dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Tahun 2025 menjadi landasan awal penguatan arsitektur kebijakan menuju pendekatan kesejahteraan keuangan yang lebih komprehensif. Pemerintah akan memfokuskan penguatan kebijakan pada penyempurnaan kelembagaan dan kebijakan nasional, terutama melalui percepatan pembentukan Dewan Nasional

Kesejahteraan Keuangan (DNKK) sebagai penguatan dan penyempurnaan dari DNKI. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah juga tengah menyiapkan instrumen hukum dan kebijakan yang diperlukan untuk mendukung transformasi dari SNKI menuju Strategi Nasional Kesejahteraan Keuangan (SNKK), sehingga kerangka kebijakan ke depan memiliki orientasi yang lebih kuat pada ketahanan finansial rumah tangga, produktivitas ekonomi masyarakat, perlindungan konsumen, dan keberlanjutan dampak pembangunan. Penguatan ini juga merupakan bagian dari implementasi amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), arahan Presiden dalam pertemuan bilateral dengan Ratu Máxima (UNSGSA), *High Level Dialogue* Bapak Menko Bidang Perekonomian serta hasil Rapat Kabinet Terbatas yang menekankan perlunya penguatan inklusi keuangan, literasi keuangan, dan perlindungan konsumen secara lebih terintegrasi dalam mendukung kesejahteraan keuangan masyarakat.

01

PENDAHULUAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

1.1 Perkembangan Keuangan Inklusif di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), keuangan inklusif didefinisikan sebagai ketersediaan akses pemanfaatan atas produk dan/atau layanan pelaku usaha sektor keuangan yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat. Keuangan inklusif memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat diharapkan memiliki akses yang luas, penggunaan yang optimal, serta kualitas layanan yang memadai terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal, seperti tabungan, pembiayaan, asuransi, pasar modal, serta sistem pembayaran.

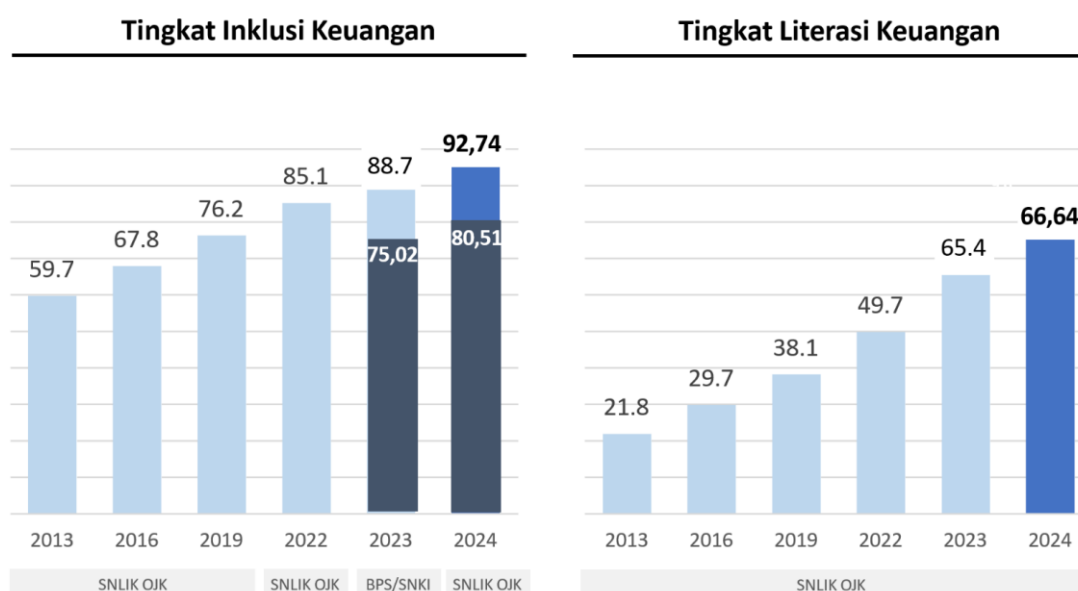
Dalam RPJPN 2025–2045, ditetapkan target tingkat inklusi keuangan mencapai 98% pada tahun 2045, yang mencerminkan visi jangka panjang untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan formal yang berkualitas. Sebagai tahapan menuju target tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang mengamanatkan inklusi keuangan dan literasi keuangan yang berkualitas sehingga dapat mendukung kesejahteraan masyarakat. Penetapan target ini menegaskan bahwa perluasan akses keuangan harus berjalan seiring dengan penguatan kapasitas masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan layanan keuangan secara tepat, sehingga akses tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu mendorong peningkatan kesejahteraan dan ketahanan finansial masyarakat secara nyata.

Sejalan dengan hal tersebut, Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang menekankan penguatan implementasi ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi digital memiliki keterkaitan erat dengan pengembangan keuangan inklusif. Dalam konteks ini, inklusi keuangan memiliki peranan penting dalam mendukung pencapaian target pendapatan per kapita setara negara maju, sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial.

Untuk menghitung tingkat inklusi keuangan Tahun 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK). Parameter yang digunakan dalam menghitung indeks inklusi keuangan adalah penggunaan (*usage*) terhadap produk dan layanan keuangan. Metode penghitungan SNLIK dilakukan menggunakan dua cakupan. (i) Pertama, disebut sebagai Cakupan Khusus (keberlanjutan) meliputi perhitungan yang dilakukan pada sembilan sektor jasa keuangan di bawah supervisi OJK (Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, Pegadaian, Lembaga Keuangan Mikro, *Fintech Lending* (Pindar), PT Permodalan Nasional Madani, dan Penyelenggara Sistem Pembayaran (PSP) sebagaimana cakupan pada SNLIK Tahun 2025 sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan program literasi dan inklusi keuangan oleh pengelola usaha jasa keuangan. (ii) Kedua, disebut sebagai Cakupan Umum, yaitu penghitungan yang memperluas cakupan sektor keuangan dengan penambahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan serta Lembaga Jasa Keuangan Lain (Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Penyelenggara Perdagangan Aset Kripto/PT Pos Indonesia/Lembaga Penjaminan/dan lain-lain).

Pada SNLIK tahun 2025, tingkat inklusi keuangan menurut Cakupan Umum yang disupervisi oleh otoritas keuangan dan bank sentral serta Kementerian/Lembaga terkait yang meliputi perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga pembiayaan, dana pensiun, pergadaian, lembaga keuangan mikro, *fintech lending*, dan penyelenggaraan sistem pembayaran telah mencapai 92,74 persen meningkat sebesar 4,04 poin persentase dibandingkan SNLIK tahun 2024 sebesar 88,7 persen. Sementara itu, untuk tingkat inklusi keuangan khusus yang disupervisi oleh otoritas keuangan dan bank sentral mencapai 80,51 persen atau meningkat sebesar 5,49 poin persentase dibandingkan SNLIK tahun 2024 sebesar 75,02 persen.

Grafik 1.1 Indeks Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan Nasional



Sumber: SNLIK 2025

Sejalan dengan peningkatan inklusi keuangan, literasi keuangan juga meningkat mencapai 66,64 persen meningkat sebesar 1,21 poin persentase dibandingkan SNLIK tahun 2024 sebesar 65,43 persen. Upaya akselerasi yang dilakukan secara kolaboratif ditargetkan mampu mendorong tingkat literasi keuangan nasional mendekati tingkat inklusi keuangan, sehingga gap antara tingkat literasi dan inklusi keuangan tidak terlalu dalam.

Untuk mengukur capaian tahun 2025, telah dilaksanakan SNLIK sebagai upaya pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Selain itu, hasil survei juga digunakan untuk mengevaluasi berbagai program peningkatan literasi keuangan yang telah dijalankan, termasuk program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN). Data yang dihasilkan dari SNLIK akan memberikan informasi yang lebih representatif hingga tingkat provinsi, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Secara lebih luas, survei ini juga mendukung pencapaian target nasional, yaitu tingkat inklusi keuangan sebesar 98 persen pada tahun 2045.

Gambar 1.1 Pilar dan Pondasi Keuangan Inklusif



1.2 Arah Kebijakan Keuangan Inklusif Menuju Kesejahteraan Keuangan

Indonesia telah mencatat kemajuan signifikan dalam perluasan akses keuangan formal secara masif dan merata dalam satu dekade terakhir. Tingginya tingkat inklusi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah memiliki akses terhadap rekening, layanan pembayaran, pembiayaan, maupun produk keuangan lainnya. Namun demikian, kesenjangan antara inklusi dan literasi keuangan mengindikasikan bahwa tidak seluruh akses keuangan telah diiringi dengan kemampuan yang memadai dalam mengelola keuangan secara sehat dan berkelanjutan.

Kemajuan inklusi keuangan tidak terlepas dari peran strategis DNKI. Upaya tersebut diwujudkan melalui edukasi keuangan yang dilakukan secara masif dan berkelanjutan bagi berbagai kelompok masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat pemberdayaan hak properti masyarakat, khususnya melalui percepatan legalitas aset, sehingga masyarakat memiliki dasar yang kuat untuk mengakses pembiayaan formal dan meningkatkan kapasitas ekonominya.

Selanjutnya, fasilitasi intermediasi dan penguatan saluran distribusi keuangan terus diperluas, termasuk melalui pengembangan agen keuangan, digitalisasi layanan, serta penguatan lembaga keuangan mikro. Pemerintah juga mendorong pelayanan keuangan sektor pemerintah, seperti penyaluran bantuan sosial secara non tunai, program pembiayaan bersubsidi (Kredit Usaha Rakyat - KUR dan Ultra Mikro - UMi), serta elektronifikasi transaksi pemerintah.

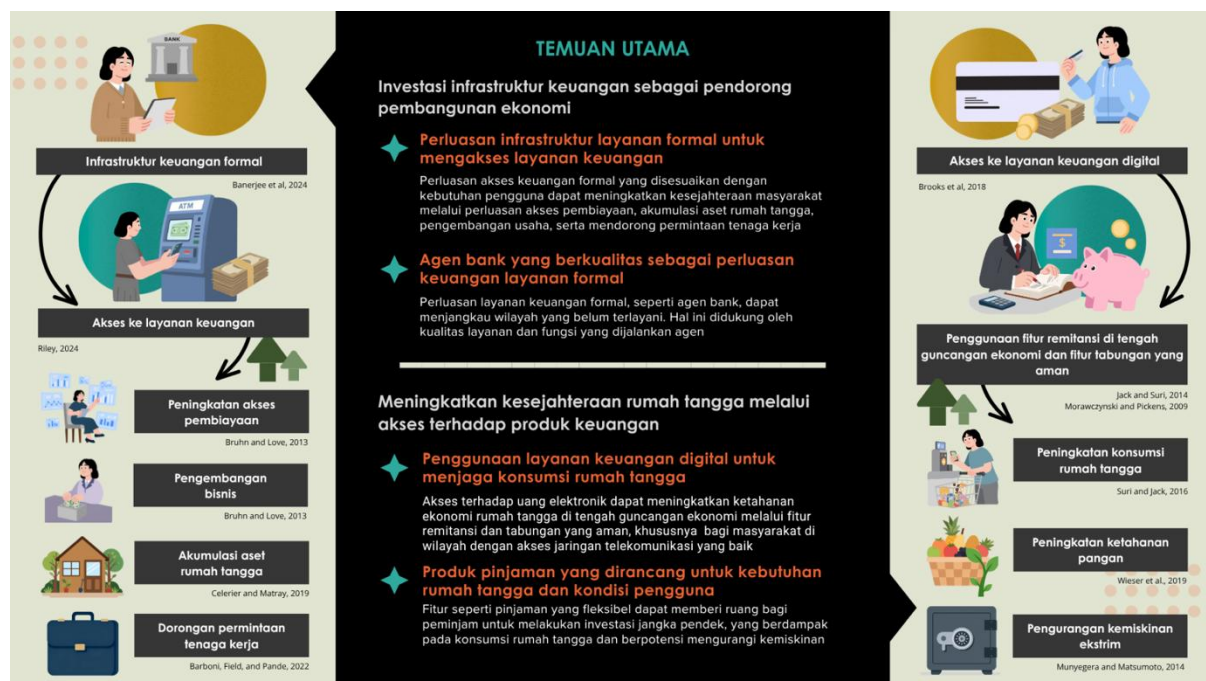
Untuk memastikan keberlanjutan, aspek perlindungan konsumen diperkuat guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Seluruh upaya tersebut didukung

oleh kebijakan regulasi yang adaptif, serta penguatan infrastruktur dan teknologi informasi keuangan, termasuk sistem pembayaran digital dan integrasi data nasional.

J-PAL telah merangkum berbagai bukti empiris yang menunjukkan bahwa perluasan akses terhadap layanan keuangan formal berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Studi Burgess dan Pande (2005) menunjukkan bahwa ekspansi perbankan di pedesaan berkontribusi pada pengurangan tingkat kemiskinan, saat disertai dengan kebijakan subsidi kredit. Perluasan akses infrastruktur keuangan dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap kesejahteraan ketika desain produk keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pengguna.

Bukti dari berbagai negara menunjukkan bahwa akses terhadap tabungan, kredit, pembayaran, dan transfer mampu memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga. Layanan keuangan digital, seperti uang elektronik, mempermudah masyarakat menabung serta mengirim dan menerima dana sehingga membantu menjaga konsumsi saat menghadapi guncangan ekonomi. Studi lain juga menunjukkan bahwa akses terhadap uang elektronik berkontribusi pada peningkatan konsumsi, pengurangan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, akses terhadap kredit dapat meningkatkan pendapatan dan konsumsi apabila skema pinjaman dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha kecil.

Gambar 1.2 Temuan Utama Peningkatan Kesejahteraan Keuangan Melalui Akses Layanan Keuangan



Dukungan bagi pelaku usaha membutuhkan pendekatan yang terarah dan kontekstual dalam menghadapi kebutuhan usaha yang beragam. Salah satu contohnya adalah pemberian kredit mikro, yang memiliki dampak lebih optimal ketika disalurkan kepada pelaku usaha yang memiliki pengalaman serta kinerja usaha yang baik. Berkaca ke pengalaman di Indonesia, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dirancang untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha menunjukkan indikasi positif dalam mendorong peningkatan aktivitas ekonomi. Di samping pembiayaan, penguatan ekosistem keuangan digital juga menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Perkembangan sistem pembayaran digital,

seperti QRIS, membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi transaksi, serta mempermudah pencatatan keuangan.

Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa manfaat inklusi keuangan akan semakin optimal apabila diiringi intervensi yang sesuai dengan karakteristik kelompok sasaran. Pada pelaku usaha perempuan, pendekatan kebijakan yang mengintegrasikan edukasi keuangan dengan akses pembiayaan dan produk tabungan berpotensi meningkatkan literasi keuangan, kepemilikan aset, dan peluang ekonomi perempuan (CGAP, 2023). Selain itu, model pembiayaan berbasis kelompok menunjukkan potensi yang kuat dalam meningkatkan inklusi keuangan, aktivitas usaha rumah tangga, dan pemberdayaan perempuan.

Gambar 1.3 Kunjungan Ratu Maxima



Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Ratu Máxima dari Belanda di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 27 November 2025. Sumber: BPMI Setpres/Laily Rachev

Peningkatan inklusi keuangan menjadi kesejahteraan keuangan di Indonesia mengacu pada arahan strategis Bapak Presiden Prabowo Subianto dan *High Level Dialogue* Kesejahteraan Keuangan yang dipimpin oleh Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 27 November 2025, serta hasil Rapat Terbatas Kabinet yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2025 di Istana Negara. Dengan mengacu kepada arahan pimpinan maka implementasinya perlu dilakukan penguatan kelembagaan DNKI menjadi DNKK dan SNKI menjadi SNKK. Pembentukan DNKI juga mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK. Sementara SNKK merupakan penyempurnaan dari Peraturan Presiden 144 Tahun 2020. Di tingkat daerah, upaya inklusi keuangan diperkuat melalui 552 TPAKD yang tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, yang menjadi ujung tombak implementasi SNKI. Kehadiran TPAKD memastikan bahwa kebijakan keuangan inklusif tidak berhenti di tingkat pusat, tetapi benar-benar menjangkau masyarakat hingga ke daerah.

Meskipun akses keuangan masyarakat telah tinggi, namun belum sepenuhnya menjamin peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia kini memasuki fase kebijakan yang lebih maju, yaitu pergeseran dari fokus inklusi keuangan menuju kesejahteraan keuangan (*financial well-being*). Kesejahteraan keuangan merupakan kondisi ketika individu atau rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, memiliki ketahanan terhadap

guncangan keuangan, mampu merencanakan dan mewujudkan tujuan jangka panjang, serta memiliki kontrol, rasa aman, dan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan finansial.

Pendekatan kesejahteraan keuangan menjadi semakin penting di tengah meningkatnya kompleksitas produk keuangan, digitalisasi yang cepat, serta kerentanan masyarakat terhadap risiko penipuan, *over-indebtedness*, dan guncangan ekonomi. Dengan kesejahteraan keuangan yang kuat, inklusi keuangan tidak hanya menghasilkan angka, tetapi juga menciptakan dampak nyata terhadap stabilitas sosial dan ekonomi.

Sebagai respons atas kebutuhan tersebut, Kemenko Perekonomian sebagai pemrakarsa tengah menyiapkan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden, sebagai penyempurnaan dan penguatan dari DNKI. Upaya tersebut sebagai wujud komitmen nasional tertinggi dalam mendorong kesejahteraan keuangan masyarakat. Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan instrumen hukum sebagai landasan pembentukannya.

Melalui transformasi kebijakan ini, Indonesia menegaskan arah baru pembangunan keuangan nasional yaitu memastikan bahwa setiap peningkatan inklusi dan literasi benar-benar bermuara pada tujuan akhir, yaitu terwujudnya kesejahteraan keuangan masyarakat yang tangguh, berdaya, dan berkelanjutan.

1.3 Kondisi Kesejahteraan Keuangan Masyarakat

Konsep kesejahteraan keuangan masyarakat menjadi semakin relevan dalam agenda pembangunan, karena peningkatan akses terhadap layanan keuangan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan meningkatnya ketahanan finansial dan kualitas hidup masyarakat. Dengan kata lain, inklusi keuangan yang berkembang pesat belum otomatis memastikan masyarakat mampu mengelola risiko, memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan, maupun mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Dalam kerangka yang dikembangkan oleh *United Nations Secretary-General's Special Advocate for Financial Health (UNSGSA)*, kesejahteraan keuangan dipahami melalui empat dimensi utama, yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan dan kewajiban finansial sehari-hari, ketahanan terhadap guncangan keuangan, kemampuan merencanakan serta mencapai tujuan keuangan masa depan, serta tingkat kepercayaan diri dan kendali individu dalam mengambil keputusan keuangan.

Dari sisi kemampuan pengelolaan keuangan sehari-hari, masih banyak rumah tangga Indonesia yang berada dalam kondisi rentan secara finansial. Sekitar 6 dari 10 orang menyatakan bahwa pendapatan yang mereka peroleh belum mencukupi kebutuhan hidup dasar, dan 58% masyarakat mengakhiri bulan tanpa sisa uang. Hampir 4 dari 10 orang juga tidak mampu menutup pengeluaran besar yang tak terduga tanpa meminjam atau mengandalkan bantuan keluarga maupun teman (*OECD/INFE International Survey of Adult Financial Literacy, 2023*). Secara rata-rata, rumah tangga Indonesia mengalokasikan sekitar 75% pendapatan untuk konsumsi harian dan 11% untuk pembayaran utang, sehingga hanya sekitar 14% yang tersisa untuk tabungan (*Survei Konsumen Bank Indonesia, 2025*). Struktur keuangan rumah tangga yang demikian sempit membuat banyak keluarga berada pada kondisi yang sangat rentan terhadap guncangan ekonomi sekecil apa pun. Di sisi lain, perubahan pola konsumsi turut memengaruhi kesehatan keuangan masyarakat. Sekitar setengah konsumen memanfaatkan layanan *Buy Now Pay Later (BNPL)*, dan 3 dari 10 orang

menggunakan pinjaman gaji (*payday loans*) untuk memenuhi kebutuhan harian (*BCG Financial Health in SEA Indonesia Focus, 2025*), dengan separuh pengguna BNPL berasal dari kelompok usia produktif 18–35 tahun (*Fintech News, 2025*).

Tingkat ketahanan finansial masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh paparan terhadap risiko bencana. Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di kawasan ring of fire menghadapi tingkat kerentanan bencana yang tinggi. Diperkirakan sekitar 110 juta penduduk di lebih dari 60 kota tinggal di wilayah rawan bencana (*hazard-prone areas*), dengan ancaman berulang seperti banjir, gempa bumi, maupun letusan gunung berapi (*UNDP's Insurance and Risk Finance Facility, 2023*). Dalam konteks kesiapsiagaan keuangan, kondisi ini diperburuk oleh rendahnya kapasitas dana darurat masyarakat. Sebanyak 53% masyarakat hanya mampu menutup pengeluaran selama dua bulan atau kurang apabila kehilangan sumber pendapatan utama, dan 8 dari 10 orang menyatakan bahwa sangat sulit menyediakan dana darurat dalam waktu satu bulan (*World Bank Global Findex, 2025*). Meski demikian, terdapat kemajuan penting dalam perlindungan sosial, di mana sekitar 98% masyarakat telah tercakup secara nominal dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (*BPJS Kesehatan Laporan Pengelolaan Program 2024, 2025*). Tantangannya ke depan adalah memastikan pemanfaatan yang lebih optimal, terutama melalui peningkatan literasi dan akses terhadap layanan kesehatan, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.

Dalam dimensi perencanaan masa depan, sebagian besar masyarakat Indonesia menyatakan bahwa mereka menabung untuk tujuan jangka panjang seperti ketenangan finansial, pendidikan anak, dan masa pensiun. Namun tekanan biaya hidup yang terus meningkat mulai memengaruhi kemampuan menabung masyarakat. Sekitar 1 dari 3 orang mengaku menabung lebih sedikit atau bahkan tidak menabung sama sekali. Sebanyak 4 dari 10 orang masih mengandalkan tabungan dasar sebagai instrumen utama untuk masa depan, sementara hanya 2 dari 10 yang memanfaatkan deposito berjangka sebagai bagian dari perencanaan pensiun (*BCG Financial Health in SEA Indonesia Focus, 2025*). Tantangan ini akan semakin besar seiring dengan perubahan struktur demografi. Diperkirakan pada tahun 2050, lebih dari 1 dari 5 penduduk Indonesia akan berusia di atas 60 tahun. Namun saat ini hanya sekitar 1 dari 10 orang yang menabung secara formal untuk pensiun, dan sekitar 30% masyarakat bahkan tidak mengetahui berapa kebutuhan dana yang diperlukan untuk masa pensiun. Selain itu, cakupan program Jaminan Hari Tua (JHT) masih terbatas, dengan hanya sekitar 16% pekerja yang tercatat sebagai peserta (*Tempo, 2025*).

Sementara itu, dari sisi kepercayaan diri dan kendali atas aktivitas keuangan, sebagian besar masyarakat menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang relatif tinggi dalam mengelola keuangan. Sekitar 9 dari 10 orang menyatakan yakin terhadap kemampuan mereka dalam mengambil keputusan finansial. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara tingkat kepercayaan diri dan tingkat pemahaman yang sebenarnya (*UOB dan BCG ASEAN Consumer Sentiment Study, 2025*). Sekitar 1 dari 7 pengguna layanan keuangan masih memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah (OJK SNLIK, 2025). Kesenjangan ini berpotensi meningkatkan risiko pengambilan keputusan keuangan yang kurang tepat. Risiko tersebut semakin diperbesar oleh meningkatnya kejahatan keuangan digital. Sebanyak 7 dari 10 orang Indonesia dilaporkan menghadapi upaya penipuan digital setiap minggu (GASA, 2025), dan pada tahun 2024 sekitar 1 dari 4 masyarakat kehilangan uang akibat penipuan melalui pembayaran real-time, meningkat signifikan dari 19% pada tahun 2023 (FICO, 2024).

Berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa agenda inklusi keuangan ke depan tidak lagi cukup berfokus pada perluasan akses semata, tetapi perlu bertransformasi menuju penguatan kesejahteraan keuangan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini menuntut pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif, yang tidak hanya memperluas penggunaan layanan keuangan, tetapi juga memperkuat literasi keuangan, meningkatkan ketahanan finansial rumah tangga, memperluas perlindungan sosial, serta memastikan masyarakat mampu mengambil keputusan keuangan yang bijak dan berkelanjutan. Dengan demikian, inklusi keuangan dapat benar-benar menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Gambar 1.4 Kondisi Kesejahteraan Keuangan Masyarakat di Indonesia



Sumber: diolah dari berbagai sumber

02

**INDIKATOR KINERJA
UTAMA**

Halaman ini sengaja dikosongkan

Dalam upaya mencapai sasaran SNKI, diperlukan penyusunan rencana aksi yang didukung oleh sinergi kebijakan serta penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi. Tingkat pencapaian keuangan inklusif diukur melalui indeks keuangan inklusif yang direpresentasikan oleh persentase penduduk dewasa (berusia di atas 15 tahun) yang memanfaatkan produk dan layanan keuangan formal. Pengukuran target utama tersebut didasarkan pada indikator yang terbagi ke dalam tiga dimensi, yaitu (i) jangkauan akses keuangan, (ii) penggunaan layanan keuangan, dan (iii) kualitas layanan keuangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan SNKI.

Indikator kinerja utama (IKU) keuangan inklusif berfungsi sebagai tolok ukur dalam pengembangan program keuangan inklusif, identifikasi hambatan pelaksanaan serta pemantauan implementasi program baik di tingkat nasional maupun daerah. Capaian program keuangan inklusif dievaluasi dari dua perspektif, yaitu sisi penawaran yang mencakup penyediaan produk keuangan dan ketersediaan kanal distribusi, serta sisi permintaan yang meliputi peningkatan kepemilikan dan pemanfaatan berbagai produk keuangan oleh masyarakat. Kedua aspek tersebut dipantau secara berkala melalui indikator yang telah ditetapkan.

2.1 Indikator Jangkauan Akses

Jangkauan akses merupakan indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan formal, baik dari aspek keterjangkauan secara fisik maupun biaya. Pengukuran indikator ini dilakukan berdasarkan beberapa parameter, antara lain jumlah kantor layanan keuangan formal, jumlah mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), jumlah mesin *Electronic Data Capture* (EDC) atau *Mobile Point of Sales* (mPOS) lainnya, jumlah agen Layanan Keuangan Digital (LKD), jumlah agen Laku Pandai, serta jumlah *merchant* QRIS.

Tabel 2.1 Indikator Jangkauan Akses

Indikator Jangkauan Akses			
Indikator	Des 2024	Des 2025	Perubahan (YoY)
Jumlah Kantor Layanan Bank	29.781	29.450*	-1,11 persen
Jumlah Mesin ATM	98.250	98.342**	0,09 persen
Jumlah Mesin EDC	2.181.663	2.422.351	11,03 persen
Jumlah Agen Layanan Keuangan Digital	993.708	1.014.668	2,11 persen
Jumlah Agen Laku Pandai	1.609.291	1.765.432	9,70 persen
Jumlah Merchant QRIS	35.851.246	42.747.097	19,23 persen

Sumber: Kementerian/Lembaga anggota DNKI

Keterangan: * data per Juni 2025. ** data per September 2025

Sampai dengan Desember 2025, jumlah kantor layanan perbankan tercatat mengalami penurunan dari 29.781 unit menjadi 29.450 unit atau turun sebesar 1,11 persen secara tahunan (*year-on-year/YoY*). Penurunan ini mengindikasikan adanya pergeseran pola distribusi layanan keuangan dari kanal fisik menuju kanal digital dan nonfisik yang dinilai lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat. Di sisi lain, sejumlah indikator lainnya menunjukkan tren peningkatan. Jumlah mesin EDC meningkat sebesar 11,03 persen menjadi 2.422.351 unit. Selain itu, jumlah agen LKD juga mengalami kenaikan sebesar 2,11 persen menjadi 1.014.668 agen, dimana hal tersebut mencerminkan semakin luasnya akses layanan keuangan berbasis teknologi.

Jumlah mesin ATM tercatat meningkat secara terbatas sebesar 0,09 persen menjadi 98.342 unit. Sementara itu, jumlah agen Laku Pandai mengalami peningkatan signifikan sebesar 9,70 persen, dari 1.609.291 agen menjadi 1.765.432 agen. Peningkatan ini didorong oleh tingginya minat masyarakat untuk menjadi agen sebagai sumber pendapatan tambahan, serta meningkatnya kebutuhan terhadap layanan keuangan, baik konvensional maupun syariah. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong program *One Village One Agent* (OVOA) guna memperkuat inklusi keuangan, khususnya di wilayah perdesaan. Lebih lanjut, jumlah *merchant* QRIS menunjukkan pertumbuhan paling signifikan, yaitu meningkat sebesar 19,23 persen menjadi 42.747.097 *merchant*, dengan 95,74 persen di antaranya merupakan *merchant* kategori UMKM.

Secara keseluruhan, perkembangan indikator pada dimensi jangkauan akses menunjukkan adanya transformasi menuju digitalisasi serta perluasan kanal layanan non konvensional, sebagai bagian dari upaya meningkatkan inklusi dan pemerataan akses layanan keuangan di Indonesia.

2.2 Indikator Penggunaan Layanan

Indikator penggunaan layanan menggambarkan tingkat pemanfaatan aktual masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan formal. Cakupan indikator penggunaan keuangan meliputi antara lain jumlah rekening simpanan dan rekening kredit/pembiayaan pada lembaga keuangan formal, jumlah rekening uang elektronik terdaftar (*registered*) pada penerbit uang elektronik, persentase kredit atau pembiayaan kepada UMKM terhadap total kredit/pembiayaan di lembaga keuangan formal, jumlah rekening kredit/pembiayaan UMKM, jumlah rekening pelajar dan santri, serta jumlah nasabah program KUR (termasuk KUR Syariah, dan UMi (termasuk UMi Syariah).

Tabel 2.2 Indikator Penggunaan

Indikator Penggunaan			
Indikator	Des 2024	Des 2025	Perubahan (YoY)
Jumlah Rekening Simpanan	609.200.000	665.435.246	9,23 persen
Jumlah Rekening Kredit	93.991.489	105.493.000	12,24 persen
Jumlah Rekening Kredit UMKM	23.324.320	22.270.000	-4,52 persen

Indikator Penggunaan			
Indikator	Des 2024	Des 2025	Perubahan (YoY)
Persentase Kredit UMKM terhadap Total Kredit	24,82 persen	20,70 persen*	-4,12 pp
Jumlah Rekening Pelajar dan Santri	58.120.000	58.580.000	0,79 persen
Jumlah Uang Elektronik <i>Registered</i>	196.354.765	243.843.305	24,18 persen
Jumlah Nasabah KUR	4.948.993	4.500.000	-9,07 persen
Jumlah Nasabah UMi	2.220.272	2.172.282	-2,16 persen

Sumber: Kementerian/Lembaga anggota DNKI

*Keterangan: * data per November 2025

Dimensi penggunaan produk dan layanan keuangan sebagai bagian dari IKU Keuangan Inklusif menunjukkan perkembangan yang beragam sepanjang tahun 2025. Jumlah rekening simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat meningkat sebesar 9,23 persen, mencapai 665,43 juta rekening. Selain itu, jumlah rekening kredit juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar 12,24 persen menjadi 105,49 juta rekening. Namun demikian, jumlah rekening kredit pada segmen UMKM mengalami penurunan sebesar 4,52 persen menjadi 22,27 juta rekening. Sejalan dengan hal tersebut, proporsi kredit UMKM terhadap total kredit juga menurun sebesar 4,12 poin persentase menjadi 20,70 persen. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga keberlanjutan dukungan pembiayaan bagi sektor UMKM sebagai salah satu pilar utama inklusi keuangan.

Lebih lanjut, jumlah rekening pelajar dan santri menunjukkan peningkatan sebesar 0,79 persen menjadi 58,58 juta rekening dibandingkan Desember 2024, yang mencerminkan semakin luasnya partisipasi generasi muda dalam partisipasi produk keuangan formal. Di sisi lain, pertumbuhan tertinggi tercatat pada penggunaan uang elektronik *registered* yang meningkat sebesar 24,18 persen menjadi 243,84 juta, sejalan dengan percepatan digitalisasi transaksi keuangan di masyarakat. Adapun jumlah nasabah KUR dan UMi masing-masing mengalami penurunan sebesar 9,07 persen dan 2,16 persen, dengan total nasabah mencapai 4,50 juta dan 2,17 juta.

Secara umum, penggunaan produk dan layanan keuangan pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan pada aspek simpanan, kredit, serta digitalisasi, meskipun terdapat penurunan pada beberapa indikator yang berkaitan dengan pembiayaan UMKM. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan kebijakan dan strategi untuk menjaga keberlanjutan akses pembiayaan, khususnya bagi sektor UMKM sebagai pilar inklusi keuangan.

2.3 Indikator Kualitas

Indikator kualitas mencerminkan tingkat kemampuan produk dan layanan keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara memadai. Pengukuran indikator kualitas tersebut

antara lain dilakukan melalui persentase penyelesaian pengaduan konsumen sektor jasa keuangan, serta tingkat suku bunga riil sebagai cerminan keterjangkauan dan efisiensi layanan keuangan.

Tabel 2.3 Indikator Penggunaan

Indikator Penggunaan			
Indikator	Des 2024	Des 2025	Perubahan (YoY)
Persentase Penyelesaian Pengaduan	96,20 persen	97,21 persen	1,01 pp
Suku Bunga Riil	4,43 persen	1,83 persen	-2,60 pp

Sumber: Kementerian/Lembaga anggota DNKI

Dimensi kualitas dalam peningkatan inklusi keuangan menunjukkan adanya perbaikan pada sejumlah aspek sepanjang tahun 2025. Persentase penyelesaian pengaduan konsumen sektor jasa keuangan tercatat meningkat dari 96,20 persen menjadi 97,21 persen (naik sebesar 1,01 poin persentase) dan telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 90 persen. Capaian ini mengindikasikan meningkatnya responsivitas penyedia jasa keuangan dalam menangani keluhan nasabah, dan hal tersebut berkontribusi terhadap penguatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan formal.

Meskipun demikian, tidak seluruh pengaduan yang diajukan masyarakat dapat diselesaikan. Hal ini antara lain disebabkan oleh karakteristik permasalahan yang berkaitan dengan tindak kecurangan eksternal, seperti penipuan, pembobolan rekening, *skimming*, kejahatan siber (*cyber crime*), restrukturisasi atau relaksasi kredit/pembiayaan/pinjaman, perilaku petugas penagihan (*debt collector*), serta kendala dalam proses klaim asuransi. Permasalahan yang mengandung unsur tindak pidana tersebut memerlukan sinergi dan koordinasi yang kuat antara aparat penegak hukum dengan kementerian, lembaga, dan otoritas terkait.

Dalam rangka mendukung upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal secara komprehensif serta memperkuat perlindungan konsumen di sektor keuangan, telah dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI). Keberadaan satuan tugas ini ditegaskan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK, yang mengamanatkan pembentukan satuan tugas oleh OJK bersama kementerian, lembaga, dan otoritas terkait untuk menangani kegiatan usaha sektor keuangan yang tidak berizin. Selanjutnya, DNKI melalui Kelompok Kerja Perlindungan Konsumen terus memperkuat sinergi dengan Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) dalam rangka meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen.

Di sisi lain, suku bunga riil menunjukkan tren penurunan dari 4,43 persen menjadi 1,83 persen atau turun sebesar 2,60 poin persentase. Perkembangan ini mencerminkan kondisi suku bunga riil pada tahun 2025 yang relatif lebih longgar dibandingkan dengan kondisi yang cenderung restriktif pada tahun 2024. Penurunan tersebut didukung oleh kebijakan penyesuaian suku bunga acuan yang dilakukan secara bertahap. Hingga akhir tahun 2025, suku bunga kebijakan Bank Indonesia (BI-Rate) tercatat berada pada level 4,75 persen, dengan

tingkat inflasi sebesar 2,92 persen. Kondisi ini diharapkan dapat mendorong terciptanya tingkat suku bunga riil yang lebih moderat, sehingga mendukung peningkatan pembiayaan bagi kegiatan perekonomian.

Dengan demikian, upaya menjaga kualitas inklusi keuangan ke depan perlu diarahkan pada pencapaian keseimbangan antara penguatan perlindungan konsumen, literasi keuangan, peningkatan aksesibilitas, serta keterjangkauan biaya layanan keuangan, guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas inklusi keuangan di Indonesia.

2.4 Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)

2.4.1. Latar Belakang Penyusunan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045 mengamanatkan agar layanan keuangan dapat dirasakan secara merata dan inklusif di seluruh wilayah dan kelompok masyarakat. Namun dalam praktiknya, akses keuangan di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat. Di samping itu, ketiadaan indikator inklusi keuangan yang spesifik hingga level Kabupaten/Kota membatasi perumusan dan intervensi kebijakan/program/kegiatan, serta menghambat proses pemantauan dan evaluasi TPAKD. Dampaknya, penguatan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif dan memanfaatkan berbagai peluang ekonomi yang tersedia menjadi tidak optimal.

Gambar 2.1 Peluncuran Indeks Akses Keuangan Daerah



Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemerintah bersama OJK mengembangkan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) sebagai instrumen pengukuran yang mampu menggambarkan kondisi akses keuangan secara lebih komprehensif hingga level Kabupaten/Kota. IKAD merupakan indeks komposit yang dibangun dari 14 sub indikator melalui data *supply side* dan *demand side* untuk menilai kinerja akses, penggunaan layanan, serta kedalaman keuangan, yang telah diluncurkan pada acara *Indonesia International Financial Inclusion Summit* (IFIS), 6 Mei 2025. IKAD tidak hanya merefleksikan keberadaan layanan keuangan, tetapi juga mencerminkan sejauh mana masyarakat dan pelaku usaha di daerah dapat menjangkau, memanfaatkan, dan memperoleh manfaat dari layanan tersebut.

Tabel 2.4 Indikator Penyusun Indeks Keuangan Akses Daerah (IKAD)

Dimensi	Indikator
Penggunaan (70%)	Rasio Jumlah Rekening Pihak Ketiga/ Jumlah Penduduk Dewasa
	Rasio Jumlah Pemilik Tabungan/ Jumlah Penduduk Dewasa
	Rasio Jumlah Rekening <i>E-wallet</i> / Jumlah Penduduk Dewasa
	Rasio Jumlah Rekening Pinjaman ke UMKM/ Total Rekening Pinjaman
	Rasio Jumlah Rekening Pinjaman Individu/ Jumlah Penduduk Dewasa
	Rasio Jumlah Rekening Pinjaman UMKM Perempuan/ Rekening Pinjaman UMKM Total
	Rasio Jumlah Polis Asuransi/ Jumlah Penduduk Dewasa
	Rasio jumlah pemilik BPJS PBI atau Jamkesda penduduk berpenghasilan rendah/ jumlah penduduk berpenghasilan rendah
	Rasio jumlah pemilik BPJS mandiri/asuransi swasta/ jamkes perusahaan penduduk non berpenghasilan rendah/ jumlah penduduk non berpenghasilan rendah
Ketersediaan (20%)	Ketersediaan ATM per 100.000 penduduk dewasa
	Ketersediaan agen laku pandai per 100.000 penduduk dewasa
	Ketersediaan merchant QRIS per 100.000 penduduk dewasa
Kedalaman (10%)	Rasio DPK terhadap PDRB
	Rasio pinjaman UMKM terhadap total pinjaman

2.4.2. Progres Implementasi Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)

Sejak diluncurkan, implementasi IKAD menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mendorong pengarusutamaan inklusi keuangan ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Progres ini mencerminkan pergeseran pendekatan dari sekedar pengukuran menuju integrasi IKAD dalam tata kelola pusat dan daerah.

a. Integrasi IKAD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Sebagai Indikator Utama Pembangunan dalam Undang Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045, inklusi keuangan secara imperatif diamanatkan dalam UU untuk diselaraskan ke daerah, dengan IKAD sebagai proksi indikator inklusi keuangan level Kab/Kota. Hingga saat ini, telah terdapat 333 Kabupaten/Kota yang memuat IKAD sebagai Indikator Kinerja Daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

- b. Penguatan Sistem Pemantauan melalui Penambahan *Tagging* Tematik Inklusi Keuangan
- Untuk memperkuat pemantauan dan evaluasi, telah dilakukan penambahan *tagging* tematik inklusi keuangan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Inisiatif ini memungkinkan identifikasi program dan kegiatan terkait inklusi keuangan secara lebih sistematis, termasuk alokasi anggaran yang dianggarkan oleh masing-masing perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan adanya *tagging* tersebut, pemantauan intervensi inklusi keuangan dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan berbasis data.

Gambar 2.2 *Tagging* Tematik Inklusi Keuangan dalam SIPD

Kode Indikator Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Definisi Operasional	Peraturan	Kewenangan
00158	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	Indeks yang menggambarkan kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten/Kota, yang dihitung dari data supply dan demand. Indeks terdiri dari 14 indikator yang terbagi dalam 3 dimensi yaitu Penggunaan, Ketersediaan dan Kedalaman. Nilai indeks berkisar antara 0-10. Menggambarkan tingkat akses keuangan di kabupaten dan kota, dimana semakin tinggi nilai indeks menggambarkan tingkat akses keuangan yang semakin baik. Nilai indeks juga menunjukkan adanya tantangan dalam inklusi keuangan, seperti keterbatasan infrastruktur keuangan, rendahnya literasi keuangan, kepemilikan produk/layanan keuangan yang belum terjangkau, atau kedalaman/kuualitas penggunaan produk/layanan keuangan. Adapun baseline dan target lengkap dari Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) di Kabupaten/Kota dapat diakses melalui tautan: https://link.boppenas.go.id/indikatorIKAD_KabKota		KABKOTA

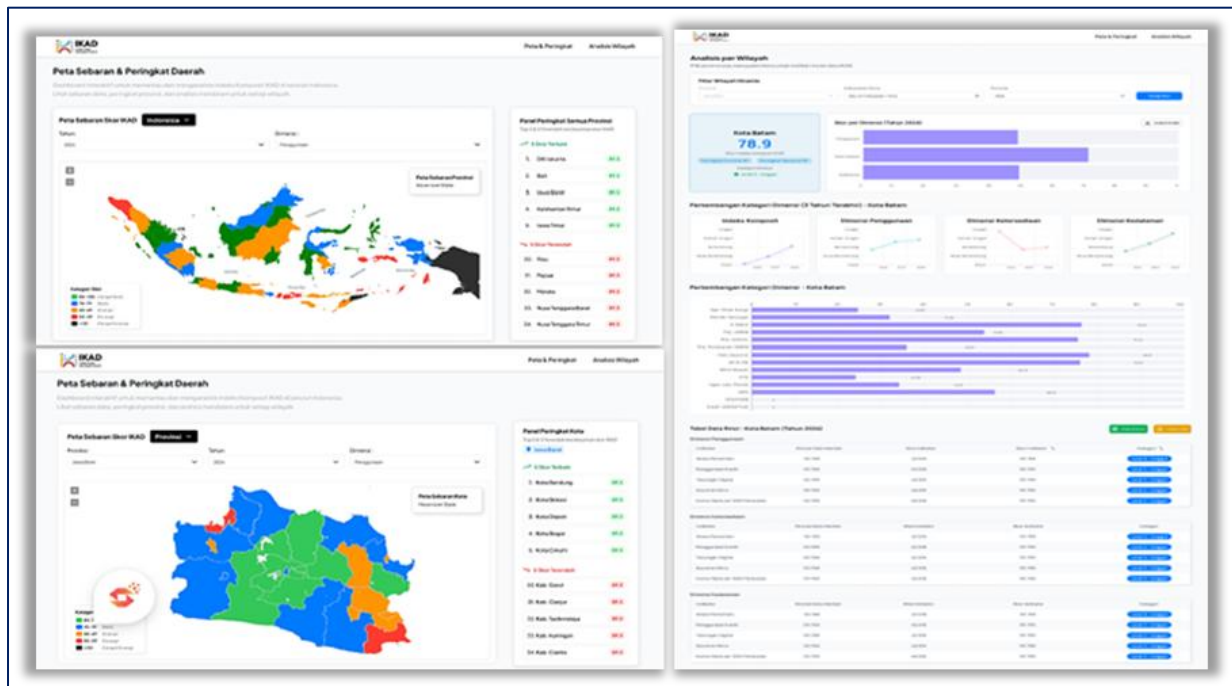
- c. Pemetaan Nomenklatur Sub Kegiatan Lintas Urusan terkait Inklusi Keuangan

Selanjutnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bersama dengan Kementerian Dalam Negeri juga telah melakukan penyusunan pemetaan sub-kegiatan lintas urusan terkait inklusi keuangan berdasarkan nomenklatur sub-kegiatan yang ditetapkan dalam Permendagri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Pemetaan tersebut menghasilkan panduan bagi pemerintah daerah dalam mengidentifikasi perangkat daerah yang berperan dalam peningkatan akses keuangan, serta jenis program dan kegiatan yang dapat diintegrasikan dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Dalam panduan tersebut, terdapat 110 pilihan sub kegiatan di level Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dapat dijadikan pedoman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menentukan dukungan kegiatan yang mendukung implementasi pencapaian target inklusi keuangan.

- d. Pembangunan Dashboard Indeks Akses Keuangan Daerah

Sebagai bagian dari penguatan pemantauan implementasi, saat ini sedang dikembangkan dashboard IKAD yang akan menampilkan data realisasi capaian secara terintegrasi. *Dashboard* ini dirancang untuk menyediakan informasi mengenai perkembangan akses keuangan di tingkat daerah secara lebih mudah dan informatif yang dapat dipantau secara berkala. Kehadiran dashboard ini diharapkan dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih responsif dan berbasis data, baik di tingkat pusat maupun daerah, sekaligus memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi terhadap upaya perluasan akses keuangan. Adapun capaian kegiatan implementasi IKAD di daerah, akan ditampilkan melalui *dashboard* IKAD yang sedang disusun sebagai berikut:

Gambar 2.3 Tampilan Dashboard Indeks Akses Keuangan Daerah



03

**CAPAIAN KELOMPOK
KERJA**

Halaman ini sengaja dikosongkan

Dalam rangka pelaksanaan SNKI, DNKI memiliki tugas dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi, mengarahkan langkah-langkah dan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan dan hambatan pelaksanaan SNKI, serta melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan SNKI. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, DNKI dibantu Pokja dan Sekretariat. Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif Nomor 122 Tahun 2021 tentang Tugas dan Susunan Keanggotaan Pokja dan Sekretariat DNKI, yang terbagi dalam 7 (tujuh) kelompok kerja. Susunan keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat DNKI dengan nomenklatur satuan kerja yang telah disesuaikan sebagai berikut.

Tabel 3.1 Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat DNKI

Pokja 1 Edukasi Keuangan	Ketua: Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi, OJK Wakil Ketua: Kepala Departemen Komunikasi, Bank Indonesia Anggota: 13 satker K/L
Pokja 2 Hak Properti Masyarakat	Ketua: Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian ATR/BPN Wakil Ketua: (d/h Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, Kemenko Perekonomian) Anggota: 20 satker K/L
Pokja 3 Fasilitasi Intermediasi dan Saluran Distribusi	Ketua: Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia Wakil Ketua: Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi, OJK Anggota: 15 satker K/L
Pokja 4 Pelayanan Keuangan pada Sektor Pemerintah	Ketua: Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia Wakil Ketua: Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kemenko PM Anggota: 18 satker K/L
Pokja 5 Perlindungan Konsumen	Ketua: Kepala Departemen Perlindungan Konsumen, OJK Wakil Ketua: Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Perlindungan Konsumen, Bank Indonesia Anggota: 5 satker K/L
Pokja 6 Kebijakan dan Regulasi	Ketua: Direktur Jenderal Stabilitas Pengembangan Sektor Keuangan, Kemenkeu Wakil Ketua: Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kemenkum Anggota: 7 satker K/L

Pokja 7 Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan	Ketua: Direktur Jenderal Infrastruktur Digital, Kemkomdigi Wakil Ketua: (d/h Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kemenko Perekonomian) Anggota: 11 satker K/L
Sekretariat	Ketua: Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital, Kemenko Perekonomian Wakil Ketua: Sekretaris Kemenko Perekonomian Anggota: 10 satker K/L

Dalam konsep RPJMN 2025-2029 target keuangan inklusif pada tahun 2029 adalah sebesar 93 persen, dan menurut SNLIK 2024 metode keberlanjutan tingkat inklusi keuangan tahun 2025 telah mencapai 80,51 persen. Indonesia telah mencapai perkembangan keuangan inklusif yang signifikan selama 6 (enam) tahun terakhir dan mengalami kenaikan yang konsisten dari tahun ke tahun. Kolaborasi yang solid dari kementerian/lembaga anggota kelompok kerja dan sekretariat DNKI, pemerintah daerah, industri sektor keuangan, asosiasi, organisasi masyarakat, dan lembaga internasional memberikan kontribusi terhadap pencapaian tersebut. Setiap kelompok kerja dan sekretariat DNKI telah melaksanakan program kerja/kegiatan keuangan inklusif pada tahun 2025 sebagaimana penjelasan pada masing-masing pokja di bawah ini.

3.1 Kelompok Kerja Edukasi Keuangan

Edukasi keuangan memiliki peran strategis dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat. Melalui peningkatan literasi keuangan, masyarakat diharapkan mampu mengambil keputusan keuangan secara rasional dan bertanggung jawab, termasuk dalam pengelolaan investasi, perencanaan keuangan jangka panjang, pengelolaan utang, serta pemanfaatan produk keuangan formal secara optimal. Pemahaman yang memadai terhadap produk dan layanan keuangan juga berkontribusi pada penguatan stabilitas sistem keuangan nasional melalui peningkatan kualitas partisipasi masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Pokja Edukasi Keuangan DNKI pada Tahun 2025 terus memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga, regulator sektor keuangan, Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK), mitra pembangunan nasional dan internasional, asosiasi industri, organisasi masyarakat berbasis keagamaan, serta media massa dan platform digital. Pelaksanaan program edukasi mencakup sektor keuangan konvensional maupun syariah, serta menyasar berbagai kelompok prioritas inklusi keuangan, termasuk pelajar dan mahasiswa, pelaku UMKM, perempuan, masyarakat desa, pekerja migran, dan kelompok rentan lainnya. Pendekatan pelaksanaan dilakukan secara hibrida melalui kanal luring dan daring guna memperluas jangkauan dan efektivitas intervensi kebijakan.

3.1.1 Kegiatan Edukasi dan Literasi Keuangan

Kementerian/lembaga yang menjadi bagian dari Pokja Edukasi Keuangan telah melaksanakan kegiatan edukasi dengan tujuan meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Kegiatan edukasi keuangan yang dilakukan selama Tahun 2025 melalui OJK mencakup 6.548 kegiatan edukasi keuangan yang melibatkan 9.936.199 peserta dari berbagai segmen sesuai dengan kelompok sasaran prioritas keuangan inklusif. Selain itu, melalui program edukasi

berbasis wilayah dan segmen (GENCARKAN), hingga akhir Desember tahun 2025 telah menjangkau 504 dari 514 kabupaten/kota (98,05%) di Indonesia.

Program ini diperkuat dengan pembentukan 15.631 Duta Literasi Keuangan yang berasal dari unsur mahasiswa, komunitas, dan PUJK sebagai agen literasi di masyarakat. Kegiatan edukasi dan literasi keuangan tersebut dilaksanakan melalui berbagai metode, antara lain sosialisasi, workshop, *training of community*, *training of trainers*, konsultasi, pendampingan, dan *training of facilitator*.

Gambar 3.1 Kegiatan GENCARKAN dalam rangka Hari Ibu



Selanjutnya, kegiatan edukasi yang difokuskan pada penguatan literasi sistem pembayaran, termasuk penggunaan instrumen pembayaran digital serta Elektronifikasi Transaksi dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan konsumen dan keamanan transaksi oleh Bank Indonesia. Selama Tahun 2025, Bank Indonesia telah melaksanakan 467 kegiatan edukasi publik dengan jumlah peserta sebanyak 1.597.958 orang, baik secara luring maupun daring kepada masyarakat umum, mahasiswa, pelajar, pelaku UMKM, dan komunitas lainnya. Selain itu, dilakukan 173 kegiatan kunjungan siswa dan mahasiswa yang melibatkan 32.221 peserta, 63 kegiatan edukasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dengan 7.088 peserta, serta 10 kegiatan Generasi Baru Indonesia (GenBI) dengan 2.200 peserta. Kegiatan edukasi tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan pemahaman masyarakat terhadap sistem pembayaran digital, kebijakan moneter, serta stabilitas sistem keuangan nasional dalam mendukung transformasi ekonomi berbasis digital.

Selain itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi juga telah melaksanakan kegiatan edukasi dan literasi keuangan melalui integrasi materi literasi finansial digital dalam kegiatan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM). Pada Tahun 2025, pelaksanaan LKMM yang memuat topik literasi finansial digital telah menjangkau 120 mahasiswa di wilayah Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Banten, serta 40 mahasiswa di Jawa Timur. Integrasi materi literasi keuangan dalam kegiatan pengembangan kapasitas mahasiswa tersebut bertujuan untuk memperkuat pemahaman mahasiswa terkait pengelolaan keuangan pribadi, literasi keuangan digital, serta peningkatan kesejahteraan mahasiswa melalui pengambilan keputusan finansial yang bijak dan produktif.

Pada Tahun 2025, telah dilakukan penyusunan dan penyampaian draft materi pengelolaan keuangan keluarga yang disusun bersama pemangku kepentingan terkait, sebagai landasan pelaksanaan edukasi kepada masyarakat oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Kegiatan edukasi pengelolaan keuangan keluarga ditujukan untuk menjangkau target 300 peserta offline dan 5.000 peserta online. Inisiatif ini merupakan langkah strategis dalam mendorong peningkatan literasi keuangan berbasis keluarga, mengingat keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur sosial yang memiliki peran penting dalam membentuk perilaku pengelolaan keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam rangka memperkuat literasi keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Direktorat Literasi Keuangan dan Pemanfaatan Remitansi telah melaksanakan kegiatan edukasi keuangan di beberapa wilayah, antara lain di Malang dengan 350 peserta CPMI, di Jakarta dengan 1.000 peserta yang terdiri atas CPMI, instruktur, dan pegawai KP2MI, di Kalimantan Selatan dengan 100 peserta CPMI, serta di Taiwan dengan 152 peserta CPMI. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta terkait pengelolaan keuangan pribadi, perencanaan keuangan sebelum dan sesudah bekerja di luar negeri, serta optimalisasi pemanfaatan remitansi secara produktif. Selain itu, juga menyelenggarakan Workshop Pemanfaatan Remitansi di antara lain di Semarang (100 peserta), Padang (50 peserta), Kalimantan Selatan (50 peserta), Jawa Barat (200 peserta), dan Palu (100 peserta). Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kapasitas peserta dalam mengelola remitansi untuk kegiatan produktif, investasi, dan penguatan usaha keluarga di daerah asal.

Sebagai bagian dari penguatan ekonomi desa dan tata kelola keuangan, pada tahun 2025 telah diselenggarakan Pelatihan Desa Wisata dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang yang difokuskan pada peningkatan kapasitas pengelolaan usaha berbasis potensi lokal, pelatihan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebanyak tiga angkatan dengan masing-masing 30 peserta sehingga total menjangkau 90 peserta, pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang, yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pendampingan dan penguatan kelembagaan desa, termasuk dalam aspek pengelolaan keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan bagian dari strategi penguatan literasi dan inklusi keuangan di wilayah pedesaan yang secara demografis menghadapi tantangan akses terhadap layanan keuangan formal, sekaligus mendukung transformasi ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam rangka memperkuat literasi dan inklusi keuangan melalui perencanaan pembangunan, Pokja 1 Edukasi Keuangan melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas telah dilakukan penyelarasan indikator inklusi keuangan dalam dokumen RPJMN dan RPJMD 2025–2029 pada 38 provinsi sebagai bagian dari penguatan kebijakan inklusi keuangan nasional. Selain itu, indikator IKAD juga diimplementasikan dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (kabupaten/kota) guna mendorong perencanaan berbasis data di tingkat daerah. Hingga akhir tahun 2025, implementasi IKAD telah menjangkau 123 kabupaten/kota, sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memastikan literasi dan inklusi keuangan terintegrasi secara sistematis dalam perencanaan pembangunan.

3.1.2 Infrastruktur Digital Literasi Keuangan

Gambar 3.2 Learning Management System dan Beranda Sikap



Akselerasi peningkatan literasi keuangan perlu didukung oleh penguatan infrastruktur digital literasi keuangan di Indonesia. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan bersama berbagai pemangku kepentingan telah mengembangkan platform digital Learning Management System (LMS) Edukasi Keuangan dan SikapiUangmu sebagai sarana pembelajaran dan penyebaran informasi literasi keuangan kepada masyarakat. Platform tersebut berfungsi sebagai sistem pembelajaran terpadu yang menyediakan berbagai materi edukasi dan pelatihan literasi keuangan secara digital.

Sepanjang Tahun 2025, pemanfaatan platform ini menunjukkan perkembangan yang positif. Hingga 31 Desember 2025, jumlah pengguna LMS Edukasi Keuangan mencapai 123.011 pengguna, dengan 43.273 pengguna telah mengakses minimal satu modul pembelajaran, 100.502 sertifikat kelulusan modul telah diterbitkan, serta 133.296 akses modul pembelajaran tercatat. Sementara itu, melalui SikapiUangmu telah dipublikasikan 340 konten edukasi keuangan dengan capaian 3.471.622 pengunjung/viewers. Kedua platform ini menyediakan berbagai materi literasi keuangan seperti perencanaan keuangan, perbankan, pasar modal, asuransi, fintech, keuangan syariah, serta literasi keuangan digital guna memperluas jangkauan edukasi dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan finansial secara bijak.

Selain itu, Direktorat Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia juga melaksanakan program digitalisasi di lingkungan pesantren melalui pengembangan Kartu Digital Santri serta implementasi digitalisasi pembayaran melalui QRIS yang dilakukan secara bertahap pada sekitar 42.000 pesantren di seluruh Indonesia. Program ini dilaksanakan melalui koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan serta kegiatan sosialisasi dan peningkatan kapasitas melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kemandirian Pesantren. Inisiatif tersebut bertujuan untuk memperkuat ekosistem keuangan digital di lingkungan pesantren sekaligus mendukung peningkatan literasi dan pemanfaatan layanan keuangan digital di kalangan santri dan pengelola pesantren.

3.1.3 Bulan Inklusi Keuangan 2025

Gambar 3.3 Pelaksanaan FinExpo dalam rangka Puncak Bulan Inklusi Keuangan 2025



Bulan Inklusi Keuangan (BIK) merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah bersama dengan seluruh pelaku industri jasa keuangan dalam memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat sehingga dapat mendorong kesejahteraan finansial serta memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Pelaksanaan BIK dilakukan secara nasional melalui berbagai kegiatan, seperti edukasi keuangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta pemberian kemudahan akses terhadap berbagai produk dan layanan keuangan. Pada periode pelaksanaan BIK 2025 telah diselenggarakan sebanyak 5.182 kegiatan dengan total peserta mencapai 10,87 juta masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kepemilikan dan penggunaan produk serta layanan jasa keuangan oleh 12,36 juta masyarakat. Berbagai kegiatan yang dilakukan selama Bulan Inklusi Keuangan antara lain edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat, kampanye peningkatan pemahaman produk jasa keuangan, pembukaan akses terhadap layanan keuangan, serta berbagai program promosi produk dan layanan keuangan dari industri jasa keuangan.

Tabel 3.2 Capaian Kepemilikan/Penggunaan Produk dan Layanan Jasa Keuangan pada BIK 2025

Industri	Capaian
Perbankan	3.557.278 rekening
Pasar Modal	643.000 rekening efek
Perasuransian	950.716 polis
Pembiayaan	1.474.749 debitur
Pergadaian	5.011.886 rekening
Fintech	719.628 akun

3.1.4 Kegiatan Literasi Keuangan Syariah

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah, OJK bersama para pemangku kepentingan melaksanakan berbagai kegiatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah serta meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Syariah Financial Fair (SYAFIF)

Syariah Financial Fair (SYAFIF) 2025 merupakan kegiatan kampanye literasi dan inklusi keuangan syariah yang diselenggarakan oleh OJK dan telah dilaksanakan di beberapa daerah, yaitu Tangerang, Palembang, Bandung, dan Mataram. Kegiatan SYAFIF Goes to Tangerang mencatat pembukaan 407 akun baru dengan jumlah pengunjung 1.506 orang serta melibatkan 26 PUJK Syariah. Selanjutnya, SYAFIF Goes to Palembang menghasilkan 411 akun baru dengan 2.008 pengunjung dan 19 PUJK Syariah yang berpartisipasi. SYAFIF Goes to Bandung mencatat pembukaan 784 akun baru dengan jumlah pengunjung 4.500 orang dan partisipasi 24 PUJK Syariah. Sementara itu, SYAFIF Goes to Mataram menghasilkan pembukaan 7.411 akun baru dengan 2.552 pengunjung dan melibatkan 17 PUJK Syariah. Kegiatan ini melibatkan berbagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan Syariah (PUJKS) dalam memperkenalkan produk dan layanan keuangan syariah kepada masyarakat.

2. Gebyar Ramadhan Keuangan Syariah (GERAK Syariah)

Gebyar Ramadhan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) merupakan kampanye nasional literasi dan inklusi keuangan syariah yang diselenggarakan selama bulan Ramadhan dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah sekaligus memperluas akses terhadap produk dan layanan keuangan syariah. Pada pelaksanaan tahun 2025, kegiatan ini mengorkestrasi 1.435 kegiatan literasi dan 556 kegiatan inklusi keuangan syariah yang berhasil menjangkau 6.350.276 masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menghasilkan capaian kinerja keuangan syariah berupa penghimpunan dana sebesar Rp1,9 triliun dan penyaluran dana sebesar Rp4,6 triliun.

3. Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSIS)

Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSIS) merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat. Kegiatan ini diselenggarakan dengan menghadirkan berbagai pelaku industri jasa keuangan syariah serta pelaku usaha yang tergabung dalam ekosistem halal. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai produk dan layanan keuangan syariah serta mengikuti berbagai sesi edukasi terkait keuangan syariah.

Pada pelaksanaannya, kegiatan EKSIS melibatkan 36 Pelaku Usaha Jasa Keuangan Syariah (PUJKS) dan 7 UMKM halal yang berpartisipasi dalam kegiatan expo. Selain itu, kegiatan ini juga menyelenggarakan 43 sesi edukasi keuangan syariah yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan berbasis

prinsip syariah. Kegiatan ini juga mencatat nominal transaksi sebesar Rp16,5 miliar dengan jumlah pengunjung mencapai 2.549 orang, yang menunjukkan adanya antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan syariah.

3.2 Kelompok Kerja Hak Properti Masyarakat

Kepemilikan properti berupa tanah merupakan salah satu alat pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dapat menjadi sarana akses kepada layanan lembaga keuangan formal khususnya pembiayaan. Selain itu, Pokja II juga telah melakukan berbagai upaya terkait pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro dan ultra mikro maupun pelaku usaha kecil.

3.2.1 Sertifikasi Hak Atas Tanah

Gambar 3.4 Penyerahan 212 Sertifikat Hak Milik dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) BPN kepada PP Muhammadiyah



a. Persertifikatan Bidang Tanah

Pada tahun 2025, Kementerian ATR/BPN menargetkan sertifikasi 4.765.420 bidang tanah, dan tercapai melampaui target sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian Sertifikasi Bidang Tanah Tahun 2025

Triwulan	Capaian (bidang tanah)
triwulan I – 2025	458.979
triwulan II – 2025	1.018.700
triwulan III – 2025	630.201
triwulan IV – 2025	2.657.540
Total 2025	4.765.420
Target 2025	1.273.668
persen capaian terhadap target	374%

Triwulan	Capaian (bidang tanah)
Total akumulasi pensertifikatan 2025	125.883.773
Target akumulasi pensertifikatan 2025	124.173.000
persen capaian akumulasi terhadap target akumulasi	100,13%

Sumber: Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN

Selain itu, pada tahun 2025, bidang tanah terdaftar secara nasional telah mencapai 99,91 persen, jauh melebihi target 2025 sebesar 98,55 persen. Capaian ini menunjukkan progres ketercatatan lahan secara formal dalam sistem pertanahan nasional, yang menjadi prasyarat inklusi keuangan berbasis aset.

Tabel 3.4 Persentase Cakupan Bidang Tanah Terdaftar Nasional

triwulan	(persen Cakupan)
triwulan I - 2025	96,49
triwulan II - 2025	97,30
triwulan III - 2025	97,80
triwulan IV - 2025	99,91
Target 2025	98,55
persen tercapai	100

Sumber: Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN

b. Pemberdayaan Tanah Masyarakat

Kampung Reforma Agraria merupakan salah satu inisiatif strategis dalam upaya pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah pedesaan. Program ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria dengan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan lahan, sekaligus mendorong pemanfaatan tanah sebagai modal produktif yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat didorong untuk membentuk kelembagaan lokal yang kuat, mengembangkan usaha berbasis potensi wilayah, serta memperluas akses terhadap pembiayaan dan layanan keuangan formal. Kampung Reforma Agraria tidak hanya berfokus pada redistribusi tanah, tetapi juga membangun ekosistem sosial-ekonomi yang berkelanjutan di tingkat desa, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi kemiskinan, dan memperkecil kesenjangan sosial di wilayah pedesaan. Pada tahun 2024 telah dilakukan pemetaan sebanyak 130.800 Kepala Keluarga (KK), selanjutnya dilakukan pendampingan pada tahun 2025 dengan realisasi 28.100 KK, hal tersebut disebabkan oleh efisiensi anggaran dari Kementerian Keuangan. Pada tahun 2025 telah dilakukan pemetaan sebanyak 9.422 KK yang akan dilakukan pendampingan di tahun yang akan datang.

Adapun contoh pendampingan yang dilakukan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Lokasi Prioritas Reforma Agraria: Desa Soso, Blitar, Jawa Timur

Pelaksanaan penataan akses di Desa Soso merupakan salah satu embrio pemberdayaan masyarakat berbasis *closedloop* yang dapat dijadikan referensi untuk daerah lain. Desa Soso merupakan desa reforma agraria berbasis pertanian jagung. Pada November 2024 telah dilakukan penanaman bibit jagung terhadap 10,7 hektar lahan yang kemudian dipanen sejak Februari hingga Juni 2025 10,44 hektare dan pada 2 Juli 2025 ini 0,33 hektar dengan rata-rata hasil bibit jagung yang telah dipanen mencapai 4 ton per hektar dengan PT. Syngenta Seed Indonesia sebagai pendamping sekaligus *offtaker*.

Gambar 3.5 Kegiatan panen raya jagung sebagai bagian dari program penataan agraria untuk mendukung ketahanan pangan di Desa Soso, Blitar



Sumber: Kementerian ATR/BPN, 2025

b. Kampung Reforma Agraria: Desa Banjar, Pandeglang, Banten

Di Desa Banjar terdapat 200 KK yang menjadi target program reforma agraria dengan potensi berupa jasa, pertanian, peternakan, UMKM, perikanan dan pariwisata. Berbagai program pendampingan terkait reforma agraria telah dilakukan, antara lain:

- Pelatihan terkait anyaman daun pandan dengan dukungan dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang;
- Pemberian bibit/pupuk kepada kelompok tani dengan dukungan dari Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang;
- Bantuan permodalan dengan dukungan dari Bank BJB;
- Dukungan pembangunan masjid dan gapura oleh PT. Angkasa Pura

Gambar 3.6 Infografis dan dokumentasi penghargaan Kampung Reforma Agraria di Desa Bandung, Kabupaten Pandeglang



Sumber: Kementerian ATR/BPN

c. Penataan Akses Tanah Ulayat: Desa Asahduren, Bali

Desa Asahduren merupakan salah satu desa adat di Bali yang telah memiliki sertifikat hak tanah ulayat. Pemanfaatan tanah ulayat dilakukan dengan cara kerjasama antara Kementerian ATR/BPN dan PT. Nusantara Segar Abadi (NSA) memberikan akses ekonomi berupa pemberian bibit pisang cavendish, bantuan alat pertanian, dan pendampingan. Penanaman pisang cavendish dilakukan di tanah ulayat dengan luas 9.800 m² dan melibatkan 900 Kepala Keluarga.

Gambar 3.7 Kegiatan penanaman pisang cavendish sebagai bagian dari program penataan akses terhadap tanah ulayat di Indonesia



Sumber: Kementerian ATR/BPN, 2025

3.2.2 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi UMKM

UMKM memiliki banyak potensi aset tak berwujud, seperti merek, desain industri, dan karya cipta. Pada tahun 2025, Pokja II melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian (Dirjen IKMA), Kementerian Perindustrian, menargetkan 300 merk. Realisasi hingga Triwulan IV 2025 telah menunjukkan pencapaian yang memuaskan di tengah tantangan efisiensi anggaran, dimana fasilitasi pendaftaran merek telah mencapai 292 pendaftaran merek, dan 4 fasilitasi pendaftaran hak cipta serta fasilitasi 33 surat keterangan pendaftaran KI secara mandiri. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesadaran tentang hak kekayaan intelektual, antara lain:

- Pelaksanaan sosialisasi dan *Focus Group Discussion* (FGD) di Bekasi, Lebak, Jakarta, Makassar, Bogor yang dihadiri oleh berbagai instansi dan BUMN;
- Partisipasi klinik kekayaan intelektual pada Pameran Aromatika Indofest 2025, Halal Indonesia International Industry Expo 2025, Showcase Program Unggulan Industri, SiAL Interfood Expo.

3.2.3 Sertifikasi Halal

Sertifikat halal memainkan peranan penting dalam mendukung inklusi keuangan, khususnya bagi pelaku UMKM berbasis produk makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan. Dengan memiliki sertifikasi halal, pelaku usaha tidak hanya memperoleh legitimasi atas kehalalan produk mereka, tetapi juga meningkatkan kepercayaan

konsumen dan memperluas akses ke pasar yang lebih luas, termasuk jaringan ritel modern dan ekspor. Sertifikat halal juga menjadi salah satu prasyarat dalam mengakses pembiayaan syariah, baik dari lembaga keuangan syariah maupun program pemerintah, sehingga mendorong UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem keuangan formal yang sesuai prinsip syariah. Dalam konteks inklusi keuangan nasional, percepatan proses sertifikasi halal menjadi strategi penting untuk memberdayakan pelaku usaha berbasis nilai-nilai syariah dan memperkuat ekonomi umat. Hingga triwulan IV 2025 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai penyelenggara utama penjaminan produk halal dari pemerintah telah berhasil melakukan registrasi dan penerbitan sertifikat halal sebanyak 2.330.663 sertifikat.

Pada Januari 2026, telah dilaksanakan simbolis kolaborasi BPJPH Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sekretariat DNKI bekerja sama dengan Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Agung Jakarta dalam pendampingan kepada komunitas Sentra Bimbingan Usaha Kecil (SABUK) binaan Keuskupan Agung Jakarta. Dalam simbolis tersebut, Kepala BPJPH telah berkomitmen memfasilitasi 3.000 pelaku usaha mikro dan ultra mikro SABUK melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), yang telah dimulai pada awal Desember 2025 yang telah menerbitkan 40 sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro. Bapak Menko Perekonomian dalam kegiatan tersebut juga telah memberikan arahan untuk melanjutkan pendampingan tersebut yang rencananya akan ditindaklanjuti di 2026 - 2029.

Gambar 3.8 Simbolis penyerahan sertifikat halal kepada pelaku usaha mikro dalam program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)



3.2.4 Program Inklusi Keuangan untuk Kelompok Subsisten

Model bisnis inklusif berbasis keuangan bagi kelompok subsisten (petani kecil, perempuan kepala keluarga, pelaku usaha mikro informal) merupakan salah satu pendekatan keberpihakan Pokja II. Bank Indonesia melanjutkan replikasi program ke berbagai wilayah. Hingga akhir 2025, telah dilakukan replikasi terhadap 28 kelompok sasaran yang telah mengalami peningkatan tahapan, di mana 10 kelompok di antaranya mengalami peningkatan pada kapabilitas produksi, 9 kelompok pada kapabilitas pemasaran, 5 kelompok pada kapabilitas kelembagaan, 6 kelompok pada kapabilitas digitalisasi.

Gambar 3.9 Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025



Sumber: Bank Indonesia

Selain itu program peningkatan akses pembiayaan UMKM dari sisi *supply* dan *demand* telah terlaksana dalam bentuk:

- a. Rasio kredit UMKM terhadap perbankan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) yang terus termonitor mencapai 33,57 persen pada akhir triwulan IV-2025;
- b. Telah dilakukan pemberian BI Award pada Lembaga Keuangan Pendukung Pembiayaan Inklusif pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, sbb:
 - a) Buku 1 dan 2: Bank Jatim
 - b) Buku 3 dan 4: Bank Negara Indonesia (BNI)
- c. Peningkatan jumlah UMKM yang telah terhubung dengan lembaga keuangan melalui skema *business matching* yang pada akhir triwulan III-2025 telah berhasil menghubungkan 314 UMKM kepada 12 lembaga keuangan dengan nilai transaksi mencapai Rp 224 miliar. Pada triwulan IV-2025 Telah dilaksanakan monitoring BM dan evaluasi Pembiayaan serta penyusunan rencana BM Pembiayaan 2025 bersama K/L dan LK peserta BM.
- d. Telah dilaksanakan Training of Trainers (ToT) Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK) sebanyak 15 lokasi hingga triwulan IV-2025 dengan jumlah trainers sebanyak 815 trainers;
- e. Penyelenggaraan Pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI) di JICC yang dibuka oleh Ketua Umum Dekranas bersama Gubernur BI, Menteri Pariwisata, Menteri Ekonomi Kreatif dan dihadiri oleh 1.100 UMKM peserta secara daring dan 362 UMKM binaan Bank Indonesia
- f. Telah dilaksanakan FESYAR (Festival Ekonomi Syariah) KTI pada 29 Agustus s.d. 1 September dan FESyar Jawa pada 12 s.d. 14 September 2025.

Bank Indonesia melalui Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) juga terus mendorong pemberdayaan ekonomi syariah melalui aksesibilitas pembiayaan yang efektif yang pada akhir triwulan IV-2025 telah berhasil memberdayakan 911 pesantren baru sembari tetap melanjutkan pemberdayaan terhadap 717 pesantren *existing*. Selain itu, DEKS juga melakukan pemberdayaan terhadap usaha non-pesantren dan non-korporasi terhadap 1.077 pelaku usaha hingga akhir triwulan IV-2025.

3.3 Pokja Fasilitasi Intermediasi dan Saluran Distribusi

Fasilitasi intermediasi dan penguatan saluran distribusi keuangan merupakan program kerja yang dilaksanakan berdasarkan tiga hal utama yaitu terkait informasi, biaya transaksi dan regulasi. Sistem keuangan berfungsi sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Melalui sistem ini, dana masyarakat dihimpun dan disalurkan kembali pada sektor produktif dalam bentuk kredit, investasi, maupun pembiayaan. Agar sistem keuangan berjalan stabil dan efisien, kolaborasi dilakukan untuk memastikan agar kebijakan sistem keuangan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan, menjaga kesehatan lembaga keuangan serta produk keuangan yang digunakan masyarakat, dan meningkatkan akses layanan keuangan yang mudah, aman, terpercaya, serta biaya yang terjangkau.

Kelompok Kerja Fasilitasi Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan berfokus pada upaya menciptakan regulasi yang kondusif, mendorong inovasi produk dan layanan keuangan yang mudah diakses serta aman melalui dukungan teknologi informasi keuangan yang andal, serta penguatan infrastruktur sistem pembayaran melalui digitalisasi seperti QRIS, uang elektronik, platform keuangan daring, agen digital, aplikasi perbankan digital maupun perluasan jaringan kantor bank dan laku pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif) guna memperluas akses transaksi keuangan dan mendukung efisiensi penyaluran dana dalam rangka peningkatan inklusi keuangan.

3.3.1 Pengembangan Transaksi Pembayaran Non Tunai

Pengembangan transaksi pembayaran nontunai merupakan salah satu strategi penting dalam modernisasi sistem keuangan dan peningkatan efisiensi aktivitas ekonomi. Melalui pemanfaatan teknologi digital, sistem pembayaran nontunai memungkinkan masyarakat melakukan transaksi secara lebih cepat, aman, dan praktis tanpa menggunakan uang fisik. Inovasi ini didukung oleh berbagai layanan seperti *mobile banking*, kartu pembayaran elektronik, serta dompet digital yang semakin berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan perangkat seluler. Di Indonesia, pengembangan pembayaran nontunai juga didorong oleh kebijakan dan infrastruktur sistem pembayaran yang terintegrasi, seperti penerapan standar QRIS yang mempermudah transaksi lintas platform. Dengan adanya sistem pembayaran nontunai, diharapkan akses terhadap layanan keuangan menjadi lebih luas, efisiensi transaksi meningkat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan inklusi keuangan di masyarakat.

Gambar 3.10 Penyelenggaraan FEKDI-IFSE 2025



Jumlah rekening uang elektronik terdaftar baru tercatat sebanyak 47.488.540 rekening per bulan Agustus 2025. Sedangkan perkembangan QRIS sampai dengan Desember 2025 mencatatkan volume transaksi sebesar 15,5 miliar dengan nominal mencapai Rp1,42 Kuadriliun. Untuk jumlah *merchant* QRIS sampai dengan bulan Desember 2025 telah mencapai 42.747.097 *merchant*, di mana 95,74% di antaranya merupakan *merchant* UMKM.

Perkembangan ekosistem QRIS tersebut juga didukung oleh PJP (Penyedia Jasa Pembayaran) QRIS yang berjumlah 158 PJP, terdiri dari 99 PJP Bank (termasuk 13 Bank Syariah dan 29 BPD) dan 59 PJP Non-Bank, serta PIP (Penyelenggara Infrastruktur Pembayaran) yaitu 4 lembaga *switching*. Jumlah pengguna QRIS sampai dengan triwulan IV 2025 sebanyak 59,53 juta dengan pengguna baru sebanyak 4,11 juta.

Tabel 3.5 Perkembangan QRIS antarnegara sampai dengan triwulan IV 2025

Transaksi Inbound-Outbound	Volume (transaksi)	Nominal (rupiah)
Indonesia - Thailand	763.796	294,38 miliar
Indonesia - Malaysia	6.464.624	1,58 triliun
Indonesia - Singapura	341.396	108,90 miliar

Sumber: Bank Indonesia

Pada tanggal 17 Agustus 2025, telah dilaksanakan *Launching* Implementasi QRIS antarnegara Indonesia-Jepang (Indonesia *Outbound*) dimana momentum tersebut bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke 80. Inisiasi dilanjutkan dengan *sandbox* QRIS antarnegara Indonesia-Tiongkok dan dilanjutkan dengan inisiasi *sandbox* QRIS antarnegara Indonesia-Korea Selatan (*inbound* dan *outbound*) pada 30 Oktober 2025. Progres *sandbox* QRIS antarnegara Indonesia-Tiongkok (*inbound* dan *outbound*) telah diselesaikan pada 23 Januari 2026 dan akan segera dilakukan implementasi.

3.3.2 Program Rekening bagi Pelajar

Gambar 3.11 Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)



Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) merupakan salah satu inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan, baik dari sisi kepemilikan maupun pemanfaatan rekening, sekaligus menumbuhkan kebiasaan menabung sejak usia dini. Setiap tanggal 20 Agustus diperingati sebagai Hari Indonesia Menabung (HIM), dimana kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk menggalakkan Gerakan Nasional

Cerdas Keuangan (GENCARKAN), semangat yang disebarkan untuk generasi muda Indonesia agar memiliki budaya menabung sejak dini, rekening yang dimiliki juga dapat menjadi sarana

pembelajaran praktis mengenai pengelolaan keuangan, perencanaan keuangan, dan penggunaan layanan perbankan secara bijak.

Gambar 3.12 Puncak perayaan Hari Indonesia Menabung (HIM) 2025



Hingga Desember 2025, persentase pelajar yang telah memiliki rekening tercatat mencapai 88,15 persen atau sekitar 58,58 juta pelajar, dengan total simpanan sebesar Rp 34,34 triliun. Pencapaian tersebut melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 88 persen.

3.3.3 Percepatan Akses Keuangan Daerah

TPAKD merupakan wadah koordinasi yang melibatkan berbagai instansi pemerintah serta lembaga terkait dengan tujuan utama meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan di daerah. TPAKD berfungsi untuk mempercepat dan memperluas jangkauan layanan keuangan, terutama bagi masyarakat yang masih belum tersentuh oleh lembaga keuangan formal. Sejak November 2024, pembentukan TPAKD telah terealisasi secara menyeluruh di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Pencapaian tersebut mencerminkan komitmen kuat dalam perluasan dan pemerataan akses keuangan di seluruh wilayah Indonesia untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan mewujudkan program prioritas Pemerintah sesuai Asta Cita.

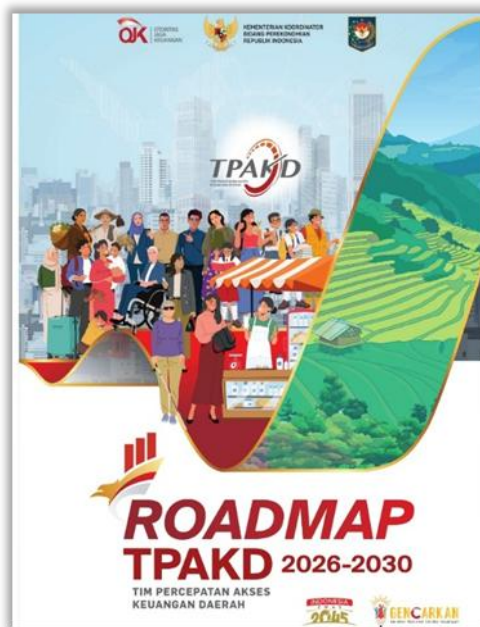
Gambar 3.13 Rapat Koordinasi Nasional TPAKD Tahun 2025



Melalui keberadaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), pemerintah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Upaya tersebut diwujudkan melalui sejumlah program antara lain KUR, Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP), Digitalisasi UMKM & Ekosistem Daerah melalui QRIS, Program Desa EKI (Ekosistem Keuangan Inklusif), Simpanan Pelajar (SimPel), Simpanan Pemuda (SiMuda), hingga program Laku Pandai yang menjangkau desa terpencil.

Keberadaan TPAKD diharapkan dapat mendorong pelaksanaan program keuangan yang selaras dengan potensi unggulan daerah, sekaligus memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan di tingkat daerah dalam rangka mendukung aktivitas perekonomian serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. TPAKD juga diharapkan dapat turut membuka akses untuk agenda prioritas pemerintah seperti program makan bergizi gratis dan penguatan ekonomi rakyat melalui koperasi Merah Putih. Dalam RPJPN 2025-2045, indikator sektor keuangan merupakan bagian dari 45 indikator utama pembangunan, mencakup: aset perbankan/Produk Domestik Bruto (PDB); aset dana pensiun/PDB; aset asuransi/PDB; total kredit/PDB; kapitalisasi pasar modal/PDB; dan inklusi keuangan. Sejalan dengan hal tersebut. Pada tahun 2025, Dewan Nasional Keuangan Inklusif telah melaksanakan rencana aksi penyusunan dan penerbitan *Roadmap* TPAKD Tahun 2026 sampai dengan 2030 guna memastikan keberlanjutan TPAKD untuk jangka panjang.

Gambar 3.14 Road Map TPAKD 2026-2030



Sumber: OJK

3.3.4 Program Ekosistem Keuangan Inklusif di Wilayah Pedesaan (EKI)

Program EKI di wilayah pedesaan dirancang untuk mengoptimalkan pemanfaatan berbagai potensi lokal, baik yang bersumber dari aspek alam, budaya, sosial, maupun finansial. Optimalisasi tersebut dilakukan melalui penyediaan akses layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mencakup sektor perbankan, asuransi, hingga pasar modal. Hingga Juni 2025, Program EKI telah dilaksanakan di 84 Desa dan pada Desember 2025 program EKI diimplementasikan di 53 desa baru yang utamanya berfokus pada pengembangan desa wisata dan usaha pertanian.

Pelaksanaan program ini juga mendorong terwujudnya sinergi antar pemangku kepentingan di daerah melalui forum TPAKD yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, pemerintah daerah, perangkat desa, kementerian/lembaga terkait, serta Industri Jasa Keuangan. Kolaborasi melalui TPAKD tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai program inklusi dan literasi keuangan, antara lain Program KEJAR, program pembukaan rekening bagi masyarakat umum, Laku Pandai, penyaluran kredit atau pembiayaan, program perlindungan atau proteksi keuangan, serta penguatan penggunaan sistem pembayaran digital di masyarakat melalui QRIS maupun dompet elektronik (*e-wallet*).

Melalui pelaksanaan program EKI, ke depan akan terus didorong penguatan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai lembaga ekonomi di tingkat daerah. Kerja sama tersebut tidak hanya melibatkan pelaku UMKM, kelompok tani, serta Kelompok Usaha Bersama (KUB), tetapi juga akan diperluas dengan melibatkan BUMDes dan koperasi, khususnya Koperasi Merah Putih (KMP). Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi lokal sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

3.3.5 Program Laku Pandai

Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) merupakan suatu program yang ditujukan untuk memperluas jangkauan akses masyarakat terhadap layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya, terutama bagi kelompok masyarakat yang belum mengenal, memanfaatkan, maupun memperoleh layanan tersebut. Program ini dilaksanakan melalui konsep layanan keuangan tanpa kantor (*branchless banking*) sehingga masyarakat dapat memperoleh akses terhadap berbagai produk keuangan yang lebih mudah dijangkau, sederhana, mudah dipahami, serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui program ini, Lembaga Jasa Keuangan penyelenggara Laku Pandai menyediakan sejumlah produk dan layanan keuangan, antara lain berupa tabungan, kredit atau pembiayaan bagi nasabah mikro, asuransi mikro, serta produk keuangan lainnya yang penyelenggaraannya dilakukan berdasarkan persetujuan dari OJK. Program ini diharapkan dapat mendukung perluasan inklusi keuangan serta meningkatkan pemerataan akses layanan keuangan di masyarakat.

Program tersebut dikembangkan melalui penerapan sistem keagenan. Dalam hal ini, Agen Laku Pandai merupakan pihak ketiga, baik individu maupun badan usaha, yang menjalin kerja sama dengan bank atau lembaga jasa keuangan lainnya untuk menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat.

Agen Laku Pandai berperan sebagai perpanjangan tangan lembaga keuangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai layanan keuangan sebagaimana yang tersedia di perbankan. Melalui keberadaan agen tersebut, masyarakat dapat memperoleh layanan keuangan di lokasi yang lebih dekat dan mudah dijangkau tanpa harus datang langsung ke kantor cabang bank.

Hingga triwulan IV tahun 2025, Laku Pandai telah mencatatkan jumlah agen perorangan sebanyak 1.737.720, sedangkan jumlah agen badan usaha (*outlet*) mencapai 27.712 dengan jumlah total agen 1.765.432. Untuk capaian jumlah nasabah BSA (*Basic Saving Account*) sebanyak 17.055.541 akun dengan total nominal tabungan BSA sebesar 905.875.328.128 rupiah.

3.3.6 Program Mendukung Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Dewan Nasional Keuangan Inklusif secara berkelanjutan melakukan penguatan terhadap pengembangan industri keuangan syariah nasional melalui berbagai inisiatif strategis yang mencakup seluruh sektor industri, antara lain perbankan, pasar modal, asuransi, dan pinjaman daring. Upaya tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan kontribusi industri keuangan syariah terhadap pertumbuhan perekonomian nasional serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 3.15 Islamic Finance Summit (IIFS) 2025



Pada sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Syariah, penguatan ekosistem dilaksanakan secara berkelanjutan melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta penguatan kolaborasi lintas lembaga dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan produk oleh masyarakat. Peningkatan tingkat pemahaman diharapkan mampu mendorong kepercayaan masyarakat dalam memanfaatkan produk asuransi, penjaminan, dan dana pensiun syariah yang memberikan perlindungan serta manfaat berkelanjutan. Selanjutnya, pengembangan PPDP Syariah difokuskan pada penciptaan produk unggulan berbasis nilai ibadah, seperti zakat, wakaf, dan sedekah, disertai dengan penguatan diferensiasi terhadap produk konvensional dan peningkatan sinergi dengan ekosistem ekonomi syariah.

Penguatan sinergi keuangan PPDP Syariah dengan ekosistem ekonomi syariah dilaksanakan secara berkelanjutan melalui berbagai sinergi dan kegiatan kolaboratif. Kerja sama dan MoU dilakukan antara perusahaan PPDP Syariah dengan beberapa institusi pendidikan UIN dan Universitas Muhammadiyah.

Pada industri perbankan syariah, DNKI berkomitmen untuk mewujudkan sektor perbankan syariah yang tangguh dan berdaya saing, serta mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut sejalan dengan visi yang tercantum dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) Tahun 2023–2027.

Dalam rangka mendukung pencapaian tersebut, dilakukan penguatan sinergi antara perbankan syariah dan industri halal guna memperluas akses layanan perbankan syariah. Sinergi dimaksud dilaksanakan melalui FGD terkait implementasi *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) guna memperkuat sinergi bank syariah dengan UMKM industri halal, serta sosialisasi pelaporan wakaf uang bersama Kementerian Agama yang dihadiri oleh seluruh bank syariah Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Sebagai tindak lanjut, telah dilakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank Nano Syariah dan Nazhir Yayasan Berkah Anak Negeri dalam rangka pengembangan produk *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) untuk pemberdayaan UMKM industri halal.

Realisasi sinergi tersebut telah terlaksana melalui dua program, yaitu program “Integrated Farm dalam rangka pemberdayaan UMKM” oleh Bank Nano Syariah pada bulan Juni 2025 dan program “Ternak Berkah” di Aceh oleh KB Bank Syariah, yang keduanya dilaksanakan bekerja sama dengan Nazhir Yayasan Berkah Anak Negeri. Saat ini OJK telah meluncurkan Pedoman Produk Pembiayaan Syariah mencakup Istishna', Salam, Pembiayaan Multijasa, dan Pembiayaan Mudarabah.

Gambar 3.16 Pedoman Produk Pembiayaan Syariah



Sumber: OJK

Pada sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Syariah, DNKI terus mendorong pengembangan industri yang inklusif guna memperluas akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat yang belum terlayani. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan tata kelola dan manajemen risiko, serta peningkatan komitmen seluruh pemangku kepentingan, termasuk penyusunan *roadmap* pengembangan PVML Syariah.

Dalam rangka memperkuat sinergi dengan ekosistem ekonomi syariah, telah dilaksanakan kegiatan *business matching* PVML Syariah dengan BUMDes di Kabupaten Lombok Tengah pada 28 Agustus 2025 di Mataram, bekerja sama dengan program EKI Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini menghasilkan kerja sama antara tiga entitas PVML Syariah dengan BUMDes yang diikuti dengan penyaluran pembiayaan di wilayah tersebut.

Selain program penguatan pada sektor Perbankan Syariah, PPDB Syariah, dan PVML Syariah, melalui pengembangan Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS), juga dilaksanakan Program *Product/Business Matching* Keuangan Syariah antara lain melalui pengukuhan sebanyak 103 agen layanan keuangan syariah yang mencakup Laku Pandai, pergadaian, dan pembiayaan pada komunitas BUMDes/unit usaha di wilayah Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Lampung, Bandung, dan Ciamis.

3.3.7 Distribusi Surat Berharga Negara (SBN) Ritel secara Daring

Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel sebagai salah satu upaya untuk menyediakan instrumen investasi yang aman bagi masyarakat sekaligus mencegah maraknya praktik investasi ilegal. Melalui penerbitan SBN Ritel, pemerintah juga mendorong masyarakat agar dapat memanfaatkan instrumen investasi yang aman dan menguntungkan, serta berperan dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. SBN Ritel merupakan produk investasi yang diterbitkan pemerintah khusus bagi Warga Negara Indonesia dengan

jaminan keamanan karena pembayaran kupon dan pokoknya dijamin oleh negara, serta memiliki nilai pembelian minimum yang relatif terjangkau.

Gambar 3.17 Sosialisasi Obligasi Negara Ritel ORI028



Selain mendorong masyarakat untuk memiliki kebiasaan menabung, pemerintah juga berupaya membangun paradigma baru agar masyarakat tidak hanya menjadi *saving society* (masyarakat yang gemar menabung), tetapi juga berkembang menjadi *investment society* (masyarakat yang gemar berinvestasi), salah satunya melalui pemanfaatan instrumen SBN Ritel.

Gambar 3.18 Kegiatan sosialisasi/edukasi kepada masyarakat terkait investasi melalui instrumen SBN Ritel



Dari sisi kemudahan akses, SBN Ritel dapat dibeli secara daring melalui berbagai mitra distribusi yang telah ditunjuk oleh pemerintah, seperti perbankan dan perusahaan sekuritas. Produk SBN Ritel terdiri atas beberapa jenis, yaitu Obligasi Negara Ritel (ORI) dan Sukuk Ritel (SR) yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder, serta *Savings Bond Ritel* (SBR) dan Sukuk Tabungan (ST) yang tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Selain itu, SBN Ritel juga

dapat diklasifikasikan berdasarkan prinsip yang digunakan, yaitu produk konvensional dan produk syariah. Produk konvensional meliputi ORI dan SBR, sedangkan produk berbasis syariah meliputi Sukuk Ritel, Sukuk Tabungan, serta *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* Ritel.

Pemerintah Indonesia merilis 8 seri SBN Ritel sepanjang tahun 2025 yang terdiri dari ORI, Sukuk Ritel, SBR, dan Sukuk Tabungan. Total penerbitan SBN Ritel tahun 2025 mencapai Rp152,7 triliun. Penerbitan SBN Ritel bertujuan untuk pembiayaan defisit APBN serta memperdalam pasar keuangan domestik dengan memperluas partisipasi investor individu WNI. Dari sisi profil investor, mayoritas investor SBN Ritel berasal dari generasi milenial yang menunjukkan meningkatnya minat generasi muda terhadap instrumen investasi negara. Selain itu, komposisi investor didominasi oleh perempuan, dengan tiga profesi terbesar berasal dari Pegawai Swasta, Wiraswasta, dan Ibu Rumah Tangga.

Sepanjang Januari hingga Desember 2025, pemerintah telah menerbitkan SBN (Ritel diantaranya mencakup SUN (Surat Utang Negara) Ritel seri ORI 027 pada triwulan I dan seri ORI28 pada triwulan IV. Untuk SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) seri ST014 diterbitkan pada triwulan II dan ST015 pada triwulan IV. Sedangkan SBSN seri SR022 diterbitkan pada triwulan II dan diikuti seri SR023 pada triwulan III. Untuk SUN seri SBR014 telah diterbitkan pada triwulan III dan Penerbitan SBSN Ritel seri SWR006 pada triwulan III tahun 2025.

Jumlah *Single Investor Identification* (SID) atau monitoring jumlah sub rekening efek pada tahun 2025 tercatat mencapai 20.347.147. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 5.475.508 dibandingkan periode sebelumnya.

3.3.8 Pendampingan Akses Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil pada Bisnis Layak Funding (BISLAF)

Pemerintah melalui Kementerian UMKM telah berhasil mendukung peningkatan kualitas dan akses pembiayaan bagi usaha kecil melalui pelaksanaan Program Pendampingan Akses Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil yang dikenal dengan nama BISLAF (Bisnis Layak Funding). Melalui pendampingan, UMKM dipersiapkan untuk meningkatkan peluang dalam melakukan akses pembiayaan kepada lembaga pembiayaan melalui penguatan fundamental bisnis, perencanaan bisnis yang lebih terstruktur serta mendapatkan pendanaan yang tepat. Program BISLAF 2025 mencatat sebanyak 21 pengusaha UMKM peserta telah berhasil memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal dengan total pendanaan sebesar Rp5,095 miliar. Capaian pendanaan ini menjadi sinyal positif bagi meningkatnya kepercayaan lembaga pembiayaan terhadap potensi UMKM. Namun demikian, tantangan pendanaan masih menjadi hambatan utama bagi UMKM. Perluasan akses melalui instrumen keuangan modern seperti fintech peer-to-peer lending, sukuk syariah, hingga skema urun dana menjadi sangat penting.

Gambar 3.19 Workshop Akses Pembiayaan di Kota Samarinda



Kegiatan pendampingan akses pembiayaan dan investasi usaha kecil terus dilakukan secara intensif selama tahun 2025 di beberapa kota di Indonesia. Kegiatan Workshop Akses Pembiayaan dilakukan di Kota Serang, Provinsi Banten pada triwulan II dengan target sebanyak 30 UMKM. Kemudian pada triwulan III telah dilaksanakan kegiatan Workshop dan Business Matching Akses Pembiayaan dan Investasi di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dengan target 50 UMKM, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan target 40 UMKM dan Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara dengan target 35 UMKM. Pada triwulan IV, kegiatan dilanjutkan di Kota Tangerang dan Yogyakarta dengan target masing-masing sebanyak 50 UMKM.

Gambar 3.20 Business Pitching dan Matching di Yogyakarta



Program BISLAF melibatkan mitra lembaga pendamping yaitu INOTEK, lembaga keuangan antara lain BNI, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Mandiri, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Utara Gorontalo (SULUTGO), Shafiq, LBS Urun Dana, Amarta Mikro Fintech, dan mitra strategis. Pemerintah saat ini terus mendorong agar semakin banyak pengusaha UMKM yang mampu mengakses pembiayaan, memperluas pasar, dan meningkatkan skala usahanya sehingga UMKM Indonesia semakin berdaya dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

3.3.9 Program Peningkatan Inklusi Keuangan pada Sektor Pariwisata

Program literasi keuangan, peningkatan kapasitas usaha, serta perluasan akses permodalan bagi pelaku usaha pariwisata yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata merupakan upaya strategis dalam memperkuat daya saing dan keberlanjutan sektor pariwisata nasional. Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha dalam pengelolaan usaha, memperluas akses terhadap berbagai skema pembiayaan, serta mendorong penyusunan perencanaan bisnis yang *bankable* dan pemanfaatan instrumen keuangan formal.

Pelaksanaan program dilakukan secara terintegrasi melalui sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga keuangan, pemerintah daerah, asosiasi industri, serta komunitas pelaku usaha. Selain itu, pemerintah juga mendorong kemudahan akses pembiayaan melalui sinergi dengan sektor perbankan dan non-perbankan guna memperluas peluang permodalan sesuai kebutuhan dan skala usaha.

Dalam rangka memperkuat koordinasi dan kolaborasi, Kementerian Pariwisata juga menyelenggarakan Forum Komunikasi Sinergi Perluasan Pasar dan Permodalan Usaha Pariwisata sebagai wadah pertukaran informasi, identifikasi permasalahan, dan perumusan solusi bersama dalam memperluas akses pasar dan pembiayaan. Forum ini turut mendukung pengembangan skema pembiayaan inovatif serta kemitraan usaha yang berkelanjutan.

Hingga triwulan II Tahun 2025, target kegiatan telah tercapai, dengan realisasi sebanyak 30 badan usaha pada program literasi keuangan dan peningkatan kapasitas usaha, serta 100 badan usaha pada kegiatan forum komunikasi. Secara keseluruhan, pelaksanaan program ini diharapkan mampu meningkatkan inklusi keuangan, memperkuat kapasitas pelaku usaha, serta mendorong kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.3.10 Pembiayaan yang Disalurkan Perusahaan Pergadaian dan Pendanaan Pinjaman Daring (Pindar) pada Sektor Produktif dan/atau UMKM

Perusahaan pergadaian memainkan peran penting dalam pembiayaan sektor UMKM di Indonesia. Melalui POJK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian. Regulasi ini diterbitkan sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, mempercepat inklusi keuangan, serta meningkatkan indeks kemudahan berusaha, khususnya melalui penyederhanaan perizinan bagi usaha pergadaian pada lingkup wilayah kabupaten/kota. Kebutuhan akses pembiayaan masyarakat terus meningkat, terutama bagi kelompok yang belum terlayani optimal oleh lembaga jasa keuangan formal. Sampai dengan triwulan III 2025, pembiayaan yang disalurkan (PYD) sebesar Rp129,84 triliun dengan pertumbuhan penyaluran triwulan III-2024 dengan triwulan III-2025 sebesar 52,35 persen (*y-on-y*).

Sejalan dengan penguatan peran pergadaian, pengembangan pembiayaan berbasis digital melalui pinjaman daring (Pindar) terus didorong sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan bagi sektor produktif dan/atau UMKM. Kebijakan ini diarahkan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan digital, khususnya bagi pelaku usaha yang belum sepenuhnya terlayani oleh lembaga jasa keuangan konvensional. Sampai dengan bulan Desember 2025,

realisasi pangsa pasar pendanaan kepada sektor produktif dan/atau UMKM melalui Pindar tercatat sebesar 32,52 persen, yang mencerminkan peningkatan kontribusi pembiayaan digital dalam mendukung akses keuangan yang lebih inklusif.

3.4 Kelompok Kerja Pelayanan Keuangan Sektor Pemerintah

Layanan keuangan di sektor pemerintahan merupakan instrumen kunci dalam mendorong efisiensi dan transparansi tata kelola melalui percepatan elektronifikasi transaksi pembayaran. Digitalisasi penyaluran bantuan sosial berperan sebagai katalis utama perluasan inklusi keuangan, khususnya bagi kelompok pra sejahtera yang sebelumnya belum terakses layanan keuangan formal. Inisiatif ini secara nyata meningkatkan kepemilikan akun serta mendorong penggunaan layanan keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kelompok Kerja Pelayanan Keuangan di Sektor Pemerintah berperan strategis dalam mengoordinasikan dan mengawal penyaluran bantuan dan subsidi secara digital, termasuk skema pembiayaan bersubsidi serta digitalisasi pembayaran di pemerintah daerah dan sektor ritel. Fokus kelompok kerja diarahkan pada penguatan akses permodalan, percepatan pengembangan UMKM, dan perluasan produk serta layanan keuangan digital, sejalan dengan upaya integrasi kegiatan ekonomi dan keuangan yang inklusif.

3.4.1 Elektronifikasi Bantuan Pemerintah

Transformasi penyaluran bantuan dan subsidi pemerintah ke dalam bentuk nontunai memegang peranan krusial dalam mendorong efisiensi, ketepatan sasaran, kemudahan bagi penerima manfaat, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Upaya elektronifikasi ini dirancang untuk mewujudkan tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi, sebagai landasan utama dalam memperkuat inklusi keuangan. Melalui pendekatan ini, masyarakat didorong untuk lebih berdaya dalam mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan formal secara berkelanjutan.

Sebagai bentuk komitmen, pemerintah telah mengimplementasikan sistem penyaluran bantuan sosial secara elektronik, diantaranya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako, guna memastikan manfaat program diterima dengan lebih efektif dan efisien oleh masyarakat yang membutuhkan.

PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Sampai dengan Desember 2025, bantuan sosial PKH telah disalurkan kepada sekitar 9,99 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 99,99 persen dari target KPM, dengan akumulasi nominal penyaluran PKH mencapai Rp28,73 T (100 persen dari target nominal). Adapun dari penyaluran tersebut, sejumlah Rp26,71 T (92,96 persen) disalurkan kepada 9,62 juta KPM secara nontunai.

Program Sembako merupakan transformasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan perubahan mekanisme penyaluran bantuan yang tidak lagi berbentuk beras namun menjadi dana bantuan yang disalurkan langsung ke rekening KPM. Dana bantuan yang diberikan dalam Program Sembako tidak hanya dapat dibelanjakan untuk beras dan telur saja, namun juga untuk sumber karbohidrat, protein, dan vitamin lainnya yang dapat diperoleh di pasar lokal. Sementara itu, hingga triwulan IV 2025 Program Sembako telah disalurkan

kepada 18,24 juta KPM (96,17 persen dari target KPM) dengan nominal sebesar Rp37,24 T (84,89 persen dari target nominal). Adapun dari jumlah tersebut, sebanyak Rp34,12 T (91,61 persen) disalurkan kepada 17,02 juta KPM secara nontunai.

Program elektronifikasi bantuan dan subsidi pemerintah lainnya berupa program Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (e-KUSUKA), perluasan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) nontunai, Kartu Tani, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, beberapa program pembiayaan bersubsidi yang menyasar kelompok usaha ultra mikro dan UMKM, serta program penjaminan atau asuransi pada sektor pertanian dan kelautan perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan elektronifikasi bantuan sosial bagi nelayan dan pembudidaya ikan melalui Kartu Pelaku Usaha Kelautan (e-KUSUKA). e-KUSUKA bertujuan untuk dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan, yaitu nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pemasar ikan, dan pengolah ikan. Sekaligus untuk percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program pemerintah dan pendataan kepada pelaku usaha agar tepat sasaran. Sampai dengan akhir 2025, telah diterbitkan sebanyak 155.332 e-KUSUKA dimana capaian tersebut mencapai 140,34 persen dari target.

Dalam rangka mendorong transformasi digital untuk distribusi subsidi pupuk bagi para petani, Kementerian Pertanian telah menyalurkan pupuk subsidi menggunakan Kartu Tani pada kuartal keempat mencapai 7,91 juta ton. Kartu Tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh perbankan kepada petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi di pengecer resmi yang bertujuan untuk memudahkan para petani memperoleh pupuk subsidi. Kartu Tani memudahkan petani untuk mengajukan kredit/pembiayaan usaha di lembaga perbankan serta digunakan untuk memverifikasi data para petani ketika melakukan pengajuan kredit/pembiayaan usaha. Selain itu, Kartu Tani dapat digunakan sebagai tabungan dan alat transaksi pembayaran.

Pada bidang pendidikan, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah membantu biaya pendidikan bagi lulusan SMA/ sederajat yang memiliki potensi akademik yang baik namun memiliki keterbatasan finansial atau berasal dari keluarga kurang mampu yang disalurkan secara nontunai, terdiri atas biaya pendidikan dan biaya hidup mahasiswa. Sampai dengan triwulan IV 2025, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) telah menyalurkan dana bantuan KIP Kuliah sebesar Rp14,98 T kepada 1.123.891 mahasiswa. Selanjutnya pada periode yang sama, Kementerian Agama juga telah menyalurkan sebesar Rp158,67 miliar kepada 24.041 mahasiswa. Selanjutnya, program perluasan penggunaan BOS nontunai melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) tercatat sebesar 4.957.304 transaksi atau Rp20,89 T pada 294.238 satuan pendidikan.

3.4.2 Penyaluran Pembiayaan bagi UMKM secara Nontunai

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Hingga Desember 2025, KUR telah disalurkan sebesar Rp270,08 T atau sebesar 95,47 persen dari target plafon KUR yang didistribusikan, yaitu Rp282,87 T. Adapun total debitur baru KUR pada triwulan IV 2025 mencapai 2,03 juta debitur baru dan 1,12 juta debitur graduasi. Namun

demikian, realisasi penyaluran KUR PMI (Pekerja Migran Indonesia) dan KUR Alsintan belum maksimal.

Guna melayani segmen pelaku usaha yang masih dalam skala ultra mikro, pembiayaan UMi bertujuan sebagai program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui KUR. UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Pemerintah menunjuk Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai coordinated fund pembiayaan UMi. Saat ini lembaga yang menyalurkan pembiayaan UMi antara lain PT Pegadaian (Persero), PT Bahana Artha Ventura, serta PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Hingga akhir 2025 telah tersalurkan kepada 2.172.282 debitur, dimana capaian ini melampaui target sebesar 147,77 persen. Sementara itu, pada triwulan IV 2025 sebagian besar debitur merupakan UMKM pendukung dalam rangka program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selanjutnya, Program PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) merupakan program pembinaan khusus yang dilaksanakan oleh PT Permodalan Nasional Madani (Persero) untuk perempuan prasejahtera produktif non-bankable yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha dapat dengan mudah memperoleh akses pendanaan dibandingkan dengan mengajukan pinjaman ke bank. Sampai dengan akhir 2025, jumlah nasabah PNM Mekaar tercatat mencapai 13,17 juta nasabah.

3.4.3. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Penerimaan dan Pembayaran di Sektor Transportasi

Dalam rangka mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi, tata kelola, dan transparansi keuangan, pemerintah telah mencanangkan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Pengembangan Program Transaksi Nontunai pada Pemerintah Daerah hingga triwulan IV 2025 telah terdapat 511 pemerintah daerah (pemda) yang berada di tahap digital dari total 546 pemda. Jumlah ini telah mendekati target pemda digital yang ditetapkan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) tahun 2025, yaitu 92% pemda digital (503 pemda). Sementara itu jumlah pemda yang berada di tahap maju mencapai 27 pemda dan tahap berkembang sebanyak 8 pemda.

Selanjutnya dalam rangka implementasi elektronifikasi dan integrasi pembayaran transportasi, transaksi Uang Elektronik (UE) chip based di sektor transportasi selama triwulan IV 2025 tercatat mencapai 355 juta transaksi atau senilai Rp2,47 T didominasi oleh transaksi perparkiran sebesar 69,18 persen disusul oleh sektor transportasi darat dan rel serta penyeberangan dan pelabuhan masing-masing sebesar 22,76 persen dan 8,06 persen. Data dihimpun berdasarkan laporan dari industri yang termasuk dalam program elektronifikasi pembayaran yang difasilitasi DPSP, mencakup Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, KC I, LRT Sumsel, LRT Jabodetabek, ASDP, Pelindo, serta parkir yang dikelola al. PT Securindo Packatama, PT Centrepark Citra Corpora, dan Unit Pengelola Perparkiran (UPP) Dishub DKI Jakarta. Selanjutnya, Pada triwulan IV 2025, Pada triwulan IV 2025, Bank Indonesia telah melakukan koordinasi persiapan Sistem Pembayaran di Transportasi periode Natal 2025 dan tahun baru 2026.

Sementara itu, Transaksi UE chip based di jalan tol pada periode triwulan IV 2025 tercatat sebanyak 429,83 juta transaksi atau senilai Rp9,86 T, yang beroperasi di Indonesia sepanjang 3.115,98 KM terbagi menjadi 76 ruas tersebar di Pulau Jawa, Bali, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi.

3.4.4. Perluasan Akses Keuangan bagi Kelompok Perempuan

SNKI telah menyebutkan bahwa inklusi keuangan perempuan adalah bagian dari tujuannya. Ketika perempuan memiliki akses dan aktif menggunakan produk dan layanan keuangan, hal ini akan berdampak positif kepada kesejahteraan rumah tangga karena kontrol perempuan terhadap keuangan rumah tangga akan meningkat yang mengarah pada stabilitas ekonomi rumah tangga dan alokasi dana yang lebih efisien.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan berbagai program yang bertujuan meningkatkan inklusi dan literasi keuangan bagi kelompok perempuan, antara lain adalah *endorsement* dokumen *policy brief* terkait inklusi keuangan, asesmen status keberadaan dan penggunaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin untuk mendukung usaha milik perempuan, serta melakukan *pilot project* pelatihan perawat lansia dengan berkolaborasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Ketenagakerjaan.

3.5 Kelompok Kerja Perlindungan Konsumen

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Pokja 5 Perlindungan Konsumen dalam kerangka SNKI pada Tahun 2025 menunjukkan berbagai upaya yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait dalam memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh berbagai instansi, antara lain OJK, Bank Indonesia, Kementerian UMKM, Kementerian Hukum, serta kementerian dan lembaga lainnya yang memiliki peran strategis dalam mendukung perlindungan konsumen.

Salah satu indikator utama yang menjadi perhatian adalah penyelesaian pengaduan di sektor jasa keuangan oleh pelaku usaha yang menjadi kinerja utama OJK dan Bank Indonesia. Target penyelesaian pengaduan pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 90%. Pada tahun 2025, capaian tercatat sebesar 97,21%, yang menunjukkan kinerja yang telah melampaui target yang ditetapkan.

Selain itu, tingkat kepatuhan PUJK dalam menyelesaikan pengaduan sektor jasa keuangan juga terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2025, tingkat kepatuhan tercatat sebesar 91%, yang melampaui target tahunan sebesar 85%. Peningkatan kepatuhan ini mencerminkan semakin baiknya komitmen pelaku usaha dalam memberikan layanan dan perlindungan kepada konsumen.

Dalam aspek pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, OJK juga melakukan tindak lanjut perlindungan konsumen terhadap PUJK yang dicabut izin usahanya. Pada, capaian tindak lanjut mencapai 97% dari target tahunan sebesar 75%, sebagai bagian dari upaya memastikan hak-hak konsumen tetap terlindungi meskipun entitas tersebut tidak lagi beroperasi.

Kegiatan lain yang menunjukkan capaian optimal adalah penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa

Keuangan (LAPS SJK) yang pada tahun 2025 telah mencapai 100%, sesuai dengan target tahunan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka penanganan aktivitas keuangan ilegal, Satgas PASTI juga terus melakukan berbagai upaya penindakan. Pada tahun 2025, tingkat penyelesaian penanganan entitas ilegal mencapai 94% dari target tahunan sebesar 90%. Selain itu, melalui Indonesia *Anti-Scam Centre*, dilakukan langkah pemblokiran rekening yang terkait dengan penipuan dan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Pada tahun 2025, tingkat pemblokiran rekening tercatat sebesar 89% dari target tahunan sebesar 70%.

Dari sisi penguatan regulasi, Bank Indonesia melaksanakan penyusunan peraturan dalam rangka penguatan perlindungan konsumen yang berkaitan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai perlindungan konsumen serta Peraturan Dewan Gubernur terkait kebijakan perlindungan konsumen di bidang sistem pembayaran. Pada tahun 2025, kegiatan difokuskan pada penyusunan kajian akademik, penyusunan matriks rancangan peraturan, serta pembahasan teknis dan koordinasi dengan satuan kerja terkait dan asosiasi industri.

Selain itu, implementasi lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor keuangan juga terus diperkuat sebagai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK. Pada tahun 2025, kegiatan difokuskan pada penyusunan asesmen terhadap kebutuhan operasional LAPS SJK serta koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK dalam rangka perluasan cakupan LAPS-SK untuk menangani sengketa di bidang sistem pembayaran.

Dalam aspek edukasi, kegiatan Gerakan Bersama Edukasi Perlindungan Konsumen (GEBER PK) juga mulai diperluas melalui kerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga. Pada tahun 2025, dilakukan inisiasi kerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam rangka memperluas ekosistem penyelenggara edukasi perlindungan konsumen.

Gambar 3.21 Kick off Gerakan Bersama Kolaborasi PK (GEBER PK)



Bank Indonesia juga mencatat pemenuhan kewajiban pelaporan penyelenggara sistem pembayaran yang telah mencapai 100%, melampaui target tahunan sebesar 90%. Selain itu, upaya penguatan strategi perlindungan konsumen juga dilakukan melalui penyusunan

asesmen berupa Kerangka Profil Risiko Perlindungan Konsumen untuk memperkuat asesmen perilaku penyelenggara berbasis risiko (*market conduct*).

Di sisi lain, Kementerian UMKM turut berperan aktif dalam upaya perlindungan konsumen melalui kegiatan Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2025 di Pontianak, Kalimantan Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari percepatan formalisasi usaha mikro sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, serta upaya memperkuat kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha mikro.

Dukungan lintas kementerian dan lembaga juga terlihat dari peran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum yang secara aktif memberikan data korporasi yang dibutuhkan oleh Satgas PASTI. Pada tahun 2025, seluruh permohonan data korporasi yang diajukan telah ditindaklanjuti dengan tingkat penyelesaian 100%.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan Pokja 5 Perlindungan Konsumen pada Tahun 2025 menunjukkan kemajuan yang positif dalam penguatan sistem perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Berbagai program yang dilaksanakan tidak hanya berfokus pada penanganan pengaduan dan pengawasan pelaku usaha, tetapi juga pada penguatan regulasi, edukasi konsumen, serta kolaborasi lintas lembaga dalam memberantas aktivitas keuangan ilegal dan meningkatkan literasi perlindungan konsumen di masyarakat.

3.6 Kelompok Kerja Kebijakan dan Regulasi

Salah satu fondasi utama SNKI adalah kebijakan dan regulasi yang kondusif, sehingga mampu mendukung pelaksanaan berbagai pilar keuangan inklusif. Pilar-pilar tersebut mencakup program edukasi dan literasi keuangan, pemberdayaan hak properti masyarakat, fasilitasi serta intermediasi distribusi saluran keuangan, layanan keuangan sektor pemerintah, hingga penguatan perlindungan konsumen di sektor keuangan. Untuk memastikan fondasi ini dapat diimplementasikan dengan baik, dibentuk kelompok kerja kebijakan dan regulasi yang memiliki sejumlah tugas penting, antara lain menyusun usulan rekomendasi kebijakan serta melakukan harmonisasi kebijakan dan regulasi terkait keuangan inklusif.

Dalam rangka implementasi kebijakan pengembangan dan penguatan sektor keuangan nasional, pemerintah terus memperkuat akses dan literasi keuangan yang menjadi fondasi kesejahteraan keuangan bagi masyarakat. Melalui berbagai dialog dan perspektif global, termasuk kunjungan Ratu Maxima selaku Advokat Khusus Sekjen PBB untuk Kesejahteraan Keuangan (*United Nation Secretary-General's Special Advocate/UNSGSA*) for Financial Health, yang menegaskan pentingnya kualitas pengelolaan keuangan rumah tangga dalam mendukung kesejahteraan yang berkelanjutan.

Dengan sinergi dan kolaborasi antara K/L dengan DNKI, pada tahun 2024 tingkat inklusi keuangan telah mencapai 92,7 persen. Sementara itu, tingkat literasi keuangan sebesar 66,4 persen yang telah melampaui rata-rata negara *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Capaian tersebut diperkuat dengan penggunaan produk dan layanan keuangan digital seperti QRIS yang mencapai 58 juta pengguna masyarakat umum dan 40 juta *merchant* dimana lebih dari 90%-nya merupakan merchant UMKM.

Selanjutnya, penguatan literasi dan inklusi keuangan tidak hanya diarahkan pada perluasan akses terhadap produk dan layanan keuangan, tetapi juga pada peningkatan kualitas pemanfaatannya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (*daily living*), memperkuat resiliensi terhadap guncangan ekonomi, mendorong orientasi keuangan jangka panjang, serta meningkatkan keyakinan masyarakat dalam memanfaatkan produk dan layanan keuangan secara bertanggung jawab.

Bapak Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk membentuk DNKK sebagai penguatan dan transformasi kelembagaan DNKI. Adapun Kelembagaan Kesejahteraan Keuangan akan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Menko Perekonomian sebagai Ketua Harian, dan Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, Menteri dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Keuangan (Menkeu) sebagai Wakil Ketua Harian. Keanggotaan DNKK akan diperluas mencakup Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan perwakilan asosiasi.

DNKK diharapkan dapat memperluas fokus kebijakan dari aspek akses dan literasi menuju pengelolaan keuangan rumah tangga yang lebih inklusif, resilien, dan berkelanjutan. Saat ini, sedang disusun regulasi terkait pembentukan DNKK, dengan tetap memperhatikan kesinambungan serta sinergi dengan kerangka kelembagaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang P2SK. Sepanjang tahun 2025, koordinasi pelaksanaan SNKI terus dilakukan dengan kelompok kerja DNKI lainnya terkait kebutuhan review kebijakan dan regulasi pelaksanaan program keuangan inklusif, serta sinkronisasi data dan inventarisasi studi yang sudah ada dari masing-masing pokja untuk keperluan kajian, pembuatan kebijakan, dan regulasi.

Untuk mendukung keuangan inklusif dalam kebijakan dan regulasi sepanjang tahun 2025 telah diterbitkan:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/UMKM (POJK 19/2025). POJK ini merupakan amanat dari UU P2SK Pasal 249 ayat (3). POJK ini untuk mengatasi hambatan administratif dan struktural yang selama ini dialami UMKM dalam mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan formal. Adapun tujuannya adalah (i) meningkatkan akses pembiayaan UMKM melalui bank dan lembaga keuangan non bank (LKNB), (ii) mendorong pemberdayaan UMKM untuk lebih berdaya saing dan berkontribusi pada ketahanan serta pertumbuhan ekonomi nasional, (iii) memperkuat ekosistem pembiayaan UMKM dengan tata kelola yang sehat, manajemen risiko yang baik, dan perlindungan konsumen.
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (PBI 9/2025). Tujuan diterbitkannya PBI adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong intermediasi perbankan yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan agar kredit/pembiayaan dapat optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
- c. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (PADG 27/2025). PADG ini merupakan peraturan pelaksanaan dari PBI 9/2025 yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan hal teknis terkait pemberian insentif likuiditas makroprudensial

- d. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tim Kerja Indeks Akses keuangan Daerah (IKAD). Pembentukan Tim Kerja untuk menjaga keberlanjutan, kualitas, dan efektivitas implementasi IKAD di daerah. IKAD merupakan indikator proksi inklusi keuangan pada level kabupaten/kota, dikarenakan pengukuran survei inklusi keuangan hanya terbatas pada level nasional.
- e. Pada tanggal 10 Oktober 2025 telah diluncurkan *Road Map* TPAKD 2026-2030 yang menjadi panduan arah kebijakan dan strategi penguatan akses keuangan di daerah secara berkelanjutan khususnya untuk pembiayaan UMKM.

3.7 Kelompok Kerja Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur serta teknologi informasi keuangan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan guna mendukung penyediaan produk dan layanan sektor keuangan yang semakin merata di seluruh Indonesia. Infrastruktur keuangan dinilai baik dan memberikan dampak positif apabila akses dan keterjangkauan yang dibangun menunjukkan cakupan yang semakin luas dibandingkan sebelumnya.

Sementara itu, pengembangan teknologi informasi keuangan berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan melalui kemudahan akses, peningkatan efisiensi, serta inovasi dalam layanan keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa langkah yang telah dilaksanakan oleh POKJA VII dalam rangka mencapai target inklusi keuangan, sebagaimana diuraikan berikut ini.

3.7.1 Penyediaan Akses Internet Pita Lebar untuk Fasilitas Layanan Publik

Program Penyediaan Akses Internet Pita Lebar bagi Fasilitas Layanan Publik yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan terus menunjukkan progres yang positif. Sampai dengan triwulan IV (Desember 2025), telah terealisasi pembangunan baru pada 1.292 lokasi. Dengan demikian, dari total target *Operation Maintenance* (OM) tahun 2025 sebesar 36.830 titik akses internet, telah tercapai sebanyak 29.155 titik/lokasi atau sekitar 79,17% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperluas konektivitas digital pada fasilitas layanan publik, sekaligus menjadi langkah strategis dalam mendukung pemerataan akses informasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan transformasi digital di berbagai wilayah Indonesia.

3.7.2 Penyediaan Layanan Telekomunikasi Seluler 4G bagi wilayah Non Komersial

Pemerintah secara intensif melaksanakan pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) sebagai upaya meningkatkan dan menyediakan infrastruktur komunikasi nirkabel. Pembangunan BTS diprioritaskan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) guna mengurangi kesenjangan digital serta memastikan masyarakat memperoleh akses yang setara terhadap layanan komunikasi. Adapun capaian penyediaan akses sinyal BTS 4G di wilayah non Papua sebanyak 3.485 dan OM penyediaan akses sinyal BTS Papua dan Papua Barat sebanyak 3.262 lokasi. Oleh sebab itu, secara kumulatif telah terealisasi penyediaan layanan telekomunikasi seluler 4G bagi wilayah non komersial total 6.747 titik lokasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. 233 titik lokasi BTS *Universal Service Obligation* (USO) telah *on air*, dari yang awalnya sebanyak 1.682 BTS USO eksisting (skema sewa jasa). Pengurangan terjadi karena

adanya terminasi dan moratorium karena sudah tergelarnya jaringan dari Operator Seluler di lokasi tersebut. Adapun rincian BTS di Papua sebanyak 283 titik lokasi dan non Papua sebanyak 950 titik lokasi.

2. 5.514 titik lokasi BTS *New Site* 4G (skema belanja modal), telah seluruhnya *on air* dan sudah melayani masyarakat, dengan rincian BTS di Papua sebanyak 2.979 titik lokasi dan non Papua sebanyak 2.535 titik lokasi.

3.7.3 Penyediaan Akses Internet tetap Pital lebar untuk Rumah Tangga dan Ruang Publik

Program Penyediaan Akses Internet Tetap Pital lebar bagi Rumah Tangga dan Ruang Publik menunjukkan capaian yang signifikan hingga triwulan IV. Secara kumulatif, capaian program ini telah menjangkau sebanyak 1.281 titik. Program Bantuan Pemerintah *Fixed Broadband* (FBB) atau Kampung Internet Tahun 2026 telah menysasar 1.281 titik yang terdiri atas 1.197 titik pada sektor UMKM dan 84 titik pada fasilitas umum (FASUM). Pelaksanaan program tersebut tersebar di 6 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat yang mencakup 10 kabupaten dan 22 desa.

Selain itu, telah dilaksanakan kegiatan pelatihan serta penyerahan Laboratorium *Fiber Optic* (FO) di SMKN 2 Sragen sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pada periode yang sama, juga telah dilakukan survei calon penerima bantuan FBB Tahun 2026 di wilayah Maluku, Kupang, dan Sumatera Utara sebagai langkah awal persiapan pelaksanaan program selanjutnya.

3.7.4 Implementasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) pada Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D)

Capaian yang sudah terhubung dengan SPLP dengan teknologi API dan aktif secara harian melakukan pertukaran data hingga periode pelaporan tercatat sebesar 5,07%, atau sebanyak 37 instansi dari total 730 K/L/D. Selain itu juga, dilaporkan bahwa yang sudah mengimplementasikan SPLP sebanyak 442 mencakup 60,55% dari total 730 K/L/D. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses integrasi layanan melalui SPLP masih memerlukan percepatan dan penguatan koordinasi lintas instansi guna mendorong peningkatan adopsi sistem secara lebih luas dalam rangka mendukung interoperabilitas layanan pemerintahan berbasis digital.

3.7.5 Pemanfaatan Data Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Dalam rangka pemanfaatan data kependudukan melalui portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan penguatan implementasi IKD, telah dilakukan integrasi data kependudukan yang dapat dimanfaatkan sebagai basis data penyaluran bantuan sosial dan program perlindungan sosial lainnya. Sebagai bagian dari pemanfaatan data kependudukan tersebut maka dilaksanakan *pilot project* di Kabupaten Banyuwangi sampai dengan 31 Desember 2025 dengan capaian sebanyak 211.937 aktivasi IKD. Capaian ini menjadi langkah strategis dalam mendukung akurasi, transparansi, dan efektivitas penyaluran program perlindungan sosial berbasis data kependudukan yang terintegrasi.

3.7.6 Implementasi Identitas Kependudukan Digital (Pelayanan Adminduk Online)

Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) secara daring terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sampai dengan 31 Desember 2025, jumlah akumulasi aktivasi IKD secara nasional telah mencapai 17.567.540 aktivasi.

Capaian tersebut mencerminkan tren peningkatan identitas digital oleh masyarakat yang menjadi indikator positif dari percepatan transformasi layanan Adminduk berbasis elektronik. Secara substansial, peningkatan jumlah aktivasi ini memperkuat fondasi interoperabilitas data kependudukan, mendukung integrasi layanan publik lintas sektor, serta mendorong efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital.

3.7.7 Pengembangan Teknologi dan Infrastruktur Keuangan Lainnya

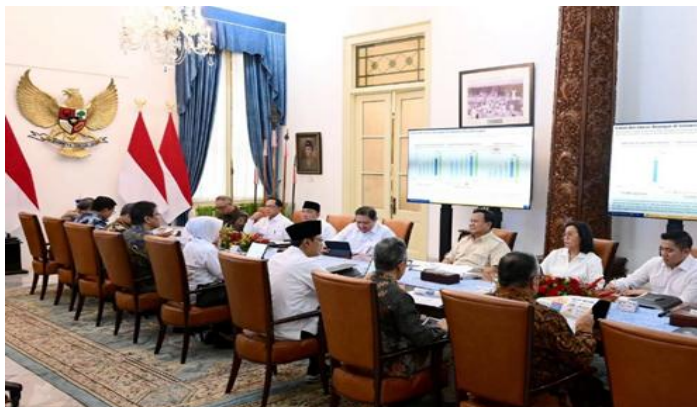
Selain dari program yang telah dilaksanakan diatas, terdapat beberapa program/kegiatan pengembangan infrastruktur dan teknologi informasi keuangan lainnya pada K/L/D yang mendukung pencapaian kinerja pada Pokja VII, antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) oleh Kementerian Keuangan, melalui penambahan skema Kredit Industri Padat Karya (KIPK) dan Kredit Program Perumahan (KPP). Kedua skema tersebut telah dirilis masing-masing pada Agustus dan Oktober 2025 sebagai Upaya dalam memperluas akses pembiayaan bagi sektor prioritas.
2. Penambahan kanal QRIS pada Modul Penerimaan Negara (MPN) oleh Kementerian Keuangan. Pada tahun 2025 telah ditambahkan *Channel Aggregator* (CA) kanal QRIS yaitu Finnet untuk menambah pilihan metode pembayaran *billing* MPN yang sebelumnya hanya tersedia melalui 4 bank, yaitu BRI, Mandiri, BNI, dan Nobu Bank.
3. Pemutakhiran data Keuangan Inklusif pada publikasi Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) oleh Bank Indonesia. Sepanjang tahun 2025, Bank Indonesia telah melakukan publikasi SSKI sebanyak 12 kali melalui laman resmi *website* Bank Indonesia sebagai upaya untuk penyediaan data dan informasi terkait perkembangan sistem keuangan nasional.
4. Pemutakhiran data dalam rangka *Financial Access Survey* (FAS) dan *International Monetary Fund* (IMF) telah dilakukan pada TW II 2025.
5. Pengembangan *New BI-FAST* dan *Enhancement BI-FAST* sampai dengan TW IV 2025 masih pada tahap penyusunan rancang bangun terintegrasi. Sementara itu, untuk program pengembangan Sistem Informasi BI lainnya telah masuk tahap implementasi. Pengembangan dilakukan dengan tujuan penguatan aspek operasional dan keamanan sistem BI-FAST.
6. Pengembangan layanan aplikasi iDebku oleh OJK, yang menyediakan akses data informasi debitor secara *online* dan tatap muka. Sampai dengan triwulan IV 2025, layanan melalui aplikasi iDebKu telah memproses sebanyak 435.228 permohonan layanan.

3.8 Sekretariat DNKI

3.8.1 Rapat koordinasi terbatas (Rakortas) Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI)

Gambar 3.22. Rakortas DNKI 22 Maret 2025



Pemerintah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Terbatas DNKI yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia pada 22 Maret 2025 di Istana Negara, Jakarta. Rapat ini dihadiri oleh jajaran Menteri Kabinet, pimpinan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta perwakilan industri jasa keuangan.

Dalam arahnya, Presiden menekankan pentingnya mendorong seluruh masyarakat untuk memiliki rekening serta memperkuat literasi keuangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat implementasi SNKI serta mempercepat perluasan akses layanan keuangan formal di Indonesia.

3.8.2 Sosialisasi Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)

Gambar 3.23 Sosialisasi Tindaklanjut Peluncuran IKAD



Kegiatan sosialisasi Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) dilaksanakan pada 4 Juni 2025 di Jakarta sebagai tindak lanjut peluncuran IKAD oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait mengenai metodologi pengukuran, pemanfaatan

indeks, serta peran pemerintah daerah dalam meningkatkan akses layanan keuangan di wilayahnya. Forum ini juga menjadi sarana koordinasi awal dalam pemanfaatan IKAD sebagai instrumen pemetaan dan evaluasi akses keuangan di daerah guna mendukung implementasi SNKI.

3.8.3 Rapat Koordinasi antar Pokja dan Sekretariat DNKI

Gambar 3.24 Rapat Koordinasi antar Pokja dan Sekretariat DNKI



Rapat Koordinasi antar Pokja dan Sekretariat DNKI diselenggarakan pada 17 Juni 2025 di Jakarta sebagai forum koordinasi untuk memperkuat sinergi pelaksanaan program SNKI. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan berbagai kelompok kerja DNKI serta Sekretariat DNKI yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian. Hasil utama dari rapat ini berupa penguatan sinergi antar kementerian/lembaga dalam pelaksanaan program kerja Pokja DNKI, termasuk penyelarasan rencana kegiatan serta langkah tindak lanjut untuk mendukung pencapaian target inklusi keuangan nasional. Arah serta keputusan rapat berupa peningkatan inklusi keuangan bagi kelompok sasaran prioritas, penguatan TPAKD, penguatan kelembagaan DNKI serta diseminasi arah kebijakan dan program pemerintah yang mendukung Asta Cita.

3.8.4 Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025

Gambar 3.25 Rapat Koordinasi Nasional TPAKD



Rapat Koordinasi Nasional TPAKD 2025 diselenggarakan pada 10 Oktober 2025 di Jakarta dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah pusat, pemerintah daerah, OJK, serta lembaga jasa keuangan dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi program percepatan akses keuangan di daerah guna meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya UMKM dan kelompok rentan. Forum ini juga menjadi sarana koordinasi nasional dalam

mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan inklusi keuangan. Pemerintah mendorong agar TPAKD di seluruh daerah berperan aktif dalam menyukseskan berbagai agenda prioritas nasional di daerah seperti Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, perluasan energi bersih melalui PLTS Desa, dan kedaulatan pangan melalui Program PINTAR (Peningkatan Inklusi Keuangan untuk Pemerataan Ekonomi Rakyat)

3.8.5 Ministerial Group Meeting for Financial Health

Gambar 3.26 Ministerial Group Meeting for Financial Health di Gedung AA Maramis Jakarta



Ministerial Group Meeting for Financial Health diselenggarakan pada tanggal 27 November 2025 sebagai forum dialog tingkat menteri yang membahas strategi peningkatan kesehatan keuangan masyarakat. Indonesia telah mencapai kemajuan pesat dalam memperkuat lingkungan yang kondusif. Indonesia juga sedang dalam proses memasuki dan mempersiapkan Strategi Nasional baru, yang akan

memperkenalkan kerangka kerja kesehatan keuangan (*financial health framework*) yang selaras dengan praktik terbaik global, termasuk prinsip-prinsip OECD dan G20.

Ditambah lagi sedang menuntaskan transformasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menjadi Komite Nasional Peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan (Komnas LIK), dengan keanggotaan yang diperluas dan mekanisme kerja yang lebih jelas, termasuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Pertemuan ini melibatkan Kementerian dan Lembaga Negara, lembaga internasional, serta pemangku kepentingan sektor keuangan untuk memperkuat integrasi kebijakan inklusi keuangan, literasi keuangan, dan perlindungan konsumen. Forum ini menekankan bukan hanya mengukur kesehatan keuangan pada tingkat ekonomi makro, penyedia layanan keuangan juga harus mengukur kesehatan keuangan nasabah mereka sendiri, sehingga mampu merancang kebijakan dan produk yang lebih baik.

3.9 Sinergi dan Kolaborasi Program

3.9.1 BRI UMKM EXPO(RT) dan Micro Finance Outlook 2025

Gambar 3.27 Seremoni pembukaan kegiatan UMKM Expo dan Micro Finance Outlook 2025



BRI UMKM EXPO(RT) dan Micro Finance Outlook 2025 diselenggarakan pada 30 Januari 2025 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang. Kegiatan ini dihadiri oleh pemerintah, pelaku industri jasa keuangan, serta ratusan pelaku UMKM dari berbagai daerah di Indonesia. Forum ini bertujuan mendorong UMKM naik kelas melalui peningkatan akses pembiayaan, penguatan kapasitas usaha, serta perluasan akses pasar, termasuk pasar

ekspor, guna meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional.

3.9.2 Festival Inklusi Keuangan dan *Creative Talk* Peningkatan Inklusi Keuangan dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Banyumas

Gambar 3.28 Kegiatan festival dan diskusi peningkatan inklusi keuangan di Banyumas

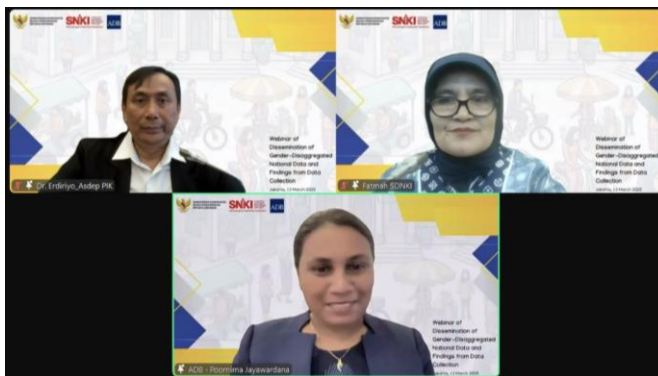


Festival Inklusi Keuangan dan *Creative Talk* diselenggarakan pada 21–22 Februari 2025 di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Banyumas. Kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, pelaku UMKM, serta masyarakat umum melalui pameran layanan keuangan, edukasi literasi keuangan, dan promosi produk unggulan daerah. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi dan inklusi

keuangan masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi daerah.

3.9.3 Peluncuran Buku Data Nasional Terpilah Gender (DNTG) 2024

Gambar 3.29 Peluncuran Buku DTNG) 2024 secara daring



Buku Data Nasional Terpilah Gender (DNTG) 2024 resmi diluncurkan oleh Asian Development Bank (ADB) dan DNKI sebagai referensi strategis nasional dalam mendokumentasikan kondisi data terpilah gender di Indonesia. Buku ini menyajikan potret komprehensif data terpilah gender pada periode 2022–2023 sebagai landasan analisis dan pengambilan kebijakan inklusi keuangan perempuan di

tingkat nasional. Peluncuran dilaksanakan melalui webinar pada 13 Maret 2025 sebagai *milestone* penting dalam penguatan ekosistem data terpilah gender di Indonesia, dengan dihadiri oleh perwakilan dari 541 TPAKD, instansi kontributor DNTG, serta sektor swasta dan organisasi internasional yang aktif dalam program inklusi keuangan perempuan.

3.9.4 Indonesia International Financial Inclusion Summit (IFIS) 2025

Gambar 3.30 Kegiatan IFIS 2025



Kegiatan Indonesia International Financial Inclusion Summit (IFIS) 2025 diselenggarakan pada 6 Mei 2025 di Jakarta dengan tema “Inklusi Keuangan untuk Mendukung Asta Cita”. Forum ini diselenggarakan oleh Tony Blair Institute for Global Change (TBI) bekerja sama dengan Bill & Melinda Gates Foundation dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kegiatan ini bertujuan sebagai forum internasional yang

mempertemukan pemerintah, regulator, lembaga internasional, dan pelaku industri jasa keuangan melalui kolaborasi dan pertukaran praktik baik dalam pengembangan kebijakan inklusi keuangan. Pada kesempatan tersebut juga diluncurkan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) sebagai instrumen pemetaan tingkat akses layanan keuangan di berbagai wilayah di Indonesia.

3.9.5 Launching Mini Bank BJB

Gambar 3.31 Kegiatan peresmian Mini Bank BJB di SMP Negeri 1 Weru



Kegiatan Launching Mini Bank BJB (Bank Mini Sekolah) diselenggarakan pada 25 Juni 2025 di SMP Negeri 1 Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat sebagai bagian dari rangkaian Bulan Literasi Keuangan 2025.

Kegiatan peluncuran ini dihadiri oleh sekitar 350 peserta yang terdiri dari kepala sekolah SMP di Kabupaten Cirebon, perwakilan orang tua siswa, serta para pelajar. Program ini juga menjadi bagian dari implementasi

Gerakan Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) untuk menumbuhkan budaya menabung sejak usia dini.

3.9.6 Diskusi Panel Transformasi Pengusaha UMKM melalui Peran Literasi, Inklusi dan Keuangan Digital

Gambar 3.32 Diskusi panel transformasi UMKM melalui literasi dan keuangan digital



Diskusi panel bertajuk “Transformasi Pengusaha UMKM melalui Peran Literasi, Inklusi, dan Keuangan Digital” diselenggarakan pada 9 Juli 2025 di Bandung, Jawa Barat, dan 3 September 2025 di Malang, Jawa Timur. Kegiatan ini diinisiasi oleh *Mastercard Center for Inclusive Growth* (MCI) sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas pelaku UMKM dalam menghadapi perkembangan

ekonomi digital. Melalui forum diskusi ini, pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan, memperluas akses pembiayaan, serta memperkuat daya saing usaha melalui pemanfaatan ekosistem keuangan digital.

3.9.7 Sosialisasi Literasi dan Inklusi Keuangan Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Binaan Sabuk KAJ (Sentra Bimbingan Usaha Kecil Keuskupan Agung Jakarta)

Gambar 3.33 Kegiatan sosialisasi literasi dan inklusi keuangan bagi pelaku usaha mikro dan kecil



Pada 25 Agustus 2025, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Sentra Bimbingan Usaha Kecil Keuskupan Agung Jakarta (SABUK KAJ) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Literasi dan Inklusi Keuangan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagai upaya mendukung dan memperkuat kapasitas usaha, kemampuan teknis serta daya saing pelaku UMK binaan. Dalam kesempatan sosialisasi kali ini,

Kemenko Perekonomian berkolaborasi bersama Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) menginisiasi kolaborasi yang mempertemukan pelaku usaha dengan berbagai instansi dan mitra strategis. Kegiatan tersebut diikuti oleh lebih dari 100 peserta yang terdiri dari perwakilan pelaku usaha mikro binaan KAJ, pengurus SABUK, serta perwakilan Dewan Paroki Harian St. Albertus Harapan Indah.

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital menyampaikan terkait pentingnya mendukung inklusi keuangan agar terjadi membantu pemerataan ekonomi melalui pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Sinergitas antara pemerintah, lembaga keuangan, dan lembaga pendamping usaha melalui kegiatan ini diharapkan dapat memperluas akses layanan keuangan dan legalitas usaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil binaan SABUK KAJ, sehingga mampu mendorong pertumbuhan usaha yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

3.9.8 Launching Program PINTAR

Gambar 3.34 Kegiatan Launching Program PINTAR di Kabupaten Kuningan



Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama DNKI dan RISE Institute meluncurkan Program Peningkatan Inklusi Keuangan untuk Pemerataan Ekonomi Rakyat (PINTAR) pada 29 Agustus 2025 di Desa Paninggaran, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Program ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat inklusi keuangan masyarakat pedesaan serta mendukung

pemerataan pembangunan ekonomi yang inklusif.

Program PINTAR dirancang sebagai *pilot project* pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui penyediaan akses produk keuangan, peningkatan literasi keuangan, serta perluasan akses layanan keuangan formal. Desa Paninggaran dipilih sebagai lokasi awal implementasi dengan 187 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai sasaran utama program yang berasal dari kelompok masyarakat berpendapatan rendah (desil 1–4). Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat, program ini diharapkan dapat menjadi model penguatan ekosistem keuangan inklusif di desa serta mendukung upaya pengentasan kemiskinan.

3.9.9 Focus Group Discussion Pengumpulan Data Nasional Terpilah Gender (DNTG) 2025

Gambar 3.35 FGD Pengumpulan Data DNTG 2025



Dalam rangka finalisasi Laporan DNTG 2025, ADB dan DNKI menyelenggarakan serangkaian FGD pengumpulan data bersama para kontributor lintas klaster sejak Juli 2025.

Pada September hingga Oktober 2025, pertemuan pengumpulan data dilaksanakan di Kantor Sekretariat DNKI dengan melibatkan kontributor dari Klaster 1 sampai 5, mencakup Pemerintah, Perbankan, Lembaga Keuangan Non-Bank, Fintech, dan Ekonomi Syariah, guna

menghimpun data yang komprehensif sebagai basis penyusunan Laporan DNTG 2025.

3.9.10 *Dialog and Sharing Regional Innovation: Adiluhung Kuningan*

Gambar 3.36 Kegiatan Dialog dan Sharing Inovasi Regional di Kuningan



Dialog and Sharing Regional Innovation “Kuningan Adiluhung 2025” diselenggarakan pada 17 September 2025 di Jakarta. Forum ini mengusung tema “*Connecting & Collaboration: Ekosistem Inovasi Regional dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan*” dan diisi dengan

berbagai agenda seperti dialog inovasi regional, *sharing knowledge, business matching, expo* potensi daerah, serta kegiatan *networking*.

Melalui forum ini, Kabupaten Kuningan mempromosikan potensi investasi dan produk unggulan daerah sekaligus memperluas jejaring kerja sama dengan berbagai pihak di tingkat nasional.

3.9.11 *Official Visit to Indonesia of Vice President of the Swiss Confederation*

Gambar 3.37 Kunjungan Wakil Presiden Swiss beserta Jajaran ke Indonesia

Kunjungan resmi Wakil Presiden Konfederasi Swiss, H.E. Guy Parmelin, dilaksanakan pada 2 Oktober 2025 di Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS), Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja delegasi Swiss ke Indonesia pada 30 September – 3 Oktober 2025.



Kunjungan ini menyoroti keberhasilan kolaborasi antara Kantor ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste dengan KPBS Pangalengan melalui proyek “Mempromosikan Usaha UKM melalui Peningkatan Akses Wirausaha terhadap Jasa Keuangan Tahap 2” (Promise II Impact), yang didanai oleh Sekretariat Negara Swiss untuk

Urusan Ekonomi (SECO). Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong transformasi digital dan mempromosikan inklusi keuangan di sektor susu Indonesia, sejalan dengan prioritas pemerintah untuk meningkatkan produksi susu nasional guna memenuhi permintaan domestik yang terus meningkat. Kunjungan ini menegaskan kolaborasi Swiss–Indonesia dan menandai perluasan program susu digital ke tiga koperasi lain di Jawa Timur

3.9.12 Diseminasi DNTG dan Inovasi Layanan Inklusi Keuangan Perempuan

Gambar 3.28 Kegiatan Diseminasi DNTG dan Inovasi Layanan Inklusi Keuangan Perempuan



DNKI bersama dengan ADB menyelenggarakan kegiatan diseminasi DNTG sekaligus forum inovasi layanan inklusi keuangan perempuan di Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat, sebagai ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam memajukan inklusi keuangan perempuan di Indonesia. Kegiatan ini berhasil

menjangkau 200 peserta dari beragam kelompok, meliputi kontributor data, mitra pembangunan, *Non-Governmental Organization* (NGO), hingga mahasiswa.

Kegiatan berpusat pada pemaparan temuan awal DNTG 2025 oleh ADB serta sesi inovasi layanan dari lembaga-lembaga keuangan terkemuka, antara lain BSI, Pegadaian Syariah, PNM Mekaar, BJB, Bank Jateng Syariah, Women's World Banking, dan MCI Strive Learning Network. Acara ditutup dengan kunjungan lapangan ke nasabah Mekaar sebagai gambaran nyata implementasi program inklusi keuangan perempuan di lapangan, sekaligus pemberian penghargaan kepada kontributor dengan program terbaik dan paling inovatif dalam mendukung inklusi keuangan perempuan.

3.9.13 Sarasehan dan Kunjungan Lapangan IKDP “ Membangun Layanan Inklusi Keuangan Digital yang Responsif Gender.”

Gambar 3.29 Kegiatan Sarasehan dan Kunjungan Lapangan Program Inklusi Keuangan Digital di Lumajang



Sarasehan dan kunjungan lapangan *Inclusive Digital Finance Program* (IKDP) dengan tema “Membangun Layanan Inklusi Keuangan Digital yang Responsif Gender” diselenggarakan pada 5 November 2025 di Lumajang, Jawa Timur.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan akses perempuan terhadap layanan keuangan digital, khususnya bagi pelaku UMKM dan masyarakat di wilayah pedesaan. Melalui kegiatan sarasehan dan kunjungan lapangan tersebut, para peserta juga memperoleh pembelajaran langsung mengenai praktik implementasi layanan keuangan digital yang mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan di daerah.

3.9.14 Leadership Gathering and Reception Y.M. Queen Maxima: *Building Financial Resilience In The Digital Economy*

Gambar 3.30 Leadership gathering dan forum diskusi keuangan digital bersama Queen Maxima



Leadership Gathering and Reception dengan tema “*Building Financial Resilience in the Digital Economy*” diselenggarakan pada 26 November 2025 di Jakarta dan diinisiasi oleh Mastercard sebagai forum dialog strategis yang mempertemukan pemangku kepentingan dari sektor pemerintah, regulator, industri jasa keuangan, serta organisasi internasional.

Forum ini membahas berbagai strategi untuk memperluas akses

layanan keuangan digital yang aman dan inklusif, sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi keuangan dalam meningkatkan literasi dan kesehatan finansial masyarakat.

3.9.15 FGD Inklusi Keuangan Syariah bagi usaha Mikro Kecil - Go Digital dan Go Export melalui Dukungan *International Creatives Exchange* (ICE)

Gambar 3.31 Focus Group Discussion Inklusi Keuangan Syariah bagi UMKM



FGD bertajuk “Inklusi Keuangan Syariah bagi Usaha Mikro Kecil – Go Digital dan Go Export melalui Dukungan *International Creatives Exchange* (ICE)” diselenggarakan pada 12 Desember 2025 di Jakarta. FGD ini bertujuan mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam memperluas akses pembiayaan syariah serta mendorong transformasi UMK melalui pemanfaatan teknologi digital dan penguatan akses pasar ekspor.

Diskusi juga menyoroti peran ICE dalam mendukung peningkatan

kapasitas pelaku UMK, termasuk pengembangan produk, pemasaran digital, serta penguatan jaringan perdagangan internasional.

3.9.16 Launching Komunitas UMKM “FULUS (Fintech & UMKM Jalan Terus)” AFTECH

Gambar 3.32 Kegiatan peluncuran komunitas UMKM berbasis fintech



Kegiatan Launching Komunitas UMKM “FULUS (Fintech & UMKM Jalan Terus)” diselenggarakan pada 21 Februari 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta oleh Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) sebagai upaya memperkuat pemberdayaan UMKM melalui pemanfaatan layanan teknologi finansial. Inisiatif ini bertujuan menjawab tantangan rendahnya literasi keuangan, keterbatasan akses pembiayaan, serta kebutuhan pengelolaan keuangan usaha yang lebih baik bagi pelaku UMKM.

Kegiatan ini dihadiri oleh 51 peserta yang terdiri dari pelaku UMKM, akademisi, dan perwakilan perusahaan fintech anggota AFTECH. Acara juga dirangkaikan dengan Diskusi Panel Interaktif bertema “Pemberdayaan UMKM melalui Perencanaan Keuangan dan *Wealth Management*” yang bertujuan meningkatkan literasi keuangan pelaku usaha serta memperkuat pemanfaatan solusi fintech dalam pengelolaan usaha. Sebagai hasil kegiatan, dilakukan peresmian Komunitas FULUS sebagai wadah kolaborasi antara pelaku UMKM dan industri fintech guna memperkuat ekosistem ekonomi digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

3.9.17 Fintech Talk SIJITU – “Revolutionizing RegTech Compliance for a Secure Digital Finance Ecosystem”

Gambar 3.33 Kegiatan forum diskusi fintech terkait RegTech dan keuangan digital



Kegiatan Fintech Talk SIJITU dengan tema “*Revolutionizing RegTech Compliance for a Secure Digital Finance Ecosystem*” diselenggarakan pada 27 Februari 2025 di JS Luwansa Hotel, Jakarta oleh AFTECH bekerja sama dengan SIJITU sebagai forum diskusi untuk memperkuat tata kelola industri fintech yang sehat, patuh, dan berorientasi pada perlindungan konsumen. Forum ini dihadiri oleh 57 peserta yang terdiri dari perusahaan

fintech anggota AFTECH, penyedia solusi teknologi kepatuhan, serta pemangku kepentingan industri keuangan digital. Diskusi membahas perkembangan solusi *Regulatory Technology* (RegTech) dalam mendukung pemenuhan kewajiban regulasi, penguatan sistem anti-fraud dan anti pencucian uang, serta strategi industri dalam merespons dinamika regulasi sektor keuangan digital. Kegiatan ini menghasilkan peningkatan pemahaman industri terhadap peran strategis RegTech serta memperkuat sinergi antara penyedia teknologi dan pelaku industri dalam mendorong ekosistem keuangan digital yang aman dan terpercaya.

3.9.18 Forum Ekonomi & Keuangan Digital 2025

Gambar 3.34 Kegiatan forum ekonomi dan keuangan digital



AFTECH bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Forum Ekonomi & Keuangan Digital 2025 dengan tema “Dari Strategi ke Eksekusi: Transformasi Digital Nasional dan Sinergi Ekosistem Usaha Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8%” pada 4 Juli 2025 di Auditorium Plaza Mandiri Lantai 3, Jakarta. Forum ini bertujuan memperkuat dialog strategis antara pemerintah dan pelaku industri dalam mendukung transformasi ekonomi

digital nasional serta percepatan pertumbuhan ekonomi menuju target 8%.

Kegiatan ini dihadiri oleh 70 peserta yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga, regulator, asosiasi industri, pelaku usaha ekosistem digital, serta mitra strategis nasional. Diskusi menyoroti prioritas transformasi digital nasional dalam RPJMN 2025–2029, termasuk digitalisasi layanan publik, penguatan GovTech, serta perluasan inklusi keuangan berbasis teknologi. Salah satu fokus utama forum ini adalah pengenalan inisiatif Digital x *Real Sector Launchpad* sebagai upaya kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk meningkatkan produktivitas sektor riil melalui pemanfaatan teknologi digital.

3.9.19 Launching Kampanye Nasional Waspada Penipuan dan Keuangan Ilegal & 2nd Indonesia Digital Bank Summit (IDBS) 2025

Gambar 3.35 Kegiatan Indonesia Digital Bank Summit (IDBS) 2025



AFTECH bersama OJK dan Satgas PASTI menyelenggarakan rangkaian kegiatan Launching Kampanye Nasional “Berantas Scam dan Aktivitas Keuangan Ilegal”, *Seminar Internasional “Preventing and Combating Financial Scams”*, serta 2nd *Indonesia Digital Bank Summit (IDBS) 2025* pada 19 Agustus 2025 di Hotel Raffles, Jakarta. Forum ini merupakan bagian dari agenda tahunan Indonesia Digital Bank Summit (IDBS) yang berfungsi

sebagai platform dialog kebijakan dan kolaborasi antara regulator, industri perbankan digital, perusahaan fintech, akademisi, serta mitra internasional dalam mendukung transformasi sektor keuangan digital. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 500 peserta dari berbagai pemangku kepentingan sektor keuangan digital.

3.9.20 Bulan Fintech Nasional (BFN) 2025

Gambar 3.36 Kegiatan Bulan Fintech Nasional (BFN) 2025



Bulan Fintech Nasional (BFN) 2025 merupakan inisiatif nasional yang diselenggarakan oleh AFTECH bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, kementerian / lembaga, serta pelaku industri fintech dalam rangka memperkuat literasi dan inklusi keuangan digital di Indonesia. Rangkaian kegiatan berlangsung pada 11 November (Hari Fintech Nasional) hingga 12 Desember 2025 (Hari Belanja Online Nasional). BFN 2025

mengusung tema “Kolaborasi Tanpa Batas: Transformasi Fintech dalam Mewujudkan Ekonomi yang Inklusif” dengan berbagai program yang mencakup dialog kebijakan, industry roundtable, peluncuran white paper, promosi produk fintech, edukasi literasi keuangan, serta business matching antara pelaku industri dan investor. Program ini melibatkan lebih dari 100 perusahaan fintech serta menghadirkan lebih dari 150 kegiatan literasi dan promosi, dengan potensi jangkauan lebih dari 10 juta masyarakat Indonesia.

3.9.21 Sisberdaya dan Disberdaya 2025 oleh DANA

Gambar 3.37. Kegiatan program SisBerdaya dan Disberdaya oleh DANA



DANA berupaya untuk selalu berkomitmen dalam membuka akses dan peluang bagi pelaku usaha perempuan untuk naik kelas di era digital. Program SisBerdaya dan DisBerdaya 2025 menjadi salah satu implementasi nyata dari komitmen tersebut, sekaligus strategi untuk menjembatani kesenjangan digital di kalangan pelaku UMKM perempuan di seluruh Indonesia.

Program ini menghadirkan rangkaian pelatihan, pendampingan, serta kompetisi bisnis yang mendorong peningkatan kapasitas, literasi digital, dan daya saing UMKM perempuan. Program SisBerdaya dan DisBerdaya 2025 berhasil menjaring lebih dari 5.000 peserta UMKM perempuan dari berbagai daerah di Indonesia, yang kemudian diseleksi hingga menghasilkan 35 pemenang terbaik.

3.9.21 Mastercard Strive oleh Mastercard Center for Inclusive Growth

Gambar 3.38 Kegiatan pelatihan UMKM dalam program Mastercard Strive



Program *Mastercard Strive* bertujuan memperkuat kapasitas usaha mikro dan kecil (UMK), khususnya milik perempuan, melalui peningkatan literasi keuangan, akses layanan keuangan formal, serta pemanfaatan teknologi digital. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan 8 pemerintah kabupaten di 5 provinsi serta pelatihan bagi 150 fasilitator lokal di 13 kabupaten. Melalui kolaborasi dengan 29 lembaga jasa keuangan, program ini telah menjangkau 534.000 UMK (74%

perempuan) melalui pelatihan literasi keuangan dan pemasaran digital, mendorong 117.300 UMK mengakses produk keuangan formal, serta memfasilitasi 24.251 UMK memperoleh pembiayaan usaha dengan total nilai Rp 131 miliar.

3.9.22 Program Financial Inclusion for Women Entrepreneurs oleh Mercy Corps Indonesia

Gambar 3.39 Kegiatan pelatihan dan pendampingan perempuan pelaku UMKM



Program *Financial Inclusion for Women Entrepreneurs* diluncurkan pada 15 Oktober 2025 oleh DBS Foundation dan Bank DBS Indonesia sebagai inisiatif untuk meningkatkan kesehatan dan ketahanan keuangan perempuan pelaku usaha mikro dan kecil. Program ini menargetkan 40.000 perempuan pemilik dan/atau pengelola usaha mikro dan kecil di Kota Semarang, Surabaya, dan Medan hingga 30 September 2027.

Program ini menyediakan rangkaian pelatihan dan pendampingan yang mencakup literasi digital, manajemen keuangan usaha, keamanan siber (*cyber security*), akses terhadap produk dan layanan keuangan formal, serta pemasaran digital.

3.9.23 Penguatan Aspek Gender dalam Program Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Inklusif (EKI) Berbasis Kelompok Subsisten oleh Women's World Banking

Gambar 3.40 Kegiatan diskusi kelompok penguatan ekonomi dan keuangan inklusif berbasis gender



Program penelitian kebijakan dan asistensi teknis Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Inklusif (EKI) Berbasis Kelompok Subsisten yang responsif gender bertujuan merancang kerangka kerja ekonomi dan keuangan yang inklusif dengan lensa gender bagi kelompok masyarakat subsisten. Proyek ini melibatkan total 84 partisipan langsung dalam rangkaian FGD dan wawancara mendalam di 4 provinsi, dengan stakeholder Utama meliputi Bank Indonesia, OJK, Bappenas, Kemenko

Perekonomian, Kemenkop UKM, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Amarta, serta PT PNM (Mekaar).

3.9.24 Inisiatif Kesehatan Finansial Nasional dan Literasi Digital Generasi Muda (Bagian dari kunjungan Ratu Maxima) oleh Women's World Banking

Gambar 3.40 Kegiatan literasi keuangan generasi muda dalam program kesehatan finansial



Kegiatan ini fokus pada pemetaan kesehatan finansial generasi muda Indonesia di tengah masifnya digitalisasi keuangan, guna mengidentifikasi risiko seperti perilaku belanja impulsif dan ketergantungan pada pinjaman berisiko. Penyelenggaraan FGD eksklusif bersama Ratu Maxima sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial UNSGSA menghasilkan wawasan mendalam mengenai

perilaku keuangan digital anak muda. Inisiatif ini mendapatkan cakupan media nasional yang luas, memperkuat diskursus publik mengenai pentingnya perlindungan konsumen dan manajemen kesehatan finansial yang berkelanjutan.

3.9.25 BJB Goes To School

Gambar 3.41 Kegiatan edukasi keuangan melalui program BJB Goes To School



Kegiatan BJB Goes To School merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh bank bjb terkait Edukasi Keuangan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana yang mendukung Literasi dan Inklusi Keuangan dengan target peserta pelajar di Tingkat SD, SMP dan SMA di Indonesia. Pada Periode Tahun 2025 kegiatan BJB Goes to School telah diikuti oleh 80.646 (delapan puluh ribu enam ratus empat puluh enam) pelajar dari berbagai tingkatan sekolah seluruh Indonesia

terutama di wilayah yang terdapat jaringan kantor Bank BJB.

3.9.26 Bincang Jumat Bisnis

Gambar 3.41 Kegiatan pelatihan dan diskusi UMKM melalui Bincang Jumat Bisnis



Kegiatan yang dilakukan oleh Bank BJB secara rutin setiap hari Jumat dengan tujuan untuk memberdayakan pelaku UMKM melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan secara luring maupun daring. Sepanjang tahun 2025 kegiatan Bincang Jumat Bisnis telah diikuti oleh 3.168 (tiga ribu seratus enam puluh delapan) peserta pelaku UMKM yang tersebar di

wilayah Indonesia yang terdapat jaringan kantor bank bjb baik individu maupun kelompok yang menjalankan kegiatan usaha di berbagai sektor seperti kuliner, fashion, agribisnis, dan lainnya.

3.9.27 Cerdas Menabung untuk Indonesia Emas dan Gemilang (CEMERLANG) oleh Bank Jatim

Gambar 3.42 Kegiatan edukasi literasi keuangan bagi pelajar oleh Bank Jatim



Program edukasi literasi keuangan Cerdas Menabung untuk Indonesia Emas dan Gemilang (CEMERLANG) dilaksanakan oleh Bank Jatim Cabang Kediri pada 12 Agustus 2025 di Goa Selomangleng, Kota Kediri dan diikuti oleh siswa SMP swasta di Kota Kediri. Kegiatan ini diselenggarakan melalui sinergi dengan Pemerintah Kota Kediri, OJK Kediri, Dinas Pendidikan Kota Kediri, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kediri, serta Bank Indonesia.

Materi sosialisasi disampaikan secara interaktif melalui pemaparan, sesi tanya jawab, dan kegiatan edukatif bagi siswa untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya menabung, pengelolaan keuangan, serta pengenalan produk perbankan. Kegiatan ini juga memfasilitasi pembukaan 150 rekening Tabungan SimPel bagi para siswa.

3.9.28 TalkShow Edukasi/Literasi Keuangan “Gencarkan dan Hari Indonesia Menabung Bersama Bank Jatim”

Gambar 3.43 Kegiatan talkshow literasi keuangan bagi pelajar



Kegiatan Talk Show Edukasi/Literasi Keuangan dilaksanakan oleh Bank Jatim Cabang Bangkalan pada 13 Juni 2025 di Aula SMK Negeri 2 Bangkalan bersama SMP dan SMK Kanzul Ulum dalam rangka mendukung program Gencarkan dan Hari Indonesia Menabung. Narasumber dalam kegiatan ini terdiri dari Pimpinan Cabang Bank Jatim Bangkalan, Pengasuh Pondok Pesantren Kanzul Ulum, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan. Melalui kegiatan ini para siswa memperoleh

pemahaman mengenai pentingnya budaya menabung sejak dini, pengenalan lembaga keuangan dan transaksi perbankan, serta pengelolaan keuangan secara sederhana. Kegiatan ini juga memfasilitasi pembukaan 900 rekening Tabungan SimPel bagi siswa serta pemberian apresiasi kepada peserta melalui lomba dan sesi interaktif.

3.9.29 Mandiri Mikro Fest (MMF) 2025

Gambar 3.44 Kegiatan Mandiri Mikro Fest (MMF) 2025



Mandiri Mikro Fest (MMF) 2025 merupakan program pemberdayaan pelaku usaha mikro yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri untuk memperkuat kapasitas usaha serta mendorong UMKM naik kelas melalui kurasi, pelatihan, dan pendampingan bisnis. Program ini dilaksanakan di tiga kota yaitu Medan, Surabaya, dan Jakarta sebagai pusat aktivitas ekonomi mikro. Melalui rangkaian kegiatan festival UMKM, pelatihan,

mentoring, serta presentasi rencana pengembangan usaha, Bank Mandiri memberikan pendampingan intensif kepada pelaku usaha mikro agar mampu meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, serta mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

3.9.30 BSI International Expo 2025

Gambar 3.45 Kegiatan Mandiri Mikro Fest (MMF) 2025



BSI International Expo 2025 diselenggarakan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) pada 26–29 Juni 2025 di Jakarta Convention Center (JCC) Hall A dan B, Jakarta dengan mengusung tema “*Engaging Indonesia in the Global Halal Industry.*” Kegiatan ini bertujuan memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah serta mendorong penguatan ekosistem industri halal nasional dan global melalui pameran, seminar ekonomi

syariah, talkshow, serta kegiatan business matching antara pelaku usaha dan investor.

3.9.31 FinExpo – Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025

Gambar 3.46 Kegiatan FinExpo dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan 2025



FinExpo – Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 23 – 26 Oktober 2025 di Tunjungan Plaza, Surabaya sebagai puncak rangkaian Bulan Inklusi Keuangan 2025 yang bertujuan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui edukasi, konsultasi, serta akses langsung terhadap produk dan layanan keuangan. Sepanjang pelaksanaan BIK 2025, tercatat 5.182 kegiatan literasi dan

inklusi keuangan yang menjangkau 10,87 juta peserta, serta menghasilkan pembukaan berbagai akses layanan keuangan seperti 3,55 juta rekening perbankan, 951 ribu polis asuransi, 643 ribu rekening pasar modal, dan 5,01 juta rekening pegadaian.

3.9.32 Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Provinsi Jawa Tengah 2025 “JATENG JAWARA”

Gambar 3.47 Kegiatan puncak Bulan Inklusi Keuangan Jawa Tengah 2025



Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Jawa Tengah 2025 “JATENG JAWARA (Jawa Tengah Jangkau Warga Optimalkan Akses Keuangan)” diselenggarakan oleh OJK Provinsi Jawa Tengah pada 2 November 2025 di Halaman Gradhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang.

Kegiatan ini menjadi puncak rangkaian BIK 2025 di Jawa Tengah yang bertujuan meningkatkan literasi dan memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat. Sepanjang pelaksanaannya tercatat lebih dari 800 kegiatan edukasi yang menjangkau sekitar 164.000 peserta serta menghasilkan 176.288 pembukaan rekening baru.

3.9.33 Perkuat Kolaborasi untuk Mendorong Digitalisasi Ekosistem

Gambar 3.48 Kegiatan puncak Bulan Inklusi Keuangan Jawa Tengah 2025



ILO dan OJK meluncurkan Program Digitalisasi Ekosistem Sapi Perah di Malang, Jawa Timur, untuk meningkatkan inklusi keuangan dan efisiensi koperasi dengan menghubungkan peternak sapi perah, koperasi, dan lembaga keuangan melalui sistem digital terintegrasi.

Program ini memperkenalkan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) yang mengintegrasikan fungsi-fungsi

utama koperasi, mulai dari pengumpulan susu, logistik, keuangan, hingga kesehatan hewan, ke dalam satu pelantar digital yang transparan. Sistem ini juga akan terhubung dengan Penyelenggara Kredit Alternatif (PKA) dan Penyelenggara Agregator Jasa Keuangan (PAJK), sehingga lembaga keuangan dapat menilai risiko dengan lebih baik dan memperluas akses pembiayaan bagi peternak kecil.

04

PENINGKATAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Halaman ini sengaja dikosongkan

Sebagaimana kita ketahui di era saat ini, dinamika geopolitik global menunjukkan tingkat ketidakpastian yang semakin meningkat. Ketegangan geopolitik, konflik antarnegara, gangguan rantai pasok global, serta fluktuasi harga energi dan pangan telah memberikan tekanan yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi di dunia. Gambaran tersebut berdampak pada meningkatnya volatilitas pasar keuangan global dan menurunnya tingkat kepercayaan investor terhadap sistem keuangan konvensional dimana sangat bergantung pada instrumen berbasis spekulasi dan suku bunga. Di tengah kondisi ketidakpastian geopolitik tersebut, industri keuangan syariah justru menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan pertumbuhan yang positif. Sistem keuangan syariah yang didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan berbagi risiko (*risk sharing*) dinilai dapat mampu menghadapi gejolak ekonomi global dibandingkan sistem keuangan konvensional yang berbasis risk transfer. Prinsip larangan riba (tambahan), *gharar* (transaksi yang tidak jelas), dan maysir (transaksi yang mengandung unsur perjudian) menjadikan aktivitas keuangan syariah lebih terhubung dengan sektor riil, dinilai dapat menciptakan stabilitas yang lebih kuat dalam menghadapi ketidakpastian global.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia turut berperan penting dalam perkembangan industri keuangan syariah global. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia berhasil memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah melalui pengembangan perbankan syariah, pasar modal syariah, serta integrasi dengan industri halal nasional. Hal ini tercermin dalam laporan *State of the Global Islamic Economy* (SGIE) Report 2024/2025 yang diterbitkan oleh lembaga riset internasional Dinar Standard bekerja sama dengan berbagai institusi global ekonomi Islam. Dalam laporan tersebut, Indonesia berhasil mempertahankan peringkat ketiga dunia dalam ekonomi syariah global, berada di bawah Malaysia dan Arab Saudi. Pencapaian ini menunjukkan konsistensi Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekosistem ekonomi syariah yang kuat dan terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan dalam satu dekade terakhir, posisi Indonesia mengalami peningkatan signifikan dari peringkat 10–11 pada awal peluncuran indeks menjadi peringkat 3 pada periode 2023–2025.

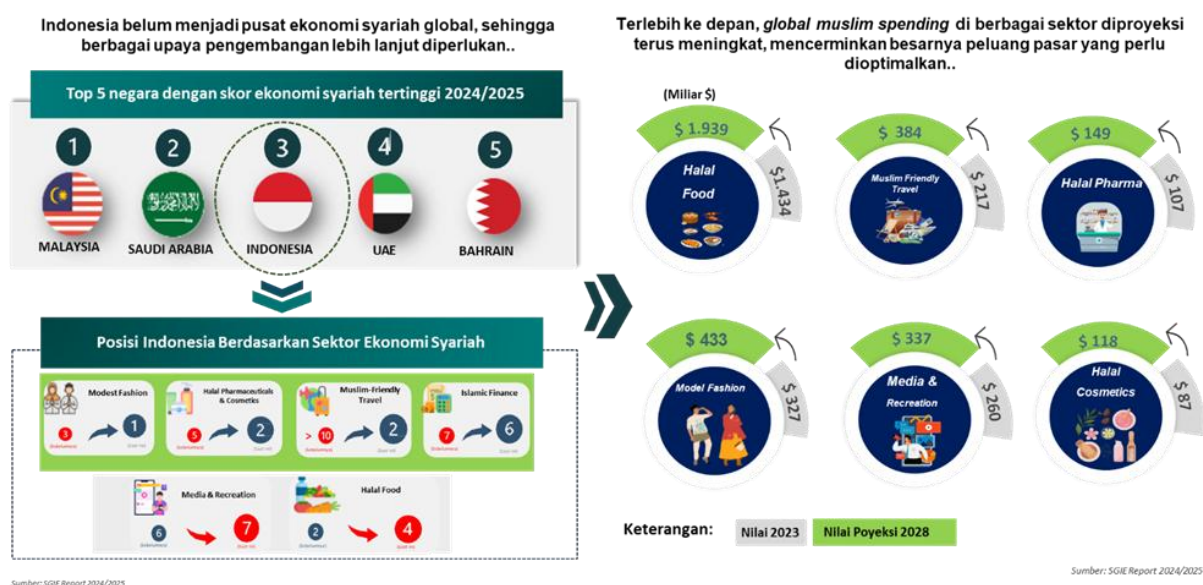
Grafik 4.1 Peringkat Indonesia dalam SGIE Reports (2018-2025)



Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari pertumbuhan berbagai sektor ekonomi syariah yang menjadi indikator penilaian dalam SGIE. Laporan ini mengevaluasi tujuh sektor utama ekonomi Islam global, yaitu makanan halal, keuangan syariah, pariwisata ramah muslim, modest fashion, kosmetik dan farmasi halal, media dan rekreasi halal, serta investasi halal. Kombinasi perkembangan sektor-sektor tersebut menunjukkan integrasi antara industri halal dan sistem keuangan syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Secara sektoral, Indonesia menunjukkan kinerja yang sangat kompetitif pada beberapa bidang strategis. Indonesia menempati peringkat pertama dunia dalam sektor modest fashion, mencerminkan kuatnya industri kreatif berbasis busana muslim yang didukung oleh inovasi desainer lokal serta ekspansi pasar global. Selain itu, Indonesia juga berada pada peringkat kedua dunia dalam sektor pariwisata ramah muslim serta kosmetik dan farmasi halal, yang menunjukkan meningkatnya daya saing industri halal nasional di pasar internasional.

Di sisi lain, sektor keuangan syariah Indonesia masih berada pada peringkat keenam dunia, yang menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan industri keuangan syariah cukup pesat, kontribusinya terhadap ekonomi global masih perlu ditingkatkan melalui penguatan regulasi, inovasi produk, serta integrasi dengan sektor industri halal. Sementara itu, sektor makanan halal berada pada peringkat keempat dan sektor media serta rekreasi halal pada peringkat ketujuh secara global. Selain pencapaian dalam indeks global, Indonesia juga menunjukkan perkembangan signifikan dalam investasi ekonomi halal. Dalam SGIE Report 2024/2025 tercatat bahwa Indonesia menjadi salah satu pusat investasi industri halal terbesar di dunia, dengan sekitar 40 transaksi investasi senilai USD 1,6 miliar pada tahun 2023 di berbagai sektor seperti makanan halal, kosmetik, farmasi, teknologi halal, dan gaya hidup muslim. Pencapaian tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor global terhadap ekosistem ekonomi syariah Indonesia.

Gambar 4.1 Perbandingan posisi ekonomi syariah Indonesia terhadap global



Sumber: SGIE Report 2024-2025

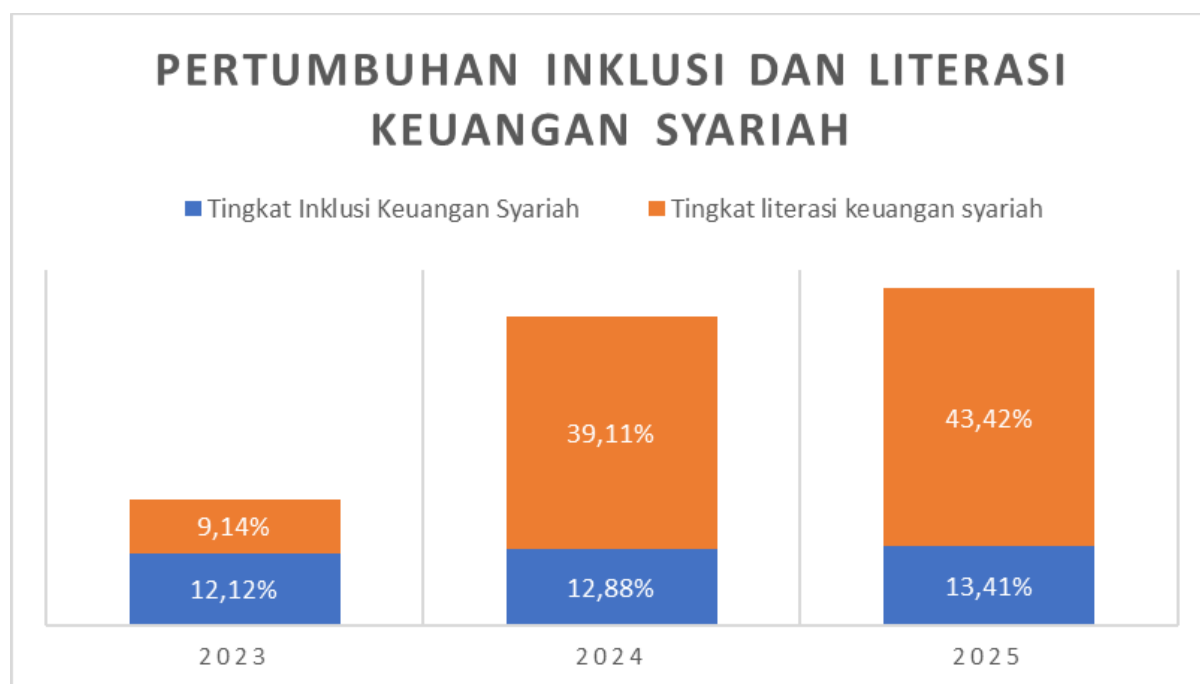
Berbagai kemajuan tersebut didukung oleh kolaborasi dan kebijakan strategis Pemerintah baik pusat maupun daerah, antara lain penguatan ekosistem halal nasional, percepatan

penerbitan sertifikasi halal, pengembangan kawasan industri halal, serta integrasi antara industri halal dan keuangan syariah. Disisi lain, Indonesia memiliki keunggulan demografis sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia yang menjadi potensi pasar sekaligus basis pengembangan ekonomi syariah. Dengan berbagai capaian tersebut, SGIE Report 2025 menegaskan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global di masa depan. Namun demikian, untuk mencapai posisi tersebut, Indonesia masih perlu meningkatkan kapasitas akses keuangan syariah seperti ekspor produk halal, memperkuat sektor keuangan syariah, serta memperluas integrasi antara industri halal, keuangan syariah, dan ekonomi digital.

4.1 Kondisi Keuangan Syariah di Indonesia

Perkembangan inklusi keuangan syariah di Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan tren yang positif meskipun masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Inklusi keuangan syariah merupakan bagian penting dari strategi pembangunan sistem keuangan nasional yang bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Upaya tersebut juga sejalan dengan agenda pembangunan ekonomi inklusif yang menempatkan sektor keuangan sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia mencapai 43,42%, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 39,11%. Namun demikian, tingkat inklusi keuangan syariah masih berada pada kisaran sekitar 13%, menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah masih relatif terbatas dibandingkan sektor keuangan konvensional.

Grafik 4.2. Pertumbuhan inklusi dan literasi keuangan syariah



Sumber: SNLIK 2023-2025 (diolah)

Gambaran tersebut memperlihatkan adanya *gap* atau kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan syariah, yang mana pemahaman masyarakat terhadap konsep dan produk keuangan syariah meningkat lebih cepat dibandingkan pemanfaatannya secara nyata. Dengan kata lain, meskipun masyarakat semakin memahami prinsip keuangan syariah, belum seluruhnya memanfaatkan layanan tersebut dalam aktivitas keuangan sehari-hari. Di sisi lain, perkembangan industri keuangan syariah nasional menunjukkan kinerja yang cukup kuat dan menjadi faktor pendukung peningkatan inklusi. Hingga pertengahan tahun 2025, total aset industri keuangan syariah nasional mencapai sekitar Rp2.972,94 triliun dengan pangsa pasar sekitar 11,47% dari total industri keuangan nasional. Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah. Pertumbuhan tersebut juga didukung oleh kinerja sektor perbankan syariah yang terus meningkat. Pada tahun 2025, aset perbankan syariah bahkan telah melampaui Rp1.000 triliun, menandai tonggak penting dalam perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia.

Selain itu, pemerintah dan regulator terus mendorong peningkatan inklusi keuangan syariah melalui berbagai program strategis, seperti penguatan ekosistem halal, pengembangan keuangan sosial syariah (zakat, wakaf, dan infak), serta kampanye edukasi nasional seperti Gerakan Nasional Literasi Keuangan dan program GERAK Syariah (Gebyar Ramadhan Keuangan Syariah) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan industri. Program-program tersebut bertujuan memperluas akses masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan kelompok masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga keuangan formal. Meskipun demikian, tantangan dalam pengembangan inklusi keuangan syariah masih cukup besar. Beberapa kendala utama antara lain rendahnya penetrasi produk keuangan syariah di daerah, keterbatasan jaringan lembaga keuangan syariah, serta masih terbatasnya inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan inklusi keuangan syariah memerlukan sinergi antara regulator, industri keuangan, lembaga pendidikan, serta organisasi keagamaan dalam memperkuat literasi, inovasi produk, dan akses layanan keuangan syariah. Dengan berbagai upaya tersebut, inklusi keuangan syariah diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan di Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat global.

4.2 Kolaborasi Pengembangan Keuangan Syariah

4.2.1 East Java Halal Industry Festival 2025

Gambar 4.2 Kegiatan EJHIF 2025 di Surabaya



Kegiatan *East Java Halal Industry Festival* (EJHIF) 2025 diselenggarakan sebagai bentuk dukungan nyata terhadap penguatan ekosistem industri halal, sekaligus mendorong posisi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara yang berperan sebagai pusat inovasi, produksi, dan perdagangan produk halal yang berdaya saing global. Kegiatan ini dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 21 November 2025.

Rangkaian kegiatan dalam festival ini meliputi *talkshow* tematik mengenai pengembangan industri halal, pameran produk halal, layanan konsultasi sertifikasi halal, serta fasilitasi akses ekspor bagi pelaku usaha. Kegiatan tersebut diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain pelaku industri, terutama Industri Kecil dan Menengah (IKM), akademisi, lembaga pendamping halal, komunitas pengembangan produk halal, serta calon eksportir yang berupaya memperluas pasar produknya ke tingkat internasional.

4.2.2 One Pesantren One Product (OPOP) Expo 2025

Gambar 4.3 One Pesantren One Product (OPOP) Expo 2025 di Jawa Timur



Program *One Pesantren One Product* (OPOP) merupakan inisiatif pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pondok pesantren yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan kapasitas santri, pesantren, dan alumni pesantren dalam kegiatan kewirausahaan. Program ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2020 tentang *One Pesantren One Product*.

Sebagai bagian dari implementasi program tersebut, kegiatan OPOP Expo diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 13–16 November 2025. Dalam kegiatan ini ditampilkan sebanyak 35 stan produk unggulan yang berasal dari pelaku usaha berbasis pesantren, meliputi santripreneur, pesantrenpreneur, dan sociopreneur. Selain pameran produk, rangkaian kegiatan juga mencakup berbagai agenda pendukung seperti *talkshow*, *workshop* digitalisasi pemasaran, serta layanan Klinik OPOP yang memberikan fasilitasi konsultasi bisnis dan pembiayaan bagi pelaku usaha pesantren.

4.2.3 Pelatihan Peningkatan Akses Dan Literasi Keuangan Bagi UMKM

Gambar 4.4 Kegiatan pelatihan literasi dan akses keuangan bagi UMKM



Kegiatan Pelatihan Peningkatan Akses dan Literasi Keuangan bagi UMKM dilaksanakan sebagai upaya untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha dalam mengelola keuangan serta meningkatkan akses terhadap layanan pembiayaan. Kegiatan ini diselenggarakan di berbagai wilayah di Jawa Timur, antara lain di Madiun, Ponorogo, Blitar, Trenggalek, Kediri, Nganjuk, Surabaya, Malang, Probolinggo, Pasuruan, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dan Jember selama bulan November hingga Desember 2025.

Dalam kegiatan ini, para pelaku UMKM memperoleh materi yang komprehensif, meliputi pengelolaan dan perencanaan keuangan usaha, pemenuhan aspek perizinan usaha, strategi pemasaran digital, serta pengenalan berbagai alternatif pembiayaan baik melalui skema konvensional maupun syariah.

4.2.4 Seminar Daging Halal

Gambar 4.5 Kegiatan Seminar daging halal Bank Jateng Syariah



Bank Jateng Unit Usaha Syariah turut berperan dalam memperluas akses inklusi keuangan bagi pelaku UMKM yang bergerak di sektor peternakan ruminansia dan perdagangan daging hewan. Upaya tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Dinas Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, civitas akademika dalam pengembangan inkubator bisnis UKM,

Rumah Potong Hewan (RPH) binaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), serta Toros Farm yang telah memiliki sertifikasi halal.

Dalam rangka mendukung penguatan pemahaman mengenai pentingnya aspek kehalalan dan keamanan pangan, diselenggarakan kegiatan Seminar Daging Halal di Semarang pada tanggal 23 Mei 2025 dengan tema “Urgensi Daging Halal bagi Kesehatan dan Perlindungan Pelanggan”, serta pada 18 Juni 2025 dengan tema “Standar Syariah, Keamanan Pangan, dan Kesehatan Konsumen”. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha dan masyarakat mengenai pentingnya penerapan standar halal, keamanan pangan, serta kualitas gizi dalam rantai usaha daging halal, sekaligus memperkuat

akses pelaku UMKM terhadap layanan keuangan syariah untuk mendukung pengembangan usaha.

4.2.5 Kuliah Tamu BSI terkait Literasi Keuangan Syariah

Gambar 4.6 Kegiatan kuliah tamu literasi keuangan syariah bersama Bank Syariah Indonesia



Kegiatan kuliah tamu mengenai literasi keuangan syariah diselenggarakan oleh Bank Syariah Indonesia sebagai bagian dari upaya peningkatan pemahaman generasi muda terhadap sistem keuangan syariah. Kegiatan ini dilaksanakan pada 10 Februari 2025 dan melibatkan beberapa perguruan tinggi di Jawa Timur, yaitu

Universitas Trunojoyo Madura, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Kuliah tamu tersebut dihadiri oleh pimpinan perguruan tinggi, termasuk rektor, serta diikuti oleh mahasiswa dari berbagai program studi. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai konsep dasar keuangan syariah, perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia, serta peluang pemanfaatan layanan keuangan syariah dalam mendukung aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.

4.2.6 Literasi Keuangan Syariah dalam bentuk Sosialisasi Jasa Keuangan Syariah

Gambar 4.7 Kegiatan sosialisasi jasa keuangan syariah



Kegiatan Sosialisasi Jasa Keuangan Syariah diselenggarakan dengan tema "Mendukung Pemberdayaan Ekonomi serta Peningkatan Inklusi Keuangan bagi Pemuda, Perempuan, dan UMKM Warga Muhammadiyah." Kegiatan ini dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tanggal 18 November 2025 dan diikuti oleh sebanyak 61 peserta.

Peserta kegiatan berasal dari berbagai latar belakang, antara lain perwakilan industri jasa keuangan, mahasiswa dan akademisi, serta pelaku UMKM binaan Muhammadiyah di Surakarta. Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai layanan dan produk jasa keuangan syariah, sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pemuda, perempuan, dan pelaku UMKM.

4.2.7 Sosialisasi terkait Edukasi Keuangan pada Lembaga Pendidikan

Gambar 4.8 Kegiatan edukasi keuangan pada lembaga pendidikan



Kegiatan Edukasi Inklusi Keuangan pada Lembaga Pendidikan merupakan bagian dari upaya mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di lingkungan lembaga pendidikan, khususnya pesantren. Kegiatan ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Al Hasaniyyah yang berlokasi di Provinsi Banten pada tanggal 10 Januari 2025.

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan kolaborasi dengan berbagai mitra dalam kerangka Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), yaitu Askrindo, Askrindo Syariah, Pegadaian Syariah, Bank BJB, Perum BULOG, serta Wuling Motors. Dalam kegiatan ini, para mitra turut memberikan pemaparan mengenai berbagai produk dan layanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pesantren, mulai dari akses pembiayaan, perlindungan usaha, hingga dukungan terhadap kegiatan ekonomi produktif.

Melalui kegiatan edukasi ini, diharapkan para santri, pengelola pesantren, dan masyarakat sekitar dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan keuangan serta pemanfaatan layanan keuangan formal. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana penguatan kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong perluasan akses keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pesantren.

4.2.8 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keuangan Syariah

Gambar 4.9 Kegiatan monitoring dan evaluasi keuangan syariah di Universitas Tazkia



Kegiatan Kunjungan Pelaksanaan Monitoring pada Segmen Keuangan Syariah dilaksanakan di Universitas Tazkia, Sentul pada Kamis, 18 Desember 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan literasi dan inklusi keuangan syariah di lingkungan

perguruan tinggi, sekaligus mengidentifikasi peluang kolaborasi antara pemerintah dan institusi akademik dalam mendukung penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.

Melalui kegiatan ini teridentifikasi sejumlah potensi kerja sama yang dapat dikembangkan, antara lain penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi di bidang keuangan syariah, penguatan program penelitian dan pengabdian masyarakat terkait literasi keuangan syariah, pengembangan program magang mahasiswa, serta peluang kolaborasi kegiatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

4.2.9 Global Islamic Finance Summit (GIFS)

Gambar 4.10 Kegiatan Global Islamic Finance Summit (GIFS)



Dalam rangka mendukung pencapaian target peningkatan posisi Indonesia pada *Global Islamic Economy Index* (GIEI) dalam laporan *State of the Global Islamic Economy Report* (SGIE), dilaksanakan BSI Global Islamic Finance Summit (GIFS) 2025. Kegiatan ini mengangkat tema “Transformative Islamic Finance as Catalyst for Growth”

dengan tujuan mengakselerasi pengembangan keuangan syariah. Kegiatan GIFS 2025 diikuti sekitar 1.500 peserta dan mencatat peningkatan pemanfaatan produk keuangan syariah sebanyak 453 pengguna sebagai bagian dari Upaya perluasan inklusi keuangan syariah.

4.2.10 Festival Ramadhan Gerakan Menuju EMAS (Ekonomi Masyarakat Aceh Sejahtera)

Gambar 76. Kegiatan Festival Ramadhan Gerakan Menuju Ekonomi Masyarakat Aceh Sejahtera



Dalam rangka mendukung penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah di lingkungan pendidikan keagamaan, telah dilaksanakan kegiatan Seminar Santripreneur sebagai bagian rangkaian kegiatan Gerakan Menuju EMAS (Ekonomi Masyarakat Aceh Sejahtera) pada tanggal 23 Maret 2025 di Ma'had Daarut Tahfidz Al-Ikhlas. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para santri dalam

mengembangkan jiwa kewirausahaan serta mendorong pengelolaan keuangan yang baik, efektif, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Melalui kegiatan ini, para santri diberikan edukasi terkait dasar-dasar kewirausahaan, pengelolaan keuangan sederhana, serta pentingnya penerapan prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi. Penguatan kapasitas ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya generasi muda yang mandiri secara ekonomi dan memiliki literasi keuangan syariah yang memadai.

05

TANTANGAN DAN REKOMENDASI

Halaman ini sengaja dikosongkan

5.1 Tantangan

5.1.1 Pokja 1: Edukasi Keuangan

Kegiatan edukasi keuangan yang dilaksanakan oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah saat ini belum dapat optimal dalam menetapkan segmen prioritas, khususnya bagi komunitas difabel, penerima bantuan sosial, masyarakat di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), masyarakat pedesaan, serta Pekerja Migran Indonesia. Rendahnya tingkat inklusi pada segmen tersebut dipengaruhi pula oleh kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur digital yang menghambat pemerataan akses informasi. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesenjangan signifikan di mana angka inklusi keuangan tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan tingkat literasi keuangan masyarakat. Fenomena tersebut menimbulkan risiko bagi masyarakat yang menggunakan produk keuangan tanpa pemahaman memadai terhadap mitigasi risiko dan perlindungan konsumen.

Selain itu, maraknya figur publik atau *influencer* keuangan yang kurang kredibel di media sosial menambah kompleksitas tantangan dalam memberikan edukasi yang akurat dan objektif bagi publik. Sementara itu, dari sisi pendidikan formal, Pokja Edukasi masih menghadapi kendala strategis berupa belum terintegrasinya materi literasi keuangan secara formal ke dalam kurikulum di sekolah umum maupun sekolah berbasis agama. Hal ini menyebabkan generasi muda belum memiliki bekal pengetahuan finansial yang berkualitas sebagai landasan kemandirian ekonomi.

5.1.2. Pokja 2: Hak Properti Masyarakat

Pelaksanaan berbagai program di Kelompok Kerja Hak Properti Masyarakat telah menunjukkan hasil yang memuaskan yang mana masing-masing Kementerian dan Lembaga yang terlibat di akhir 2025 ini telah mencapai target yang ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan khususnya dalam mensinergikan program antar Kementerian/Lembaga sebagai satu kesatuan dalam Kelompok Kerja, alih-alih menjadi program entitas Kementerian/Lembaga masing-masing yang terkompilasi dalam wadah Kelompok Kerja. Oleh sebab itu, sejalan dengan rencana transformasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan diatas, Kelompok Kerja Hak Properti Masyarakat yang sebelumnya lebih berfokus pada pensertifikatan lahan, akan turut bertransformasi menjadi Kelompok Kerja Penguatan Ekonomi Masyarakat sehingga diharapkan transformasi ini akan memperkuat sinergi dan kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga agar semakin searah sesuai dengan tujuan Kelompok Kerja yang baru yaitu penguatan ekonomi masyarakat.

5.1.3 Pokja 3: Fasilitasi Intermediasi dan Saluran Distribusi

Capaian Kelompok Kerja Fasilitasi Intermediasi dan Saluran Distribusi menunjukkan kinerja yang sangat baik secara keseluruhan. Hal tersebut tercermin dari tingginya tingkat realisasi berbagai program yang diarahkan pada peningkatan akses dan kepemilikan masyarakat terhadap layanan keuangan formal secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) masih menghadapi sejumlah tantangan dan kendala dalam mendorong peningkatan intermediasi serta penguatan saluran distribusi keuangan di daerah. Salah satu tantangan utama adalah belum optimalnya sinergi

dan koordinasi antar pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, otoritas keuangan, maupun lembaga jasa keuangan, sehingga pelaksanaan kebijakan dan program belum sepenuhnya berjalan secara efektif.

Pada aspek intermediasi, kendala yang dihadapi antara lain masih terbatasnya akses pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terhadap pembiayaan formal. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya kapasitas dan literasi keuangan pelaku usaha serta keterbatasan agunan yang dimiliki. Sementara itu, dalam penguatan saluran distribusi, tantangan yang dihadapi meliputi belum meratanya infrastruktur dan jaringan layanan keuangan, terutama di wilayah terpencil dan tertinggal. Di samping itu, pemanfaatan layanan keuangan digital serta pengembangan agen laku pandai juga masih belum optimal, yang disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur pendukung, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, serta terbatasnya jangkauan lembaga keuangan non-bank di beberapa wilayah.

5.1.4 Pokja 4: Pelayanan Keuangan Sektor Pemerintah

Secara umum capaian Kelompok Kerja Pelayanan Keuangan Sektor Pemerintah menunjukkan kinerja yang sangat baik, tercermin dari tingginya realisasi berbagai program elektronifikasi bantuan pemerintah, pembiayaan UMKM, serta digitalisasi transaksi pemerintah dan layanan publik. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala dan tantangan yang perlu menjadi perhatian ke depan, antara lain elektronifikasi bantuan pemerintah yang belum sepenuhnya nontunai, masih adanya gap antara target dan realisasi pada beberapa program strategis, belum optimalnya pemanfaatan layanan keuangan oleh penerima manfaat secara berkelanjutan, serta belum meratanya tingkat kematangan digitalisasi antar sektor dan daerah. Selain itu, integrasi ekosistem pembayaran pemerintah masih perlu diperkuat agar lebih interoperabel dan berdampak nyata, disertai dengan perlunya penguatan pengukuran kinerja yang tidak hanya berfokus pada output penyaluran, tetapi juga pada *outcome* berupa peningkatan kesejahteraan keuangan masyarakat dan kualitas layanan publik.

5.1.5 Pokja 5: Perlindungan Konsumen

Meskipun pelaksanaan kegiatan Pokja 5 Perlindungan Konsumen dalam kerangka SNKI Tahun 2025 menunjukkan capaian yang positif, masih terdapat kendala terkait dukungan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Selain itu, upaya penguatan perlindungan konsumen juga perlu didukung melalui pengembangan regulasi, peningkatan edukasi konsumen secara berkelanjutan, dan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor keuangan.

5.1.6 Pokja 6: Kebijakan dan Regulasi

Dengan adanya arahan Bapak Presiden terkait perubahan dari inklusi keuangan menjadi kesejahteraan keuangan adalah perluasan fokus kebijakan dari aspek akses terhadap produk dan layanan serta peningkatan literasi keuangan menuju pada pengelolaan keuangan rumah tangga yang lebih inklusif, resilien, dan berkelanjutan. Regulasi yang sebelumnya telah selesai harmonisasi berkaitan dengan peningkatan inklusi keuangan dan literasi keuangan perlu dilakukan penyesuaian/perubahan menjadi kesejahteraan keuangan. Oleh karena itu, payung hukum terkait perubahan DNKI menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) dan SNKI menjadi Strategi Nasional Kesejahteraan Keuangan (SNKK) harus segera diselesaikan.

5.1.7 Pokja 7: Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan

Pokja Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan dalam pelaksanaan kegiatannya menghadapi tantangan yaitu masih terbatasnya akses teknologi informasi pada sejumlah daerah, khususnya wilayah terisolir dan wilayah yang ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan baru. Banyak dari daerah tersebut belum didukung oleh infrastruktur digital yang memadai seperti jaringan internet, perangkat teknologi dan pendukung lainnya. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya implementasi layanan keuangan berbasis digital, rendahnya inklusi keuangan serta terbatasnya pemanfaatan teknologi dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu juga, masih kurang optimalnya sinergi dan integrasi antar Kementerian/Lembaga (K/L) yang tercermin dari belum selarasnya perencanaan, pelaksanaan, serta pertukaran data dan informasi, sehingga menghambat efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian target program/kegiatan.

5.1.8 Sekretariat

Kendala yang dihadapi Sekretariat DNKI antara lain perlunya penyesuaian mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan program lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, seperti terjadinya perubahan nomenklatur dan struktur kelembagaan pada sejumlah instansi dan belum optimalnya digitalisasi mekanisme penyampaian laporan TPAKD dan. Adapun tantangan yang dihadapi dalam memfasilitasi proses penguatan kelembagaan DNKI melalui penyesuaian kerangka regulasi serta mengawal penguatan fokus kebijakan menuju agenda kesejahteraan keuangan, dengan tetap memastikan koordinasi dan konsolidasi antar pemangku kepentingan berjalan efektif mendukung pelaksanaan program di tingkat pusat dan daerah.

5.2. Rekomendasi

5.2.1 Pokja 1

Sinkronisasi kegiatan edukasi antara Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah perlu dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan dengan memprioritaskan UMKM, masyarakat berpenghasilan rendah, dan masyarakat lintas kelompok melalui perhatian khusus pada komunitas difabel, penerima bantuan sosial, masyarakat di wilayah 3T, masyarakat pedesaan, dan Pekerja Migran Indonesia. Realisasi penyaluran KUR PMI sebesar 29,27% terhadap target tahun 2025 dapat terus dioptimalkan melalui penguatan sinergi lintas instansi, perluasan sosialisasi dan edukasi terintegrasi, serta akselerasi digitalisasi proses pengajuan dan verifikasi dokumen bagi calon pekerja migran. Penajaman fokus melalui sinergi lintas instansi ini krusial untuk memastikan program edukasi keuangan tepat sasaran, meminimalisir tumpang tindih kebijakan, serta memperluas jangkauan literasi ke lapisan masyarakat yang belum terlayani secara optimal. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara tingkat inklusi dan literasi keuangan nasional serta memitigasi risiko dari penyebaran informasi keuangan yang tidak kredibel di masyarakat.

Selanjutnya, untuk mengintegrasikan edukasi keuangan ke dalam sistem pendidikan nasional, diperlukan koordinasi strategis dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama melalui keterlibatan berbagai satuan kerja terkait. Kerja sama antar pemangku kepentingan ini merupakan langkah fundamental agar literasi keuangan dapat

diimplementasikan secara terstruktur sebagai kurikulum resmi, baik di sekolah umum maupun sekolah berbasis agama. Melalui penguatan kurikulum formal tersebut, diharapkan terbentuk generasi muda yang memiliki kompetensi finansial yang berkualitas, waspada terhadap informasi menyesatkan, serta adaptif terhadap dinamika sistem keuangan modern.

Kemudian, integrasi edukasi keuangan juga disesuaikan dengan pilar-pilar kesejahteraan keuangan meliputi, pengelolaan keuangan harian, ketahanan keuangan, pencapaian tujuan keuangan jangka panjang, serta tingkat kepercayaan diri. Untuk pengelolaan keuangan harian terutama pengelolaan arus kas dengan baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya ketahanan keuangan dimana kondisi siap untuk menghadapi gejala finansial dan kejadian tidak terduga melalui mitigasi risiko dengan akses asuransi. Sedangkan pencapaian tujuan keuangan jangka panjang terkait dengan perencanaan terstruktur untuk kepemilikan produk investasi. Sehubungan dengan tingkat kepercayaan diri yaitu memiliki keyakinan atas pengambilan keputusan keuangan dan perlindungan konsumen.

5.2.2 Pokja 2

Sejalan dengan transformasi DNKI menjadi DNKK yang diikuti dengan penyesuaian Kelompok Kerja Hak Properti Masyarakat digabungkan dalam Kelompok Kerja Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan, diperlukan penguatan fokus dari pensertifikatan lahan menjadi penguatan ekonomi masyarakat yang tidak hanya terkait dengan formalitas tetapi juga program-program yang mendukung penguatan ekonomi bagi segmen prioritas, antara lain Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yakni desil satu sampai dengan empat, pelaku usaha ultra mikro dan mikro dengan melibatkan berbagai *stakeholder* inklusi dan literasi keuangan.

Oleh karena itu, di dalam pokja Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan tersebut akan dilakukan program pemberdayaan bagi MBR dan UMKM serta masyarakat lintas kelompok melalui pilar-pilar kesejahteraan keuangan berbasis pemanfaatan lahan atau cluster. Beberapa upaya dimaksud meliputi antara lain, peningkatan pendapatan bagi penerima manfaat, pengelolaan keuangan harian, aspek resiliensi, investasi, serta perlindungan konsumen dari hulu ke hilir secara *close loop*.

5.2.3 Pokja 3

Untuk meningkatkan intermediasi dan saluran distribusi bagi segmen prioritas maka perlu melakukan *engagement* kepada kementerian dan lembaga yang mempunyai program pemberdayaan komunitas berbasis kelembagaan, antara lain Kementerian Koperasi dengan Kopdes Merah Putih, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan program Kampung Nelayan, Kementerian Desa dengan program BUMDes, dan Kementerian Pariwisata melalui Desa Wisata. Diharapkan dengan mengoptimalkan kelembagaan yang dibina oleh kementerian teknis dengan melaksanakan fungsi laku pandai atau LKD maka akan meningkatkan inklusi keuangan di daerah-daerah pedesaan dan daerah 3T.

Terkait dengan penyesuaian Kelompok Kerja Fasilitasi Intermediasi dan Saluran Distribusi yang akan diintegrasikan ke dalam Kelompok Kerja Inklusi Keuangan maka pemberdayaan komunitas berbasis kelembagaan tersebut akan dibina dalam pokja agar terjadi optimalisasi

kelembagaan yang dibina oleh Kementerian teknis tersebut dengan melaksanakan fungsi keagenan baik perbankan, pegadaian, asuransi, dan investasi.

5.2.4 Pokja 4

Penguatan Kelompok Kerja Pelayanan Keuangan Sektor Pemerintah perlu diarahkan pada percepatan elektronifikasi bantuan dan subsidi secara *end-to-end* hingga sepenuhnya nontunai, disertai integrasi data dan sistem lintas instansi agar penyaluran semakin tepat sasaran, efisien, dan akuntabel. Selanjutnya, pemanfaatan layanan keuangan oleh penerima manfaat perlu didorong agar tidak berhenti pada fungsi penyaluran, tetapi berlanjut menjadi penggunaan yang aktif, produktif, dan berkelanjutan. Di sisi pembiayaan, penguatan KUR, UMi, dan skema lainnya perlu difokuskan untuk mendorong graduasi usaha dan peningkatan kapasitas UMKM. Sementara itu, percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah dan layanan publik perlu diiringi penguatan interoperabilitas, kualitas implementasi, dan pemerataan antarwilayah. Pada saat yang sama, afirmasi terhadap kelompok rentan perlu diperkuat secara lebih tersegmentasi, serta monitoring dan evaluasi perlu diarahkan pada *outcome* agar kontribusinya terhadap kesejahteraan keuangan masyarakat dapat terukur secara lebih nyata.

5.2.5 Pokja 5

Perlindungan konsumen di sektor keuangan dan sektor riil masih belum optimal. Sehingga perlu mekanisme sinkronisasi Antar-Instansi yang terintegrasi untuk meningkatkan perlindungan konsumen ketika konsumen bertransaksi di ekosistem digital yang melibatkan barang sekaligus pembiayaan.

Mengingat tingginya penetrasi *fintech* sekarang ini, maka diperlukan pengawasan ketat terhadap praktik penagihan dan transparansi bunga. Perlindungan juga sebaiknya tidak hanya pada aspek keamanan data, tetapi juga pada aspek kesehatan finansial konsumen agar tidak terjebak dalam skema utang yang memberatkan.

Generasi muda adalah target utama pasar digital namun seringkali memiliki literasi finansial yang rendah. Diperlukan adanya program edukasi kurikuler maupun kampanye kreatif di media sosial maupun lingkungan satuan pendidikan yang fokus pada pemahaman kontrak digital, risiko *impulsive buying* menggunakan *pay later*, serta cara membedakan entitas keuangan legal dan ilegal.

5.2.6 Pokja 6

Sebagaimana arahan Bapak Presiden Prabowo untuk membentuk DNKK sebagai penguatan dan transformasi kelembagaan DNKI, selanjutnya diikuti dengan perubahan SNKI menjadi SNKK sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, PUSK, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan program Kesejahteraan Keuangan yang bersifat nasional, komprehensif, terukur, dan berkelanjutan. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan dari semua pihak guna percepatan penyelesaian payung hukum perubahan DNKI menjadi DNKK dan SNKI menjadi SNKK beserta peraturan turunannya.

5.2.7 Pokja 7

Pokja VII perlu mendorong dan memperluas kolaborasi dengan berbagai perusahaan fintech dalam rangka mendukung pengembangan teknologi informasi keuangan. Kolaborasi dengan berbagai fintech ini dapat difokuskan pada pemanfaatan inovasi digital seperti sistem pembayaran, pembiayaan alternatif, serta pengolahan data keuangan yang lebih efisien dan inklusif. Selain itu, keterlibatan fintech diharapkan dapat mempercepat adopsi teknologi, meningkatkan literasi keuangan digital, serta mendukung pengembangan infrastruktur dan layanan keuangan berbasis teknologi di pusat maupun daerah.

Selanjutnya untuk kedepan, Pokja VII diharapkan juga menginisiasi kegiatan monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dengan melibatkan K/L/Pemda dan *stakeholders* terkait guna meningkatkan kapasitas dalam pelaksanaan perluasan akses layanan keuangan melalui infrastruktur dan teknologi keuangan yang berkualitas agar lebih merata di seluruh Indonesia. Kegiatan dapat dilakukan dengan sosialisasi dan pendampingan kepada daerah-daerah terkhususnya daerah 3T yang masih belum mendapatkan akses layanan keuangan secara digital. Dengan adanya monitoring dan evaluasi, K/L nantinya mampu melaksanakan survei secara lebih mandiri berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan *stakeholders* terkait, sehingga dapat mendukung dan menghasilkan ketersediaan data untuk perumusan kebijakan dan evaluasi program Pokja VII secara lebih efektif dan tepat sasaran.

5.2.8 Sekretariat

Sekretariat DNKI perlu memperkuat *engagement* kepada pemerintah daerah melalui TPAKD untuk meningkatkan diseminasi arah kebijakan dan program kerja kepada TPAKD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, diperlukan pendampingan penyusunan laporan TPAKD yang disampaikan kepada pemerintah pusat secara digital dan penajaman rencana aksi SNKI yang selaras dengan penguatan agenda kesejahteraan keuangan agar pelaksanaan program lebih terarah, terukur, dan efektif dalam menjangkau kelompok sasaran prioritas. Pelaksanaan survei inklusi keuangan juga diharapkan dapat dilakukan secara mandiri hingga tingkat kabupaten/kota. Untuk meningkatkan kinerja TPAKD sekretariat DNKI perlu mendorong peran aktif dari perwakilan Kementerian/Lembaga di daerah untuk mendukung kinerja TPAKD.

Sekretariat DNKI bersama Kementerian/Lembaga dan lembaga pengkajian perlu mengembangkan metode monitoring dan evaluasi agar pengukuran kinerja inklusi keuangan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Sehingga data yang tersedia dalam proses monitoring dan evaluasi dapat dikelola dan diintegrasikan secara berkelanjutan.

LAMPIRAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

Lampiran 1. Tabel Realisasi Capaian Pokja I Edukasi Keuangan

Program Kerja	Realisasi
Pelaksanaan Edukasi Keuangan Berbasis Wilayah dan Segmen (GENCARKAN)	Pada tahun 2025, pelaksanaan edukasi keuangan berbasis wilayah dan segmen melalui program GENCARKAN telah menjangkau 504 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia (98,05%) hingga triwulan IV 2025, melalui berbagai kegiatan edukasi kepada masyarakat sesuai karakteristik wilayah dan kelompok sasaran.
Penguatan peran masyarakat sebagai agen literasi keuangan melalui pembentukan Duta Literasi Keuangan	Pembentukan Duta Literasi Keuangan yang melibatkan mahasiswa, komunitas, dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) telah menghasilkan 15.631 duta literasi keuangan terdaftar hingga akhir tahun 2025, yang berperan sebagai agen edukasi dan penyebarluasan literasi keuangan di masyarakat.
Pelaksanaan Edukasi Keuangan Tematik epada masyarakat sesuai dengan isu dan kebutuhan literasi keuangan	OJK melaksanakan 6.548 kegiatan edukasi keuangan tematik yang menyesuaikan dengan isu dan kebutuhan masyarakat, dengan total 9.936.199 peserta, yang dilaksanakan secara luring maupun daring kepada berbagai segmen masyarakat.
Penguatan implementasi pendidikan literasi keuangan pada jalur pendidikan formal	Pelaksanaan edukasi keuangan formal dilakukan melalui integrasi materi literasi keuangan dalam kurikulum pendidikan, termasuk penyusunan panduan umum dan modul literasi keuangan untuk SMA Fase E dan F, pelaksanaan <i>Training of Trainers</i> (ToT) bagi guru, serta piloting implementasi modul literasi keuangan pada satuan pendidikan
Pengembangan dan pemanfaatan kanal digital sebagai sarana edukasi literasi keuangan kepada masyarakat	Edukasi keuangan melalui kanal digital dilakukan melalui media sosial dan minisite SikapiUangmu serta Learning Management System (LMS) Edukasi Keuangan. Hingga 31 Desember 2025, minisite SikapiUangmu menghasilkan 340 konten dengan 3.471.622 pengunjung, sementara LMS memiliki 123.011 pengguna, dengan 43.273 pengguna mengakses minimal satu modul serta 133.296 modul diakses.
Pelaksanaan kampanye nasional dalam rangka peningkatan literasi keuangan masyarakat	Kampanye nasional literasi keuangan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti Bulan Literasi Keuangan, <i>World Investor Week</i> , <i>Global Money Week</i> , dan <i>Financial Literacy Academy</i> , yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan.
Pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan sebagai upaya peningkatan akses masyarakat	Pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan tahun 2025 dilaksanakan melalui 5.182 kegiatan dengan total 10,87 juta peserta, serta mendorong peningkatan kepemilikan

Lampiran 1. Tabel Realisasi Capaian Pokja I Edukasi Keuangan

Program Kerja	Realisasi
terhadap produk dan layanan jasa keuangan	dan penggunaan produk/layanan jasa keuangan oleh 12,36 juta masyarakat pada berbagai sektor jasa keuangan.
Pelaksanaan kampanye dan edukasi keuangan syariah melalui kegiatan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah)	Pelaksanaan GERAK Syariah dilakukan melalui orkestrasi 1.435 kegiatan literasi dan 556 kegiatan inklusi keuangan syariah, yang mengedukasi 6.350.276 masyarakat, serta mendorong penghimpunan dana sebesar Rp1,9 triliun dan penyaluran dana sebesar Rp4,6 triliun.
Penguatan ekosistem literasi dan inklusi keuangan syariah melalui kegiatan edukasi, pameran, dan pengembangan komunitas	Kegiatan dilaksanakan melalui <i>Syariah Financial Fair</i> (SYAFIF), Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSIS), dan Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS). Pada pelaksanaan SYAFIF di Tangerang, Palembang, Bandung, dan Mataram tercatat pembukaan rekening baru sebanyak 407 akun, 411 akun, 784 akun, dan 7.411 akun, dengan jumlah pengunjung masing-masing 1.506 orang, 2.008 orang, 4.500 orang, dan 2.552 orang, serta melibatkan 17–26 PUJK Syariah pada setiap kegiatan.
Pelaksanaan kegiatan edukasi dan sosialisasi keuangan kepada masyarakat oleh Bank Indonesia	Bank Indonesia melaksanakan berbagai kegiatan edukasi keuangan kepada masyarakat melalui program GenBI, edukasi publik, serta sosialisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang dilaksanakan di berbagai daerah dengan melibatkan masyarakat, mahasiswa, dan pemangku kepentingan.
Pelaksanaan edukasi literasi keuangan bagi pelajar dan mahasiswa sebagai upaya peningkatan literasi keuangan generasi muda	Kegiatan edukasi literasi keuangan kepada pelajar dan mahasiswa dilaksanakan melalui seminar literasi keuangan, kunjungan edukasi, serta program pelatihan dan kegiatan kemahasiswaan yang bertujuan meningkatkan pemahaman generasi muda dalam pengelolaan keuangan.
Pelaksanaan seminar dan sosialisasi literasi keuangan digital kepada masyarakat	Kementerian Komunikasi dan Digital melaksanakan seminar literasi keuangan berbasis digital guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan layanan keuangan digital secara aman dan bijak.
Penguatan kebijakan dan perencanaan pembangunan dalam rangka peningkatan inklusi keuangan daerah	Penguatan kebijakan inklusi keuangan dilakukan melalui penyelarasan indikator inklusi keuangan dalam dokumen perencanaan nasional dan daerah, serta implementasi Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) pada dokumen

Lampiran 1. Tabel Realisasi Capaian Pokja I Edukasi Keuangan

Program Kerja	Realisasi
	perencanaan pemerintah daerah hingga tingkat kabupaten/kota.
Pelaksanaan edukasi pengelolaan keuangan keluarga kepada masyarakat	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN melaksanakan edukasi pengelolaan keuangan keluarga melalui kegiatan edukasi dan penyusunan materi literasi keuangan keluarga guna meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengelola keuangan secara bijak.
Pelaksanaan edukasi keuangan dan pemanfaatan remitansi bagi pekerja migran Indonesia	Kegiatan edukasi keuangan dan pemanfaatan remitansi dilaksanakan oleh KP2MI kepada calon pekerja migran Indonesia (CPMI) melalui kegiatan edukasi dan <i>workshop</i> guna meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan remitansi dan perencanaan keuangan.
Peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat desa melalui pelatihan pengelolaan usaha dan keuangan desa	Kementerian Desa melaksanakan pelatihan desa wisata dan penguatan BUMDes melalui Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengelolaan usaha dan keuangan desa.

Lampiran 2. Tabel Realisasi Capaian Pokja II Hak dan Properti Masyarakat	
Program Kerja	Realisasi
Sertifikasi Hak Atas Tanah dan Peningkatan Cakupan Tanah Terdaftar	Pada tahun 2025 realisasi sertifikasi mencapai 4.765.420 bidang tanah atau 374% dari target 1.273.668 bidang tanah. Secara nasional cakupan bidang tanah terdaftar mencapai 99,91%, melampaui target 98,55%.
Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Reforma Agraria	Program akses reforma agraria telah menjangkau 9.442 KK melalui berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan lahan produktif. Implementasi dilakukan melalui pengembangan Kampung Reforma Agraria dan penataan akses tanah, antara lain di Desa Soso, Blitar, Jawa Timur dengan pengembangan pertanian jagung; Desa Banjar, Pandeglang, Banten melalui pengembangan UMKM, pertanian, dan pelatihan masyarakat; serta Desa Asahduren, Bali melalui pemanfaatan tanah ulayat untuk budidaya pisang <i>cavendish</i> yang melibatkan ratusan kepala keluarga.
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi UMKM	Realisasi fasilitasi HKI hingga TW IV 2025 meliputi 292 pendaftaran merek, 4 pendaftaran hak cipta, serta 33 surat keterangan pendaftaran KI secara mandiri, disertai kegiatan sosialisasi, FGD, dan partisipasi dalam berbagai pameran industri.
Percepatan Sertifikasi Halal bagi UMKM	Hingga TW IV 2024 telah diterbitkan 2.330.663 sertifikat halal. Selain itu dilakukan kolaborasi pendampingan UMKM melalui program SEHATI, dengan target 3.000 pelaku usaha mikro dan realisasi awal 40 sertifikat halal pada Desember 2025.
Penguatan Inklusi Keuangan dan Akses Pembiayaan bagi UMKM dan Kelompok Subsisten	Dilaksanakan melalui berbagai program seperti replikasi model bisnis inklusif kepada 28 kelompok sasaran, peningkatan rasio kredit UMKM menjadi 33,57%, <i>business matching</i> yang menghubungkan 314 UMKM dengan 12 lembaga keuangan senilai Rp224 miliar, pelatihan SI APIK di 15 lokasi, serta penyelenggaraan berbagai pameran dan pemberdayaan ekonomi syariah yang menjangkau pesantren dan pelaku usaha.

Lampiran 3. Tabel Realisasi Capaian Pokja III Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi

Program Kerja	Realisasi
Perluasan dan Akseptasi QRIS	Jumlah rekening uang elektronik terdaftar baru tercatat sebanyak 47.488.540 rekening per Bulan Agustus 2025. Sedangkan perkembangan <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i> (QRIS) sampai dengan Bulan Desember 2025 mencatatkan volume transaksi sebesar 15,5 miliar dengan nominal mencapai Rp1,42 Kuadriliun. Untuk jumlah <i>merchant</i> QRIS sampai dengan bulan Desember 2025 telah mencapai 42.747.097 <i>merchant</i>, dimana 95,74% diantaranya merupakan <i>merchant</i> UMKM. Perkembangan ekosistem QRIS tersebut juga didukung oleh PJP (Penyedia Jasa Pembayaran) QRIS yang berjumlah 158 PJP, terdiri dari 99 PJP Bank (termasuk 13 Bank Syariah dan 29 BPD) dan 59 PJP Non-Bank, serta PIP (Penyelenggara Infrastruktur Pembayaran) yaitu 4 lembaga <i>switching</i>. Jumlah pengguna QRIS sampai dengan triwulan IV 2025 sebanyak 59,53 juta pengguna dengan pengguna baru sebanyak 4,11 juta.
Pembukaan Uang Elektronik (UE) berbasis Server	Jumlah rekening UE terdaftar baru di Tahun 2025 sampai dengan bulan sebanyak 47.488.540 rekening
Peningkatan jumlah SID/ monitoring jumlah sub rekening efek	Data sampai dengan Bulan Desember 2025 mencapai jumlah 20.347.147, dengan peningkatan sebesar 5.475.508
Sinergi Keuangan Perasuransian, Dana Pensiun dan Penjaminan (PPDP) Syariah dengan Ekosistem Ekonomi Syariah	1. Terlaksananya kerja sama antara Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dengan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah melalui (1) Pemberian Literasi Asuransi Syariah dan (2) Training Zakat dan Wakaf Asuransi Syariah pada tanggal 29 April 2025. 2. Telah terlaksana Kegiatan Sinergi pada 7 Oktober 2025 yang menghasilkan penandatanganan 4 (empat) Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Prudential Life Assurance Syariah dan PT

Lampiran 3. Tabel Realisasi Capaian Pokja III Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi

Program Kerja	Realisasi
	Zurich General Takaful Indonesia dengan UIN K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto serta Universitas Muhammadiyah Purwokerto, serta penerbitan 2 (dua) polis asuransi berupa Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Syariah dari PT Zurich General Takaful Indonesia dan Polis Asuransi Jiwa Syariah dari PT Prudential Life Assurance. Lebih lanjut, PT Prudential Life Assurance Syariah telah menyelenggarakan kegiatan edukasi dan literasi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada 19 November 2025 sebagai tindak lanjut pelaksanaan MoU.
Sinergi Perbankan Syariah dengan Industri Halal dalam rangka Perluasan Akses Layanan Perbankan Syariah	Merujuk pada implementasi pada triwulan sebelumnya, telah terdapat implementasi program dengan dokumen sebagai berikut: 1. Surat Bank Nomor SKL.016/ 2025/DIR4-DIPD perihal Laporan Penerbitan dan Laporan Realisasi Program CWLD (Program Integrated Farm untuk UMKM Halal) 2. Surat Bank Nomor 194/DOP/X/2025 perihal Pemberitahuan Realisasi Program CWLD (Ternak Berkah Aceh)
Penguatan dan Pertumbuhan Pendanaan Pinjaman Daring (Pindar) kepada Sektor Produktif dan/atau UMKM	1. Realisasi pangsa Pendanaan sektor produktif dan/atau UMKM pada Maret (triwulan I) 2025 yaitu sebesar 36,50%. 2. Realisasi pangsa Pendanaan sektor produktif dan/atau UMKM pada Juni (triwulan II) 2025 yaitu sebesar 34,12%. 3. Realisasi pangsa Pendanaan sektor produktif dan/atau UMKM pada September (triwulan III) 2025 yaitu sebesar 34,48%. 4. Realisasi pangsa pendanaan sektor produktif dan/atau UMKM pada Desember (triwulan IV) 2025 yaitu sebesar 32,52%.
Pertumbuhan pinjaman yang diberikan perusahaan pergadaian sepanjang tahun 2025	Pinjaman yang disalurkan (PYD) Perusahaan Pergadaian sampai dengan triwulan IV 2024 adalah sebesar Rp87,97 triliun, sedangkan PYD Perusahaan Pergadaian sampai dengan triwulan IV 2025: belum dapat diketahui

Lampiran 3. Tabel Realisasi Capaian Pokja III Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi

Program Kerja	Realisasi
	mengingat pelaporan Perusahaan Pergadaian untuk triwulan IV tahun 2025 belum dilakukan perhitungan.
Pengembangan Saluran Distribusi layanan keuangan melalui (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)	Hingga triwulan IV tahun 2025, Laku Pandai telah mencatatkan jumlah agen perorangan sebanyak 1.737.720, sedangkan jumlah agen badan usaha (<i>outlet</i>) mencapai 27.712 dengan jumlah total agen 1.765.432. Untuk capaian jumlah nasabah BSA (<i>Basic Saving Account</i>) sebanyak 17.055.541 akun dengan total nominal tabungan BSA sebesar 905.875.328.128 rupiah.
Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)	Hingga Desember 2025, persentase pelajar yang telah memiliki rekening tercatat mencapai 88,15 persen atau sekitar 58,58 juta pelajar, dengan total simpanan sebesar Rp34,34 triliun. Pencapaian tersebut bahkan melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2025, yaitu sebesar 88 persen.
Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI)	Sampai dengan akhir Tahun 2025, program EKI telah diimplementasikan di 53 desa terutama difokuskan pada pengembangan desa wisata dan usaha pertanian.
Implementasi Program Product/Business Matching Keuangan Syariah, diantaranya melalui program Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS)	Sampai dengan triwulan IV 2025, melalui Program EPIKS telah dikukuhkan 103 agen layanan keuangan syariah (Laku Pandai, pergadaian, dan pembiayaan) pada komunitas BUMDes/Unit Usaha di wilayah Jawa Timur, DIY, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Lampung, Bandung, dan Ciamis
Sinergi Peningkatan Peran Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Keuangan Lainnya (PVML) Syariah dalam Ekosistem Ekonomi	Pada triwulan III 2025, telah dilaksanakan kegiatan <i>business matching</i> PVML Syariah dengan BUMDes di Kabupten Lombok Tengah pada tanggal 28 Agustus 2025 di Mataram. Kegiatan ini berkolaborasi dengan kegiatan KOJK NTB dalam program EKI. Terdapat 3 entitas PVMLS yang telah bekerjasama dengan BUMDes dan menyalurkan pembiayaan ke wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

Lampiran 3. Tabel Realisasi Capaian Pokja III Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi

Program Kerja	Realisasi
Pendampingan Akses Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil (BISLAF)	Kegiatan pendampingan akses pembiayaan dan investasi usaha kecil terus dilakukan secara intensif selama tahun 2025 di beberapa kota di Indonesia. Kegiatan Workshop Akses Pembiayaan dilakukan di Kota Serang, Provinsi Banten pada triwulan II dengan target sebanyak 30 UMKM. Kemudian pada triwulan III telah dilaksanakan kegiatan Workshop dan Business Matching Akses Pembiayaan dan Investasi di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dengan target 50 UMKM, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan target 40 UMKM dan Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara dengan target 35 UMKM. Pada triwulan IV, kegiatan dilanjutkan di Kota Tangerang dan Yogyakarta dengan target masing-masing sebanyak 50 UMKM.
Literasi Keuangan Bagi Pelaku Usaha Pariwisata	Pada triwulan I Tahun 2025, capaian pelaksanaan kegiatan 'Literasi Keuangan Bagi Pelaku Usaha Pariwisata' sebanyak 30 Badan Usaha. Kegiatan Literasi Keuangan dilakukan secara luring dihadiri UMKM pelaku usaha Pariwisata binaan dari Dinas Pariwisata, pengelola desa wisata dan Pokdarwis. Kegiatan ini bertujuan memberikan wawasan tentang pengelolaan keuangan usaha sederhana serta mendorong pelaku usaha pariwisata untuk mengelola keuangan dengan baik dan benar, sehingga meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha pariwisata terkhusus terkait keuangan usaha. Selain itu juga, melalui kegiatan ini para pelaku usaha pariwisata diharapkan bisa lebih mudah mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan.
Peningkatan Kapasitas Usaha dan Perluasan Akses Permodalan	Pada triwulan II Tahun 2025, capaian pelaksanaan kegiatan "Peningkatan Kapasitas Usaha dan Perluasan Akses Permodalan" kepada 30 Badan Usaha. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dan Perluasan Akses Permodalan sebagai upaya meningkatkan daya saing usaha, memperkuat ekosistem desa wisata, serta memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha pariwisata. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi katalis dalam mendorong desa wisata menuju desa wisata maju dan mandiri. Pada 2025 dilakukan di dua lokasi:

Lampiran 3. Tabel Realisasi Capaian Pokja III Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi

Program Kerja	Realisasi
	1. Desa Wisata Lebakmuncang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Narasumber yang dihadirkan adalah <i>Local Champion</i> (pengelola/pokdarwis) Desa Wisata Alamendah, BRI KC Ciwidey, dan ASITA Jawa Barat. 2. Desa Wisata Cempaka, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Narasumber yang dihadirkan adalah <i>Local Champion</i> (pengelola/pokdarwis) Desa Wisata Pekunden, BRI KC Bumijawa, dan OJK Tegal."
Forum Komunikasi Sinergi Perluasan Pasar dan Permodalan Usaha Pariwisata	Pada triwulan II Tahun 2025, capaian pelaksanaan kegiatan "Forum Komunikasi Sinergi Perluasan Pasar dan Permodalan Usaha Pariwisata" kepada 100 Badan Usaha. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya untuk mengidentifikasi serta memetakan kebutuhan, tantangan hingga peluang bagi pelaku usaha pariwisata untuk mengembangkan akses pasar dan akses permodalan. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga, Asosiasi dan Lembaga terkait Pariwisata, serta diikuti secara daring dari Dinas Pariwisata Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia. Daftar narasumber dan topik yang disampaikan: 1. Strategi Pemenuhan <i>Supply Chain</i> dalam Mendukung Sektor Pariwisata Indonesia disampaikan oleh Ibu Vera Umbara - Ketua GPHRI. 2. Digitalisasi Produk dalam Pengembangan Pasar Pariwisata disampaikan oleh Bapak Renaldi - Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif IdEA. 3. <i>Intellectual Property (IP) & Tourism</i> disampaikan oleh Bapak Noviar - CIO INFIA. 4. <i>From Left Behind to Leading Destination</i> disampaikan oleh Ahmad Romero Comacho (Popo) - CEO Mbloc Space 5. Peran Industri Jasa Keuangan dalam memfasilitasi Kebutuhan Akses Permodalan Pariwisata disampaikan oleh Bapak Arinengwang Gusta (Kepala Divisi Pengembangan Inklusi Keuangan OJK) 6. Kebijakan Insentif Fiskal pada Sektor Pariwisata disampaikan oleh Bapak Eko Haryono Aritonang (Kepala Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Jasa, Kementerian Keuangan)

Lampiran 3. Tabel Realisasi Capaian Pokja III Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi

Program Kerja	Realisasi
	7. Strategi Akses Pembiayaan Modal Ventura bagi Usaha Pariwisata disampaikan oleh Bapak Eddi Danusaputro (Ketua Umum AMVESINDO) 8. Strategi Akses Pembiayaan Digital bagi Usaha Pariwisata disampaikan oleh Bapak Budiman Indrajaya (Wakil Ketua Umum I ALUDI) 9. Strategi Pemanfaatan Akses Permodalan dalam Pengembangan Usaha : VILO GELATO disampaikan oleh Bapak Vincent Kusuma (Co-founder dan CEO) 10. Strategi Pemanfaatan Akses Permodalan dalam Pengembangan Usaha - Bobobox disampaikan oleh Bapak Dennis Depriadi (<i>Head of Business Relation</i>)"
Pengenalan Alternatif Sumber Permodalan Bagi Usaha Pariwisata Secara Online	Pada triwulan III Tahun 2025, capaian pelaksanaan kegiatan Pengenalan Alternatif Sumber Permodalan Bagi Usaha Pariwisata Secara Online" kepada 40 badan usaha. Kegiatan Sosialisasi ini diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting dengan mengundang Asosiasi dari 13 bidang usaha pariwisata. Format kegiatan berupa sesi diskusi panel sebanyak empat sesi yang membahas mekanisme pembiayaan yaitu Urun Dana, Pasar Modal, Modal Ventura dan Perbankan dari lembaga pembiayaan terkait, serta contoh success story dari pelaku usaha yang telah menerima manfaatnya. 1. Sosialisasi sesi pertama mengenai Pembiayaan Urun Dana dilaksanakan pada 18 September 2025 dengan menghadirkan narasumber dari Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI) dan perwakilan Bobobox sebagai pelaku usaha. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan konsep crowdfunding sebagai alternatif pembiayaan bagi sektor pariwisata, yang memungkinkan pelaku usaha menghimpun modal dari masyarakat untuk pengembangan usaha serta mendukung terciptanya produk wisata berkelanjutan. 2. Sosialisasi sesi kedua mengenai Pembiayaan Pasar Modal dilaksanakan pada 24 September 2025 dengan narasumber dari Indonesia Exchange (IDX) dan PT Puri Sentul Permai. Kegiatan ini memperkenalkan pasar modal sebagai alternatif pembiayaan bagi

Lampiran 3. Tabel Realisasi Capaian Pokja III Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi

Program Kerja	Realisasi
	sektor pariwisata melalui instrumen seperti obligasi, sukuk, dan saham, sekaligus membuka peluang partisipasi investor. 3. Sosialisasi sesi ketiga mengenai Pembiayaan Modal Ventura dilaksanakan pada 1 Oktober 2025 dengan narasumber dari Amvesindo & Kejora Capital serta Vilo Gelato. Kegiatan ini memperkenalkan pembiayaan modal ventura sebagai alternatif pendanaan bagi sektor pariwisata melalui skema penyertaan saham, obligasi konversi, dan surat utang, sekaligus memberikan pendampingan manajerial. Selain itu, dipaparkan pula model bisnis modal ventura yang meliputi Venture Capital Corporation (VCC), Venture Debt Corporation (VDC), Micro Financing, dan PMV Syariah. 4. Sosialisasi sesi keempat mengenai Pembiayaan Perbankan dilaksanakan pada 17 Oktober 2025 dengan narasumber dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Kegiatan ini memberikan pemahaman mengenai instrumen pembiayaan perbankan, termasuk prosedur, persyaratan, serta strategi optimalisasi permodalan bagi pelaku usaha pariwisata.
Penerbitan SUN Ritel seri ORI027 dan ORI28	Pada periode 27 Januari hingga 20 Februari 2025, DJPPR menerbitkan Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI027 dengan tema “Pilihan Berharga Untuk Generasi Unggul” melalui strategi komunikasi yang mencakup aktivasi media sosial, kampanye video, kegiatan literasi keuangan, landing page, edukasi dan sosialisasi di universitas serta kantor vertikal Kementerian Keuangan, talkshow TV dan radio, CreatORI, serta digital ads. ORI027 diterbitkan dalam dua seri, yaitu ORI027-T3 (tenor 3 tahun) dan ORI027-T6 (tenor 6 tahun), dengan total penerbitan sebesar Rp37,36 triliun, terdiri atas Rp32,97 triliun untuk ORI027-T3 dan Rp4,39 triliun untuk ORI027-T6. Jumlah investor tercatat sebanyak 76.866 investor pada ORI027-T3 (28,46% investor baru) dan 14.292 investor pada ORI027-T6 (29,45% investor baru).

Lampiran 3. Tabel Realisasi Capaian Pokja III Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi

Program Kerja	Realisasi
	Selanjutnya, pemerintah menawarkan ORI028 pada periode 29 September hingga 23 Oktober 2025 dengan strategi komunikasi serupa yang meliputi aktivasi media sosial, kampanye video, landing page, edukasi dan sosialisasi, talkshow, CreatORI, serta digital ads. ORI028 juga diterbitkan dalam dua seri, yaitu ORI028-T3 dan ORI028-T6, dengan total penerbitan sebesar Rp15,5 triliun, terdiri atas Rp12,00 triliun untuk ORI028-T3 dan Rp3,5 triliun untuk ORI028-T6, serta didukung oleh partisipasi sebanyak 38.355 investor, termasuk 11.558 investor baru.
Penerbitan SBSN Ritel seri ST014 dan ST015	Pada tahun 2025, Pemerintah melalui DJPPR menerbitkan Sukuk Tabungan seri ST014 dan ST015 sebagai instrumen investasi syariah bagi Warga Negara Indonesia yang aman, mudah, terjangkau, menguntungkan, dan sesuai prinsip syariah, sekaligus mendukung pembiayaan proyek ramah lingkungan melalui skema Green Sukuk. ST014 ditawarkan pada Maret 2025 dengan dua seri, yaitu ST014T2 (tenor 2 tahun) dan ST014T4 (Green Sukuk, tenor 4 tahun), dengan total penerbitan sebesar Rp23,35 triliun dan jumlah investor mencapai 84.175 orang. Sementara itu, ST015 ditawarkan pada November 2025 dengan struktur serupa, yaitu ST015T2 dan ST015T4 (Green Sukuk), dengan total penerbitan sebesar Rp15 triliun dan jumlah investor sebanyak 50.642 orang. Penerbitan kedua seri tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam mengembangkan pasar keuangan syariah serta mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui pembiayaan berkelanjutan. Strategi komunikasi dilakukan melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi, seperti edukasi sosial dan Sekolah Pasar Modal, talkshow TV dan radio, serta aktivasi media sosial.
Penerbitan SBSN Ritel seri SR022 dan SR023	Pada tahun 2025, DJPPR menerbitkan Sukuk Ritel seri SR022 sebagai instrumen investasi syariah bagi masyarakat dengan tema yang mendorong kontribusi terhadap pembangunan nasional. Penerbitan ini didukung

Lampiran 3. Tabel Realisasi Capaian Pokja III Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi

Program Kerja	Realisasi
	melalui strategi komunikasi berupa edukasi dan sosialisasi, termasuk Edusos dan Sekolah Pasar Modal, talkshow radio, serta aktivasi media sosial. SR022 diterbitkan dalam dua seri, yaitu SR022T3 (tenor 3 tahun) dan SR022T5 (tenor 5 tahun). Pada periode 2025, total penerbitan mencapai Rp24,22 triliun dengan jumlah investor sebanyak 63.622 orang. Sebelumnya, penerbitan pada tahun 2024 mencatat total sebesar Rp27,84 triliun dengan jumlah investor sebanyak 74.211 orang, yang menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap instrumen investasi syariah. Pada Agustus 2025, DJPPR menerbitkan Sukuk Ritel seri SR023 sebagai instrumen investasi syariah bagi masyarakat dalam rangka mendukung kedaulatan dan kesejahteraan bangsa. Penerbitan ini didukung melalui strategi komunikasi berupa edukasi dan sosialisasi, antara lain Edusos dan Sekolah Pasar Modal, talkshow radio, serta aktivasi media sosial. SR023 diterbitkan dalam dua seri, yaitu SR023T3 (tenor 3 tahun) dan SR023T5 (tenor 5 tahun), dengan total penerbitan sebesar Rp18,72 triliun, terdiri atas Rp12,14 triliun untuk SR023T3 dan Rp6,58 triliun untuk SR023T5. Jumlah investor tercatat sebanyak 43.160 orang, termasuk investor baru yang menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam instrumen investasi syariah.
Penerbitan SUN Ritel seri SBR014 dan SBR023	Pemerintah menawarkan Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR014 pada periode 14 Juli hingga 7 Agustus 2025 dengan dukungan strategi komunikasi yang meliputi aktivasi media sosial, landing page, edukasi dan sosialisasi di universitas serta kantor vertikal Kementerian Keuangan, talkshow TV dan radio, CreatORI, serta digital ads. SBR014 diterbitkan dalam dua seri, yaitu SBR014-T2 (tenor 2 tahun) dan SBR014-T4 (tenor 4 tahun), dengan

Lampiran 3. Tabel Realisasi Capaian Pokja III Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi

Program Kerja	Realisasi
	total penerbitan sebesar Rp14,92 triliun, terdiri atas Rp11,59 triliun untuk SBR014-T2 dan Rp3,31 triliun untuk SBR014-T4. Jumlah investor tercatat sebanyak 51.198 orang, termasuk 19.582 investor baru.
Penerbitan SBSN Ritel seri SWR006	Pada Agustus 2025, DJPPR menerbitkan CWLS Ritel seri SWR006 dengan tema “Pilihan Berharga Untuk Hidup Lebih Bermakna Menebarkan Manfaat, Menuai Pahala” yang didukung strategi komunikasi melalui edukasi sosial dan Sekolah Pasar Modal, talkshow radio, serta webinar. Penerbitan SWR006 mencatatkan kinerja tertinggi sejak peluncuran CWLS Ritel, dengan total pemesanan mencapai Rp306,28 miliar, peningkatan signifikan dibandingkan seri sebelumnya, serta didukung oleh peningkatan jumlah wakif individu dan institusi, termasuk partisipasi 17 institusi dengan nominal sebesar Rp269,07 miliar.
<i>Inclusive Festival Goes to Educational Sector</i>	Inclusive Festival (Infest) merupakan kegiatan rutin DJPPR dalam rangka meningkatkan literasi pengelolaan keuangan pribadi dan pembiayaan APBN yang dilaksanakan secara daring, luring, maupun hybrid. Pada 27 Februari 2025, DJPPR menyelenggarakan Infest Goes to Educational Sector secara daring bekerja sama dengan Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Yogyakarta, dengan peserta sebanyak 363 orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru penggerak, serta tenaga pendidik. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan dan pembiayaan APBN serta mendorong transfer pengetahuan kepada peserta didik, dengan tetap mengedepankan aspek inklusivitas melalui keterlibatan juru bahasa isyarat. Pada 28 Agustus 2025, DJPPR menyelenggarakan Infest Goes to Educational Sector bekerja sama dengan Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Jawa

Lampiran 3. Tabel Realisasi Capaian Pokja III Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi

Program Kerja	Realisasi
	Barat, yang diikuti oleh 71 peserta secara luring dan 700 peserta secara daring dari unsur Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan dan pembiayaan APBN serta mendorong transfer pengetahuan kepada peserta didik, dengan tetap mengedepankan prinsip inklusivitas melalui keterlibatan juru bahasa isyarat. Pada November 2025, DJPPR menyelenggarakan rangkaian Infest di Jawa Timur yang meliputi kegiatan pada sektor pemerintah daerah, sektor pendidikan, dan perguruan tinggi di Kota Batu dan Malang, dengan total partisipasi ratusan peserta luring dan lebih dari 1.000 peserta daring dari berbagai wilayah. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai peran APBN dalam pembangunan nasional serta mendorong peningkatan literasi keuangan bagi ASN, tenaga pendidik, dan mahasiswa, yang diharapkan dapat disebarluaskan kepada masyarakat luas, dengan tetap mengedepankan prinsip inklusivitas melalui keterlibatan juru bahasa isyarat.
Jumlah Investor dan Investor Baru SBN Ritel tahun 2025 beserta komposisi Investor SBN Ritel	Jumlah investor SBN Ritel terus mengalami peningkatan, dengan total investor mencapai lebih dari 1,01 juta SID per Desember 2025 sejak awal penerbitan pada tahun 2006, serta mencatat pertumbuhan rata-rata sekitar 16% per tahun dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2025, jumlah investor SBN Ritel mencapai sekitar 244 ribu orang, termasuk 102.351 investor baru, dengan total penerbitan sebesar Rp153 triliun. Hal ini mencerminkan kepercayaan investor yang tetap kuat serta peran strategis SBN Ritel sebagai sumber pembiayaan APBN dan instrumen inklusi keuangan. Berdasarkan komposisi usia investor: Milenial (lahir 1980–2000) mendominasi dengan 50%; Generasi X (1965–1979) sebesar 29%; Baby Boomers (1946–1964)

Lampiran 3. Tabel Realisasi Capaian Pokja III Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi

Program Kerja	Realisasi
	sebesar 14%.; Generasi Z (≥ 2000) sebesar 6%.; dan Tradisionalis (1928–1945) sebesar 1%. Dominasi Milenial dan Generasi X menunjukkan bahwa SBN Ritel telah berhasil menjangkau investor usia produktif, yang sangat penting untuk keberlanjutan basis investor domestik; dan penguatan pembiayaan APBN jangka menengah–panjang. Komposisi investor SBN Ritel berdasarkan profesi menunjukkan diversifikasi yang semakin luas: Pegawai Swasta: (33%); Wiraswasta (18%); Pelajar/Mahasiswa (12%); Ibu Rumah Tangga (9%); PNS (7%); Profesional (4%); Otoritas/Lembaga/BUMN (4%); Pensiunan (3%); TNI/Polri (1%); Lainnya (9%); dan Pekerja Seni (0%). Distribusi ini menegaskan bahwa SBN Ritel telah menjadi instrumen inklusif lintas profesi, tidak terbatas pada kelompok formal tertentu, dan efektif sebagai alat literasi keuangan; dan sarana partisipasi masyarakat dalam pembiayaan negara.

Lampiran 4. Tabel Realisasi Capaian Pokja IV Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah

Program Kerja	Realisasi
Program Keluarga Harapan (PKH)	Realisasi Penyaluran Gabungan Tunai dan Non Tunai: salur Rp28,73 T (100,07% dari target nominal) kepada 9,99 juta KPM (99,99% dari target KPM). Realisasi Penyaluran Non Tunai: salur Rp 26,71 T (proporsi 92,96% dari realisasi penyaluran gabungan) kepada 9,62 juta KPM.
Program Sembako	Realisasi Penyaluran Gabungan Tunai dan Non Tunai: salur Rp37,24 T (84,89% dari target nominal) kepada 18,24 juta KPM (96,17% dari target KPM). Realisasi Penyaluran Non Tunai: salur Rp34,12 T (proporsi 91,61% dari realisasi penyaluran gabungan) kepada 17,02 juta KPM.
Kartu Tani	Realisasi penyaluran pupuk subsidi yang disalurkan menggunakan Kartu Tani pada kuartal keempat mencapai 7,91 juta ton (82,82% dari target 9,55 juta ton).
Perluasan Penggunaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Nontunai	Pemanfaatan dana BOS pada Aplikasi SIPLah di triwulan III adalah sebagai berikut: (1) Jumlah satuan pendidikan yang bertransaksi: 294.238; (2) Jumlah transaksi: 4.957.304; (3) Nilai transaksi: Rp20.894.151.996.082
Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah	KIP Kuliah Kemendikisaintek telah disalurkan sebesar Rp14,98 triliun (100% dari target Rp14,98 triliun) kepada 1.123.891 mahasiswa (107,69% dari target 1,04 juta mahasiswa). Sementara itu, KIP Kuliah Kemenag telah disalurkan sebesar Rp158,67 miliar (99,80% dari target 158,98 miliar) kepada 24.041 mahasiswa (99,80% dari target 24.088 mahasiswa) (Data Tw-II 2025)
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	KUR telah disalurkan sebesar Rp270,08 triliun (95,47% dari target plafon KUR yang didistribusikan, yaitu Rp282,87 triliun). Pada triwulan IV 2025, terdapat 2,03 juta debitur baru (86,75% dari target 2,34 juta debitur baru) dan 1,12 juta debitur graduasi (95,72% dari target 1,17 juta debitur).

Lampiran 4. Tabel Realisasi Capaian Pokja IV Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah

Program Kerja	Realisasi
Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)	Realisasi penerima sebesar 2.172.282 debitur (147,77% dari target debitur) dengan nominal sebesar Rp 12,38 triliun. Pada triwulan IV 2025 sebagian besar penerima/debitur merupakan UMKM pendukung dalam rangka program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pembiayaan PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera)	Jumlah nasabah PNM Mekaar mencapai 13,17 juta nasabah (87,26% dari target 15,01 juta nasabah).
Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA)	Total hingga akhir 2025 telah diterbitkan sebanyak 155.332 e-KUSUKA (140,34% dari target 110.680 kartu).
Elektronifikasi Transportasi	a) Transaksi UE chip based pada Tw IV-25 tercatat mencapai 355 juta transaksi atau senilai Rp2,47 triliun didominasi oleh transaksi perparkiran sebesar 69,18% disusul oleh sektor transportasi darat dan rel, serta penyeberangan dan pelabuhan masing-masing sebesar 22,76% dan 8,06%. Data dihimpun berdasarkan laporan dari industri yang termasuk dalam program elektronifikasi pembayaran yang difasilitasi DPSP, mencakup Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, KC I, LRT Sumsel, LRT Jabodetabek, ASDP, Pelindo, serta parkir yang dikelola al. PT Securindo Packatama, PT Centrepark Citra Corpora, dan Unit Pengelola Perparkiran (UPP) Dishub DKI Jakarta. b) Pada triwulan IV-2025, DPSP telah melakukan koordinasi persiapan SP di Transportasi periode Natal dan Tahun Baru 2025 dan 2026
Elektronifikasi Pembayaran Jalan Tol	a) Hingga triwulan IV-2025, jalan tol yang beroperasi di Indonesia sepanjang 3.115,98 KM terbagi menjadi 76 ruas tersebar di Pulau Jawa, Bali, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. b) Transaksi UE chip based di jalan tol pada periode triwulan IV-2025 tercatat sebanyak 429,83 juta transaksi atau senilai 9,86 triliun.

Lampiran 4. Tabel Realisasi Capaian Pokja IV Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah

Program Kerja	Realisasi
Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	Capaian Pemda Digital setelah asesmen perkembangan ETPD Semester II 2025: a) 511 pemda tahap digital dari total 546 pemda. Jumlah ini telah mendekati target pemda digital yang ditetapkan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) tahun 2025, yaitu 92% pemda digital (503 pemda). b) 27 pemda tahap maju c) 8 pemda tahap berkembang

Lampiran 5. Tabel Realisasi Capaian Pokja V Perlindungan Konsumen

Program Kerja	Realisasi
Jumlah Penyelesaian Pengaduan di Sektor Jasa Keuangan oleh Pelaku Usaha	Realisasi 97,21% (Target 90%)
Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan atas Penyelesaian Pengaduan Sektor Jasa Keuangan	Realisasi 91% (Target 85%)
Tingkat Tindaklanjut Pelindungan Konsumen terhadap PUJK yang Dicabut Izin Usahnya oleh OJK	Realisasi 97% (Target 75%)
Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan LAPS SJK	Realisasi 100% (Target 100%)
Tingkat Penyelesaian Penanganan Entitas Ilegal oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal	Realisasi 94% (Target 90%)
Tingkat Pemblokiran Rekening Terkait Penipuan (Indonesia Anti-Scam Centre) dan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan	Realisasi 89% (Target 70%)
2 Ketentuan Terkait dengan PBI PKBI dan PDG KPKBS	Pembahasan dengan satker terkait, asosiasi, dan audiensi kepada Gubernur Bank Indonesia terkait substansi pengaturan dalam PBI PKBI dan PDG KPKBS
Perluasan Cakupan LAPS-SK Untuk Menangani Sengketa Bidang Sistem Pembayaran	'Pembahasan intensif secara mingguan antara BI, ASPI, dan LAPS SJK terkait operasionalisasi LAPS SJK termasuk iuran anggota

Lampiran 5. Tabel Realisasi Capaian Pokja V Perlindungan Konsumen

Program Kerja	Realisasi
Perluasan Ekosistem Gerakan Bersama Edukasi Perlindungan Konsumen (GEBER PK)	Kolaborasi edukasi keuangan dan perlindungan konsumen dengan Kemenkopolkam dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI/BP2MI) kepada PMI dan Keluarganya di wilayah Provinsi Jawa Tengah (Solo); Kegiatan edukasi yang dicatatkan pada Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai “Edukasi PK kepada Santri Terbanyak” sebagai upaya mendorong awareness akan urgensi PK kepada Santri setingkat sekolah menengah atas di Purwokerto, berkolaborasi dg Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Agama (Kemenag), dan edukasi cerdas keuangan digital kepada komunitas wanita dan UMKM berkolaborasi dg DEIH dan KPwDN.

Lampiran 6. Tabel Realisasi Capaian Pokja VI Kebijakan dan Regulasi

Program Kerja	Realisasi
Penyusunan regulasi di Otoritas Jasa Keuangan yang mendukung peningkatan literasi keuangan dan Inklusi keuangan.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/UMKM (POJK 19/2025).
Penyusunan regulasi di Bank Indonesia yang mendukung peningkatan literasi keuangan dan Inklusi keuangan.	a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kebijakan Likuiditas Makroprudensial. b) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
Penyusunan payung hukum Tim Kerja Indeks Akses keuangan Daerah (IKAD).	Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tim Kerja Indeks Akses keuangan Daerah (IKAD).
Roadmap TPAKD 2026-2030.	Telah diluncurkan Roadmap TPAKD 2026-2030 pada tanggal 10 Oktober 2025.

Lampiran 7. Tabel Realisasi Capaian Pokja VII Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan

Program Kerja	Realisasi
Penyediaan Akses Internet Pitalebar untuk Fasilitas Layanan Publik	Sampai dengan TW 4 tahun 2025 telah dilakukan pembangunan baru pada 1.292 lokasi sehingga target dari <i>Operation Maintenance</i> (OM) pada tahun 2025 sebanyak 36.830 titik akses internet tercapai sebesar 29.155 titik/lokasi.
Penyediaan Layanan Telekomunikasi Seluler 4G bagi wilayah Non Komersial	Sampai TW 4 penyediaan akses sinyal <i>Base Tranceiver Station</i> (BTS) 4G/Lastmile telah terealisasi sebanyak 3.485 lokasi di wilayah Non Papua dan sebanyak 3.262 lokasi di wilayah Papua serta Papua Barat.
Penyediaan Akses Internet tetap Pitalebar untuk Rumah Tangga dan Ruang Publik	Program bantuan pemerintah untuk <i>Fixed Broadband</i> (FBB)/Kampung Internet telah menjangkau 1.281 titik yang terdiri atas 1.197 UMKM dan 84 fasilitas umum di 6 provinsi (Sumatera Utara, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan NTB). Telah dilaksanakan pelatihan dan penyerahan Laboratorium Fiber Optic (FO) kepada SMKN 2 Sragen. Selain itu juga, telah dilakukan survei calon penerima bantuan FBB untuk tahun 2026 di Maluku, Kupang dan Sumatera Utara.
Implementasi SPLP pada Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D)	Dari total 730 K/L/D, sebanyak 442 instansi (60,55%) telah mengimplementasikan SPLP. Selain itu, terdapat 37 instansi (5,07%) yang telah memiliki Application Programing Interface (API) aktif di hit harian.
Pemanfaatan Data Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Sampai dengan 31 Desember 2025, jumlah aktivasi IKD di Kabupaten Banyuwangi sebagai <i>pilot project</i> tercatat sebanyak 211.937 aktivasi.
Implementasi Identitas Kependudukan Digital (Pelayanan Adminduk Online)	Sampai dengan 31 Desember 2025, jumlah akumulasi aktivasi IKD secara nasional mencapai 17.567.540 aktivasi.

Lampiran 7. Tabel Realisasi Capaian Pokja VII Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan

Program Kerja	Realisasi
Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan Lainnya	Pengembangan teknologi dan infrastruktur keuangan dilakukan melalui beberapa program, antara lain: (i) pengembangan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) melalui penambahan skema Kredit Industri Padat Karya (KIPK) dan Kredit Program Perumahan (KPP); (ii) penambahan kanal QRIS pada Modul Penerimaan Negara (MPN) melalui <i>Channel Aggregator</i> (CA) kanal QRIS yaitu Finnet; (iii) pemutakhiran data Keuangan Inklusif pada publikasi Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI); (iv) pemutakhiran data dalam rangka <i>Financial Access Survey</i> (FAS) dan <i>International Monetary Fund</i> (IMF); (v) Pengembangan New BI-FAST dan <i>Enhancement</i> BI-FAST (Penguatan Operasional dan Pengamanan BI-FAST); dan (vi) pengembangan layanan aplikasi iDebku yang telah memproses sebanyak 121.206 permohonan layanan pada TW IV 2025.

DAFTAR SINGKATAN

3T	Tertinggal, Terdepan, Terluar
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APPIK	Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil
ATM	Anjungan Tunai Mandiri
AUTP	Asuransi Usaha Tani Padi
AUTS/K	Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau
BAKTI	Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi
BES	Badan Ekonomi Syariah
BI	Bank Indonesia
BIK	Bulan Inklusi Keuangan
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPD	Bank Pembangunan Daerah
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPS	Badan Pusat Statistik
BSA	Basic Saving Account
BSNT	Bantuan Sosial Non Tunai
BSPI	Blue Print Sistem Pembayaran
BTS	<i>Base Transceiver Station</i>
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMDES	Badan Usaha Milik Desa
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CWLS	Cash Waqf Linked Sukuk
DEKS	Departemen Ekonomi Keuangan Syariah
DIF	Dana Insentif Fiskal
DJPPR	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
DNKI	Dewan Nasional Keuangan Inklusif
DNTG	Data Nasional Terpilah Gender
DPK	Dana Pihak Ketiga
EDC	<i>Electronic Data Capture</i>
EKI	Ekosistem Keuangan Inklusif
EPIKS	Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah
FEKDI	Festival Ekonomi Keuangan Digital
FESYAR	Festival Ekonomi Syariah
FESyar	Festival Ekonomi Syariah
FinExpo	Finansial Expo
GENCARKAN	Gerakan Nasional Cerdas Keuangan
HIM	Hari Indonesia Menabung
Himbara	Himpunan Bank Milik Negara
HKI	Hak Kekayaan Intelektual
HORI	Hari Oeang Republik Indonesia
IKAD	Indeks Akses Keuangan Daerah
IKNB	Industri Keuangan Non-Bank

IKU	Indikator Kinerja Utama
ISEF	Indonesia Sharia Economic Festival
Jamkesda	Jaminan Kesehatan Daerah
K/L	Kementerian atau Lembaga
K/PMR	Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir
KEJAR	Satu Rekening Satu Pelajar
KIP	Kartu Indonesia Pintar (KIP)
KKI	Karya Kreatif Indonesia
KomnasLIK	Komite Nasional Peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan
KPM	Keluarga Penerima Manfaat
KSP	Koperasi Simpan Pinjam
KUR	Kredit Usaha Rakyat
KUSUKA	Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan
Laku Pandai	Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif
LAPS SJK	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
LKBB	Lembaga Keuangan Bukan Bank
LKD	Layanan Keuangan Digital
LMS	<i>Learning Management System</i>
LPDB	Lembaga Pengelola Dana Bergulir
MBR	Masyarakat Berpenghasilan Rendah
MEKSI	<i>Masterplan</i> Ekonomi Syariah Indonesia
NPL	<i>Non-Performing Loan</i>
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
ORI	Obligasi Negara Ritel
OVOA	<i>One Village One Agent</i>
P2P Lending	<i>Peer to Peer Lending</i>
P2SK	Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
PADG	Peraturan Anggota Dewan Gubernur
PBI	Penerima Bantuan Iuran
PBI	Peraturan Bank Indonesia
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
Perpres	Peraturan Presiden
PJP	Penyedia Jasa Pembayaran
PKH	Program Keluarga Harapan
PKM	Pertemuan Kelompok Mingguan
Pokja	Kelompok Kerja
PPKS	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
PSP	Penyelenggara Sistem Pembayaran
PUJK	Pelaku Usaha Jasa Keuangan
PUSK	Pelaku Usaha Sektor Keuangan
QRIS	<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Satgas PASTI	Satuan Tugas Pemberantas Aktivitas Keuangan Ilegal
SBN	Surat Berharga Negara
SBR	Savings Bond Ritel
SBSN	Surat Berharga Syariah Negara
SCF	<i>Security Crowd Funding</i>
SECO	Swiss State Secretariat for Economic Affairs
SGIE	The State Global Islamic Economy Indicator
SIAPIK	Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan
SID	Single Investor Identification
SLIK	Sistem Layanan Informasi Keuangan
SNKI	Strategi Nasional Keuangan Inklusif
SNKIP	Strategi Nasional Keuangan Inklusif Perempuan
SNLIK	Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan
SR	Sukuk Ritel
StranasLIK	Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan
SUN	Surat Utang Negara
SYAFIF	Syariah Finansial Fair
TPAKD	Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah
TPLIKD	Tim Percepatan Literasi dan Inklusi Keuangan Daerah
UE	Uang Elektronik
UMi	Ultra Mikro
UMK	Usaha Mikro dan Kecil
UMKM	Usaha Mikro Kecil Menengah
UUS	Unit Usaha Syariah
YoY	<i>Year On Year</i>

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital
Dr. Ir. Ali Murtopo Simbolon, S.T, S.Si, M.M, M.T, IPU

Ketua Pelaksana:

Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan
Dr. Erdiriyo, SE, MM

Kontributor:

Abdul Manan (ADB); **Adita Permatasari** (BI); **Angga** (Kemenperin); **Amin Mudzakkir** (Kemenko PM); **Anita Meriam** (KemenUMKM); **Antonius Dyan** (Kemenkeu); **Andriawan Yoga** (SDNKI); **Ardi Santoso** (Kemenpar); **Arinengwang Gusta** (OJK); **Arie Yanwar Kapriadi** (Kemenkeu); **Aprori Dwi Santika** (SDNKI); **Azka Kharisma Putri I.** (SDNKI); **Azizah Farras** (BI); **Basnang Said** (Kemenag); **Bayu Eka Putra** (Kemnaker); **Caroline Dewivirasari** (Kemdiktisaintek); **Cecilia Rooschella** (SDNKI); **Christopher Richie** (BI); **Denny Noviansyah** (KemendesTT); **Devi Riyanti** (BI); **Dicky Yosepial** (KemendesTT); **Dwinita Larasati** (SDNKI); **Ega Prihastari** (OJK); **Eko Setyawan** (SDNKI); **Evan Ferazzy** (SDNKI); **Esta Lestari** (ADB); **Farah Meutia** (SDNKI); **Farid Efendi** (BI); **Fatmah** (SDNKI); **Ghazy Ayyasy** (OJK); **Gilang Amaldi** (Kemnaker); **Henry Mujianto** (Kemnaker); **Ilham Assagaf** (OJK); **Irvan Adi Nugraha** (SDNKI); **Ita Yenny** (Kemenkeu); **Khansa Mutia** (BI); **Martini Hasni** (Kemenkeu); **Mochamad Fajar** (OJK); **Mirna** (Kemnaker); **Naomi Triyuliani** (OJK); **Nony Nurbasith** (SDNKI); **Nurbakti** (SDNKI); **Poornima Jayawardana** (ADB); **Rahmi Harta** (SDNKI); **Raafie S.** (ADB); **Riyana Kunhendrani** (KemenUMKM); **Roosita Dewi** (BI); **Salmatunna'imah** (SDNKI); **Satrio Adhitomo** (SDNKI); **Sedtiyo Budhi** (SDNKI); **Shamy Ardian** (Kemen ATR BPN); **Sukino** (Kemdiktisaintek); **Slamet Santoso** (Kemenko PM); **Sultan Bestari** (OJK); **Sri Noerhidajati** (BI); **Walujo Pambudi** (Komdigi); **Yanis Naini** (BPJPH); **Yohanes Santosa Eliyanto** (SDNKI); **Yuliani Marsum** (Kemenag); **Yusi Damayanti** (Kemenag); **Yuli Nurjanati** (BI); **Yusi Yuliana** (BI); **Zidal Huda** (Kemenag),

Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Gedung Pos Ibukota Lantai 5

Jl. Lapangan Banteng Utara No 1, Kota Adm Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710

Email : sekretariat.dnki@ekon.go.id

Website : <https://snki.go.id/>



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

